

info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI

EDISI # 02 SEPTEMBER 2020



Rp. 50.000,- Jabotabek
Rp. 75.000,- Luar Pulau

<https://infoindonesia.id>

JOKOWI ANTARA WABAH DAN NAFKAH

KELAPARAN LEBIH
MENAKUTKAN
DARI COVID - 19

SUMSEL MAJU
DI TENGAH KONDISI
COVID - 19



DPR Kaget
Ahok Jual
Solar Murah
ke Malaysia

Karena
Anies Baswedan
Pengusaha Terkaya pun
Bersurat Ke Istana



RP 50.000
JABODETABEK
RP 75.000
DI LUAR JABODETABEK

info indonesia

UNTUK INFORMASI
SELENGKAPNYA MENGENAI
PEMASANGAN IKLAN,
SILAHKAN HUB KAMI DI

 **(021) 791 96781**

INGIN BERIKLAN...

- ▶ **BEBERAPA MANFAAT DAN KEUNTUNGAN PASANG IKLAN DI MAJALAH INFO INDONESIA**
- ▶ **IKLAN LEBIH AKURAT DAN TERTARGET SESUAI DENGAN TOPIK PEMBAHASAN YANG ADA.**
- ▶ **LOKASI IKLAN YANG PRODUKTIF SEHINGGA MUDAH DI LIHAT PARA PEMBACA INFO INDONESIA.**
- ▶ **HARGA YANG TERJANGKAU DAN BANYAK DISKON UNTUK PARA PELANGGAN**

- ADVERTORIAL/INFORIAL (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MM
- IKLAN 1/2 CENTERSPEAD (FC)
- IKLAN 1/2 FACING PAGES (FC) (186 MM X 124 MM)
- IKLAN 1/2 HALAMAN (FC), UKURAN 186 MM X 124 MM (HORIZONTAL), 90MM X 250 MM (VERTIKAL)
- IKLAN ADVERTORIAL/INFORIAL (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MM
- IKLAN CENTERSPEAD (FC), DI LUAR EDISI KHUSUS, 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MM
- IKLAN COVER 2 (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MM
- IKLAN COVER 3 (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MM
- IKLAN COVER 4 (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MM
- IKLAN DISPLAY (FC), 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MM
- IKLAN HALAMAN 13, 15 & 17 (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MM
- IKLAN HALAMAN 3 (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MM
- IKLAN HALAMAN 5 (FC) 1 HALAMAN, UKURAN 210 X 297 MM

ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

JL. RAYA KALIBATA NO. 8, JAKARTA SELATAN 12750 TELP / FAX : 021-79196781 / 021-79196786



PENDIRI

Waherman St. Mangkuto, H. Zainuddin

DIREKTUR

Usman Rizal

PEMIMPIN REDAKSI

Gunawan Effendi

REDAKTUR PELAKSANA

Rio Taufiq Adam, Andika Salahudin

REDAKTUR

Andyanto, Zaki Almubarak, Muakbar,
Rusdiyono

REPORTER

Rifky Ilmi, Pras Budi Presetya, Ahmad Yani,
Dian Taresa, Yuni Watiana, Mario Ananta

FOTOGRAFER / VIDEO

Wahyu Ramadhan, Dede Suredec

EDITOR & GRAFIS

Al Amin

TATA LETAK

Sujatmiko

MEDIA SOSIAL

Bemby Berliandi Joandika
Aji

KEUANGAN DAN ADMINISTRASI

Dra. Nurhamida

SEKRETARIS REDAKSI

Niken Sri Astuti

PENGEMBANGAN IT

Halim Wahyudin

PENGEMBANGAN BISNIS

Kiki Ibrahim

DISTRIBUSI

Abdul Muhctar

BANK ACCOUNT

A/N : PT. Wahana Multimedia
BCA : No Rek : 553-014-4321
KCP Olistia Jakarta Timur

100 HARI

Dari mana datangnya istilah 100 hari dalam politik? Ini kisahnya antara lain. Masa 100 hari pertama kepresidenan Franklin Delano Roosevelt di Amerika Serikat.

Hari itu dimulai pada 4 Maret 1933, ketika Roosevelt dilantik sebagai Presiden ke-32 Amerika Serikat. Selama periode itu, dia mempresentasikan serangkaian inisiatif kepada Kongres yang dirancang untuk melawan efek Depresi Hebat yang mulai pada 1930, dikenal juga dengan malaise ekonomi secara global, termasuk di kawasan Hindia Belanda, Indonesia sekarang, yang kala itu menjadi eksportir gula terbesar di dunia

Prioritas khusus Roosevelt di awal masa kepresidenannya adalah membuat orang Amerika kembali bekerja, melindungi tabungan mereka dan menciptakan kemakmuran, memberikan bantuan bagi orang sakit dan lanjut usia, serta membuat industri dan pertanian kembali tumbuh.

Hari ke-100 kepresidenannya adalah 11 Juni 1933. Namun, istilah 100 hari itu baru ia ucapkan langsung dalam pidato radio pada 24 Juli 1933. Dari sanalah istilah 100 hari pertama dalam politik mulai memiliki makna simbolis, sekaligus dianggap sebagai tolok ukur untuk mengukur keberhasilan awal seorang presiden.

Roosevelt menghabiskan minggu pertama masa Kepresidenannya mengurus serangkaian penutupan bank yang menghancurkan ekonomi masyarakat AS kala itu. Dia menutup seluruh sistem perbankan Amerika pada 6 Maret 1933. Pada 9 Maret, Kongres menyetujui Undang-undang Perbankan Darurat, yang digunakan Roosevelt untuk secara efektif membuat asuransi deposito federal ketika bank-bank dibuka kembali. Dalam pidato radio pula Roosevelt berbicara kepada lebih dari 60 juta orang pendengar, untuk menyampaikan informasi dengan bahasa yang jelas "apa yang telah dilakukan dalam beberapa hari terakhir, mengapa hal itu dilakukan", dan apa langkah selanjutnya yang akan diambil. Ia berpidato di radio hingga 30 kali dalam program yang disebut "Obrolan di Perapian", mungkin sepadan dengan obrolan di dapur kita.

Dari rangkaian pidato itu sejarawan ekonomi William L Silber mengungkapkan meningkatnya kepercayaan publik terhadap perbankan dan dampak lanjutannya yang akhirnya membangkitkan kembali ekonomi AS. Roosevelt akhirnya menjadi Presiden AS terlama, hingga empat periode meskipun sudah menolak menjabat setelah masa jabatan keduanya berakhir.

Ia berhenti karena wafat pada 12 April 1945, sebelum AS mengebom Jepang dalam Perang Dunia II. Mungkin banyak yang merindukan figur Roosevelt sekarang ini: Pandemi Covid-19 beriring resesi ekonomi. ●



ALAMAT REDAKSI/IKLAN/PEMASARAN:

JL. Raya Kalibata No. 8, Jakarta Selatan 12750
Telp / Fax : 021-79196781 / 021-79196786

Twitter : @infoindonesia
Facebook : infoindonesia.id
Instagram : @infoindonesia.idn
Email : redaksi@infoindonesia.id

DAFTAR ISI

EDISI
BULAN
SEPTEMBER
2020



06 INFO UTAMA

Tantangan memang berbeda sesuai dengan zamannya. Di masa lalu, mendayung di antara dua karang blok Barat dan Timur. Kini Indonesia bagaikan mendayung di antara wabah Covid-19 dan nafkah ekonomi yang terancam resesi.



22 INFO PROFIL

Menjelang tiga tahun menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, nama Anies Baswedan kian harum. Bahkan, dirinya masuk dalam lima besar survei calon presiden 2024 mendatang.



90 INFO KHUSUS

Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia yang semakin tertekan, faktanya PT Pertamina (Persero) berhasil mengekspor minyak diesel High Speed Diesel (HSD) sebanyak 200 ribu barel ke Malaysia, seharga USD 9,5 juta.

88

INFO SELEBRITI

Para pesohor banyak menjadi model atau contoh bagi warga biasa. Termasuk dalam cara mereka memperoleh penghasilan. Banyak juga yang bercita-cita mengikuti jejak menjadi pesohor dengan merintis karir dari bawah. Tak terkecuali di Indonesia.





20 INFO TEKNOLOGI

Pada 5 Agustus 2020 Samsung akhirnya memperkenalkan secara resmi kehadiran dari Samsung Galaxy Note 20 Series, yang terdiri dari Note 20 dan Note 20 Ultra.



42 INFO SUMSEL

Gubernur Sumsel H. Herman Deru kembali melanjutkan agendanya ke Kabupaten/kota guna melanjutkan pembangunan infrastruktur, dan memulai pembangunan di Kabupaten Muratara dan Mura.



68 INFO INTERNASIONAL

Pandemi telah menyebabkan krisis ekonomi terburuk sepanjang Negeri Paman Sam merdeka pada 4 Juli 1776. Gelombang protes isu rasial, ditambah tekanan resesi ekonomi global, menjadikan Donald Trump dinyatakan oleh masyarakat Amerika Serikat sebagai presiden terburuk.

- 3 DARI REDAKSI
- 26 KOLOM
- 28 INFO EKONOMI
- 34 INFO KEBUDAYAAN
- 38 NUSANTARA
- 48 INFO NTB
- 54 INFO BABEL
- 58 INFO JAKARTA
- 60 INFO TANGSEL
- 62 INFO SUMBAR
- 64 INFO ISTANA
- 68 INFO INTERNASIONAL
- 74 INFO SPORT
- 80 INFO TRAVEL



Rapat Paripurna Kabinet yang diikuti menteri-menteri.

JOKOWI MENDAYUNG DI ANTARA WABAH DAN NAFKAH

Tantangan memang berbeda-beda sesuai dengan zamannya.

Di masa lalu, mendayung di antara dua karang blok Barat dan Timur. Kini Indonesia bagaikan mendayung di antara wabah Covid-19 dan nafkah ekonomi yang terancam resesi.

Ada yang mengutip pendapat Presiden Ghana Nana Addo Dankwa Akufo-Addo. Dia bilang, “kami tahu cara memulihkan kembali perekonomian. Yang kami tidak tahu adalah menghidupkan kembali manusia.” Kutipan ini seperti menjadi pembenar putusan *lockdown* atau karantina untuk mencegah wabah Covid-19 menelan korban lebih banyak sekaligus menomorduakan ekonomi.

Tapi dilematis memang. Letak dilemanya, ketika karantina atau *lock-*

down menutup nafkah warga, apakah ada jaminan tak akan muncul korban juga? Itulah persoalan Indonesia.

Demikianlah. Hingga pada Sidang Kabinet Paripurna mengenai Penanganan Kesehatan dan Pemulihan Ekonomi untuk Penguatan Reformasi Tahun 2021 yang digelar di Istana Negara, Jakarta, pada Senin, 7 September 2020, Presiden Joko Widodo mengemukakan fokus utama pemerintah dalam penanganan pandemi ialah tetap mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat.

Penanganan di sektor kesehatan yang baik, kata Presiden, menjadi kunci agar penanganan ekonomi yang berjalan beriringan dengannya juga dapat berjalan baik. "Kunci dari ekonomi kita agar baik adalah kesehatan yang baik. Kesehatan yang baik akan menjadikan ekonomi kita baik. Artinya fokus kita tetap nomor satu ialah kesehatan," ujarnya.

Untuk itu, Kepala Negara memerintahkan jajarannya benar-benar berfokus pada upaya penanganan pandemi Covid-19. Dari penanganan pandemi yang baik, kegiatan perekonomian pun juga akan pulih mengikuti.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengingatkan jajarannya untuk dapat mengantisipasi penyebaran pandemi melalui tiga klaster, yakni klaster perkantoran, klaster keluarga, dan klaster Pilkada. "Ini perlu saya sampaikan, hati-hati yang namanya klaster kantor. Kedua, klaster keluarga. Terakhir juga klaster Pilkada. Hati-hati, ini agar selalu diingatkan," tuturnya.

Menurut Presiden, banyak orang yang justru merasa aman ketika selesai beraktivitas dan kembali ke dalam rumah. Demikian halnya dengan ketika telah sampai ke dalam kantor maupun pabrik selepas perjalanan

dari rumah, padahal, di manapun kita berada, terdapat protokol kesehatan dan kebiasaan baru yang harus tetap diperhatikan dan dilakukan dengan ketat.

"Selalu kita kejar-kejar adalah tempat-tempat umum tapi kita lupa bahwa sekarang kita harus hati-hati di klaster-klaster tadi yang saya sampaikan, klaster keluarga, karena kita sampai di rumah sudah merasa aman, justru di situlah yang kita harus hati-hati. Dalam perjalanan, masuk kantor, kita juga merasa aman sehingga kita lupa di dalam kantor protokol kesehatan," kata Presiden.

Selain itu, Kepala Negara juga meminta jajarannya untuk menyikapi dan mengantisipasi penyebaran pandemi Covid-19 dari potensi klaster Pilkada serentak mendatang. Bahkan, Presiden meminta tindakan tegas yang harus diberikan terkait hal tersebut.

"Saya minta, ini Pak Mendagri, urusan yang berkaitan dengan klaster Pilkada ini betul-betul ditegasi. Polri juga berikan ketegasan mengenai ini, aturan main di Pilkada. Karena jelas di PKPU-nya (Peraturan KPU) sudah jelas sekali. Jadi saya kira nanti agar betul-betul ini diberikan peringatan keras,"

ucapnya.

Lebih jauh, berkaitan dengan uji usap Covid-19, Presiden Joko Widodo mengarahkan agar pelaksanaan uji tersebut dilakukan dengan lebih terencana sehingga dapat dilakukan secara merata di wilayah-wilayah di Indonesia. Seperti beberapa di antaranya ialah mengenai penentuan jumlah lab ideal di suatu daerah serta distribusi reagen uji usap di masing-masing wilayah yang ada.

"Jangan sampai yang saya lihat ada provinsi yang sudah melakukan tesnya tinggi sekali, tapi ada provinsi yang tesnya masih rendah sekali," ujar Presiden. Terakhir, Kepala Negara juga sekali lagi menekankan pentingnya rem dan gas yang perlu dilakukan dalam penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia.

"Jangan sampai kita urusan kesehatan, urusan Covid, ini belum tertangani dengan baik kita sudah me-restart di bidang ekonomi. Ini juga sangat berbahaya," tandasnya.

Nah, dua hari setelah rapat paripurna kabinet di Istana, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memutuskan penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat setelah masa PSBB Transisi. Gubernur Anies menyebutnya sebagai langkah rem darurat untuk



penanggulangan pandemi virus corona (Covid-19) di Ibu Kota.

"Dalam rapat tadi sore disimpulkan: Kita akan menarik rem darurat, kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan berskala besar seperti masa awal pandemi. Bukan PSBB transisi, tapi PSBB sebagai mana masa dulu. Ini rem darurat yang kita tarik," ujar Anies dalam konferensi pers virtual Rabu, 9 September 2020.

"Maka, dengan melihat kedaruratan ini tidak banyak pilihan Jakarta menarik rem darurat sesegera mungkin," ujar Anies. Terkait dengan itu pula, Anies menyatakan akan meniadakan sementara pembatasan lalu lintas berdasarkan nomor polisi ganjil-genap, serta membatasi transportasi umum.

"Ini butuh koordinasi perhubungan dan tetangga Jabodetabek. Dan, insyaallah besok kita koordinasi pelaksanaan fase pengetatan di hari ke depan. Kita masih miliki waktu saya harap pengelola perkantoran bersiap melakukan pembatasan," kata dia.

Putusan Gubernur DKI ini berlandaskan laju penyebaran virus corona di masa PSBB transisi yang ternyata memicu kekhawatiran lantaran jumlah kasus positif Covid-19 mencatatkan rekor penambahan tertinggi dari hitungan sebelumnya. Malah Jakarta kembali menjadi provinsi yang memiliki jumlah kumulatif kasus positif Covid-19 terbanyak dengan 48.393 orang. Dari jumlah tersebut, sebanyak 36.383 orang dinyatakan sembuh dan 1.317 orang meninggal dunia.

Anies mengungkapkan pekan pertama September 2020 ini, angka kematian di Jakarta cukup tinggi. Angka ini jauh berbeda dari angka kematian dari sejak awal pandemi berlangsung.

"Dalam satu minggu terakhir ini angka positivity rate di Jakarta itu 13,2 persen. Satu minggu terakhir. Secara kumulatif sejak awal sampai sekarang positif rate kita sekitar 6,9 persen. 13,2 persen di Jakarta dan di Indonesia 18,4 persen," jelas dia.

Anies menyebut hal ini sebagai kondisi yang mengkhawatirkan karena pemerintah harus mengimbangi fasilitas kesehatan yang dimiliki. Jumlah kasus yang tidak terkendali akan berdampak pada penanganan dan fasili-

tas kesehatan milik pemerintah.

"Kenapa mengkhawatirkan? Karena kapasitas rumah sakit ada batasnya. Bila jumlah yang membutuhkan perawatan makin hari makin banyak, di atas kemampuan kapasitas Rumah Sakit dan jumlah tenaga medis, maka kita akan menghadapi masalah besar," jelas Anies.

Sementara itu jumlah orang yang dites dengan metode PCR dalam pekan pertama September 2020 mencapai 55.424 orang atau telah berada di atas target WHO untuk Jakarta minimum melakukan tes 10.645 orang per pekan. Kasus positif Covid-19 di Ibu Kota mayoritas berasal dari kluster perkantoran. Hal ini tak terlepas dengan kebijakan pelonggaran aktivitas masyarakat yang diambil Anies dalam PSBB transisi fase satu.

Peningkatan kasus positif juga tak terlepas dari jumlah tes yang telah dilakukan Pemprov DKI. Jakarta menjadi provinsi dengan jumlah tes Covid-19 terbanyak dibandingkan provinsi lain. Selain kasus positif yang terus melonjak, DKI kini mulai kekurangan lahan khusus pemakaman pasien Covid-19. TPU Pondok Rangan, Jakarta Timur yang ditetapkan menjadi pemakaman khusus Covid-19 hanya menyisakan sekitar 1.100 lubang.

Malah Anies menegaskan penerapan PSBB di Jakarta sangat memungkinkan berlanjut, tak hanya dua pekan jika dalam pelaksanaannya tak ada pelambatan kasus corona. "Saya ingin garis bawahi, jangan harap kemudian setelah dua minggu, selesai. Tidak. Tapi kalau kecepatan yang luar biasa ini tidak ada langkah untuk memperlambat, ya ini akan jalan terus," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jumat, 11 September 2020.

Menurut Anies, PSBB yang diketatkan kembali ini penting dilakukan. Ia berharap, selama dua pekan ke depan warga tetap berada di rumah untuk mengurangi potensi penularan Covid-19. "Karena itulah mengapa pengetatan ini penting untuk kita berada di rumah dulu selama dua pekan ini. Dengan berada di rumah dulu, harapannya potensi penularan ini bisa ditekan," ujar dia.

Anies menjelaskan, situasi penye-

baran Covid-19 di Jakarta awal September cukup mengkhawatirkan. Menurut Anies, berdasarkan data Dinas Kesehatan, pada 30 Agustus terdapat 7.960 kasus aktif di Jakarta.

Angka tersebut kemudian meningkat menjadi 11.810 kasus aktif pada Kamis (10/9). Artinya, kata Anies, terdapat kenaikan 48 persen kasus aktif di Jakarta dalam 10 hari pertama di bulan September atau 3.850 kasus. "Belum pernah kita dalam waktu sependek ini, melihat pertambahan kasus sampai



Rapat Paripurna Kabinet

3.850 kasus, walaupun yang sembuh juga banyak, sembuhnya 8.994 kasus," jelasnya.

Tidak hanya itu, di pekan pertama September angka kematian akibat Covid-19 di Jakarta juga meningkat. Dinkes DKI mencatat, terdapat 197 kasus kematian akibat Covid di awal bulan September. "Jadi 17 persen dalam 10 hari. Kita ada kejadian 1.383 yang meninggal dan 197 itu terjadi di bulan September," ungkapnya.

Namun jelas, Anies belum menyebut dampak ekonomi pelaksanaan PSBB di awal wabah Covid-19 ini yang menekan laju penyebaran Covid-19 berdampak ke kinerja ekonomi Jakarta. Data Badan Pusat Statistik (BPS) yang keluar pada 5 Agustus 2020 menunjukkan, komponen-komponen pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta berkontraksi 8,22 persen (*year on year/yoy* atau dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya) pada kuartal II (April-Juni) 2020.

dangkan komponen konsumsi rumah tangga ternyata hanya berkontraksi minus 5,23 persen

Sedangkan pertumbuhan ekonomi nasional pada kuartal II 2020 tercatat hanya minus 5,32 persen. Jadi, terlihat bahwa pertumbuhan ekonomi Ibu Kota akan berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi nasional mengingat perannya sebagai pusat kegiatan pemerintahan sekaligus aktivitas ekonomi.

Pengamat Ekonomi dari Centre of

garuh oleh kinerja perekonomian DKI Jakarta. "Berangkat dari fakta bahwa DKI Jakarta adalah salah satu penyumbang ekonomi terbesar di Indonesia, tentu ini akan berdampak terhadap semakin besar pula peluang ekonomi Indonesia akan tetap berada di level negatif pada kuartal ketiga," tambahnya.

"Karena kuartal kedua Indonesia sudah minus, tinggal kuartal ketiga lagi perdebatannya akan mencapai titik positif atau enggak. Kalau negatif, maka secara teknikal Indonesia akan terkena



Kontraksi paling mendalam terjadi pada ekspor minus 12,7 persen, impor minus 14,54 persen. Selanjutnya, investasi atau Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) berkontraksi menjadi minus 10,36 persen. Kontraksi pada belanja pemerintah tercatat minus 8,51 persen disusul belanja lembaga nonprofit yang melayani rumah tangga seperti lembaga keagamaan, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan lembaga sejenisnya. Se-

Reform on Economics (Core) Yusuf Rendy Manilet mengkonfirmasi soal peran ekonomi Ibu Kota ini. "DKI Jakarta menyumbang sekitar 15-17 persen ke ekonomi nasional. Apabila perekonomian DKI Jakarta melambat bahkan berkontraksi, ini akan berpengaruh terhadap perekonomian Indonesia," ujarnya.

Pertumbuhan ekonomi nasional kuartal II yang minus 5,32 persen, kata Yusuf, sedikit-banyak memang terpen-

resesi sebab mengalami pertumbuhan minus dua kali berturut-turut," tuturnya.

Di sinilah pemerintah pusat melalui Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) yang diketuai oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto tampak berbeda pendapat dengan Gubernur Anies. Sedangkan Presiden Jokowi sebagai nakhoda kapal besar Indonesia harus mendayung di antara dua masalah besar, yaitu wabah dan nafkah. ●

PENGUSAHA TERKAYA PUN BERSURAT KE ISTANA

Dilema antara wabah dan nafkah semakin jelas ketika Robert Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia, bersurat ke Presiden Joko Widodo mengenai Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) di DKI Jakarta. Sang pengusaha terlihat mewakili segenap mata rantai bisnis sektor riil dan keuangan, tempat ia juga banyak berbisnis di dalamnya.

Sebagai orang terkaya di Indonesia selama lebih dari 10 tahun berturut-turut dengan bisnis yang menggurita, Robert Budi Hartono (dan kakaknya, Michael Bambang Hartono), tentu saja ia sangat merasakan dampak negatif wabah Covid-19 termasuk penerapan PSBB. Sebut saja bisnisnya antara lain bisnis rokok kretek Djarum warisan keluarga yang sudah melebar ke mana-mana: sektor properti, perbankan, elektronik, pulp dan kertas, perkebunan, telekomunikasi hingga yang teranyar merambah industri digital melalui perusahaan modal ventura Global Digital Prima (GDP) Venture.

Selain Djarum, Budi dan Michael adalah pemegang saham terbesar di Bank Central Asia (BCA) dan tentulah

anak-anak perusahaannya. Mereka berdua melalui Farindo Holding Ltd menguasai 51 persen saham BCA. Kakak beradik ini juga memiliki perkebunan kelapa sawit seluas 65.000 hektare di Kalimantan Barat sejak 2008, serta sejumlah properti di antaranya pemilik Grand Indonesia dan perusahaan elektronik. Salah satu bisnis Group Djarum di sektor ini bergerak di bawah bendera Polytron yang telah beroperasi lebih dari 30 tahun.

Perusahaan Polytron ini kini juga memproduksi ponsel yang sebelumnya hanya memproduksi AC, kulkas, produk video dan audio, dan dispenser. Melalui perusahaan yang baru dibuat yakni GDP Ventures, Global Digital Niaga (Blibli.com), mereka juga membeli Kaskus, situs interaktif yang tergolong paling populer di Indonesia.

Pemilik Grup Djarum tersebut mengawali bisnisnya lewat perusahaan rokok, namun kini Djarum memperluas lini bisnisnya ke sektor properti, perbankan, elektronik, pulp dan kertas, perkebunan, telekomunikasi hingga yang teranyar merambah industri digital melalui perusahaan modal ventura GDP Venture.

Di awal pelaksanaan PSBB di Jakarta pada 10 Maret 2020, Budi pasti merasakan sendiri rentetan kelesuan ekonomi, tak terkecuali bisnisnya sendiri. Data media bisnis global Bloomberg yang keluar pada 25 April 2020 (sekitar 45 hari sejak pelaksanaan PSBB pertama di Ibu Kota dan berlanjut di beberapa daerah lainnya), menyebutkan kekayaan keluarga Hartono yang merupakan orang terkaya



Karyawan rokok PT Djarum.



se-Indonesia menyusut nilai asetnya dari 18,65 miliar dolar AS pada akhir 2019 menjadi 12,65 miliar dolar. Kehilangan enam miliar dolar AS setara dengan sekitar Rp88,8 triliun dengan kurs Rp14.800 pada akhir pekan kedua September 2020.

Meskipun lini bisnis utama tak melantai di bursa, setidaknya terdapat dua perusahaan Grup Djarum yang menjadi emiten di Bursa Efek Indonesia (BEI), yaitu PT Bank Central Asia Tbk (BBCA) dan PT Sarana Menara Nusantara Tbk (TOWR). Nah, sebagian besar aset yang hilang dari keluarga Hartono tersebut antara lain di BCA. Akhir tahun 2019, harga saham BBCA bertengger di level Rp 33.425 dan memiliki nilai kapitalisasi pasar sebesar Rp 816 triliun.

Pelonggaran PSBB agaknya membuat bisnisnya bergerak kembali hingga aset yang tercatat oleh media Forbes menyebutkan jumlahnya pada pertengahan September 2020 mencapai 17,2 miliar dolar. Memang belum sampai pulih atau lebih tinggi dari 18,65 miliar yang dibukukan pada akhir 2019 lalu.

Dengan perkembangan kebijakan Gubernur DKI Jakarta untuk menerapkan PSBB kembali seperti awal mula wabah, mudah dipahami jika Budi mengkhawatirkan bisnisnya akan anjlok lagi. Sebenarnya bukan bisnis kelompok usahanya saja, melainkan juga jaringan dan efek bergandanya. Jadi, bolehlah Budi mewakili sebagian besar komunitas pengusaha di Tanah Air.

Maka bersuratlah ia ke Presiden Joko Widodo di Istana. Surat itu lantas viral di media sosial melalui akun instagram pengusaha Peter F Gontha yang pernah menjadi Duta Besar Polandia. "Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September 2020," demikian tulis @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu, 12 September 2020 lengkap dengan lampiran-lampirannya.

Dari perspektif ekonomi mikro, banyak kajian menyebutkan, dampak PSBB di awal pandemi antara lain adalah ilangnya pendapatan karena penurunan transaksi penjualan, sementara biaya tetap (*fixed cost*) semisal teknologi informasi dan komunikasi,

Maka bersuratlah ia ke Presiden Joko Widodo di Istana. Surat itu lantas viral di media sosial melalui akun instagram pengusaha Peter F Gontha yang pernah menjadi Duta Besar Polandia. "Surat Budi Hartono orang terkaya di Indonesia kepada Presiden RI September 2020," demikian tulis @petergontha disertai lampiran surat Budi Hartono, Sabtu, 12 September 2020 lengkap dengan lampiran-lampirannya.

gaji pegawai, dan pengeluaran rutin lainnya masih harus keluar meski tidak sepenuhnya. Kerugian riil akan berbeda-beda tergantung jenis pengeluaran apa yang tetap dilakukan. Di antara pengeluaran yang relatif tetap adalah sewa tempat (atau penyusutan gedung apabila milik sendiri) beserta biaya rutin yang menyertainya, antara lain tentu gaji pegawai yang tak mung-

pekerja mandiri termasuk sektor informal. Belum lagi kemungkinan keterlambatan pembayaran cicilan kredit, pengeluaran tak terduga, dan hilangnya pekerjaan.

Dari sisi makro, dampak negatif PSBB terhadap perekonomian diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan dampak PSBB dan *physical distancing* yang makin meluas di Indonesia akan memperburuk pertumbuhan ekonomi di 2020. Berkaca pada penerapan *physical distancing* di Jabodetabek sejak Maret, ekonomi Indonesia tumbuh 2,97 persen lebih rendah dari target 4,4 persen.

Sebabnya, konsumsi masyarakat jatuh menjadi 2,84 persen pada kuartal pertama 2020 dari pertumbuhan rata-rata 5,0 persen. Padahal, konsumsi menjadi penopang utama perekonomian, dengan porsi lebih dari 50 persen.

"Di sisi transportasi yang juga drop, efek dominonya ke permintaan lain. Jadi walau hanya terjadi pada Maret namun sangat dalam pengaruhnya," katanya dalam rapat kerja bersama anggota DPR Komisi XI pada Rabu, 6 Mei 2020.

Menkeu Ani memaparkan, pada tahun 2019 konsumsi masyarakat tumbuh senilai Rp9.000 triliun, di mana sebesar Rp5.000 triliun disumbang oleh Jabodetabek. Dengan adanya *physical distancing* dan juga PSBB, konsumsi masyarakat langsung anjlok.

Bahkan, ke depan konsumsi akan terus tertekan karena meluasnya pemberlakuan PSBB di berbagai daerah. Seberapa parahnya, Menkeu masih melakukan kajian dalam upaya agar perekonomian pada kuartal dua tidak terlalu jeblok.

"Kuartal dua kita antisipasi, kemungkinan ekonomi akan lebih dalam lagi jatuhnya karena PSBB meluas. Kemarin masih Jabodetabek dan Jakarta konsumsi hanya 2,84 persen. Ini adalah efek jika orang di rumah saja, dampaknya memang begitu," ujarnya.

Soal pemulihan ekonomi, perbaikan baru terjadi lepas kuartal dua. Itu semua sangat bergantung seberapa cepat pemulihan kesehatan masyarakat dari pandemi Covid-19. ●



Robert Budi Hartono

kin diputus hubungan kerjanya, juga biaya keamanan, serta pembayaran kepada supplier yang tak bisa lagi ditunda.

Belum lagi denda akibat ketidaktepatan waktu pengiriman atau pembayaran. Selanjutnya kerusakan barang apabila tertahan di gudang atau di jalan, juga pembayaran premi tambahan jika menerapkan asuransi.

Biaya lainnya yang muncul adalah pesangon apabila melakukan PHK, potensi denda keterlambatan jika pembayaran kredit atau dana talangan, dana sosial atau kedaruratan, jatuhnya nilai aset usaha, hingga penyusutan cadangan dana, bahkan ancaman kebangkrutan.

Sedangkan bagi perorangan yang bekerja maupun pekerja mandiri, kerugian PSBB adalah risiko berkurangnya gaji dan tunjangan selama masa krisis, atau hilangnya pemasukan bagi

Dari sisi makro, dampak negatif PSBB terhadap perekonomian diakui oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Ia mengatakan dampak PSBB dan *physical distancing* yang makin meluas di Indonesia akan memperburuk pertumbuhan ekonomi di 2020. Berkaca pada penerapan *physical distancing* di Jabodetabek sejak Maret, ekonomi Indonesia tumbuh 2,97 persen lebih rendah dari target 4,4 persen.

LEBIH TAKUT KEHILANGAN PEKERJAAN, PENDAPATAN, DAN KELAPARAN

Begitulah antara lain isi surat Robert Budi Hartono, orang terkaya di Indonesia, kepada Presiden Joko Widodo. Berikut petikannya yang sudah viral di berbagai media:

11 September 2020

Kepada yang terhormat:

Presiden Republik Indonesia Bapak Joko Widodo.

Dengan hormat,

Perkenankan kami melalui surat ini menyampaikan masukan untuk Bapak pertimbangan.

Kami membaca di pemberitaan, Gubernur DKI Jakarta akan memberlakukan PSBB mulai 14 September 2020.

Alasan atas pemberlakuan tersebut dikarenakan:

1. semakin besarnya kasus positif Covid-19 di masyarakat di DKI Jakarta.
2. Kapasitas rumah sakit di DKI Jakarta akan mencapai maksimum kapasitasnya dalam jangka dekat.

Menurut kami, keputusan untuk memberlakukan PSBB Kembali itu tidak tepat.

1. Hal ini disebabkan PSBB di Jakarta telah terbukti tidak efektif di dalam menurunkan tingkat pertumbuhan infeksi di Jakarta. (Bukti terlampir — Chart A negara yang berhasil dalam menurunkan tingkat infeksi melalui measure circuit breaker). Di Jakarta meskipun pemerintah DKI Jakarta telah melakukan PSBB tingkat pertumbuhan infeksi tetap masih naik. (Bukti terlampir — Chart B - DKI Jakarta)
2. Kapasitas Rumah Sakit DKI Jakarta tetap akan mencapai maksimum kapasitasnya dengan atau tidak diberlakukan PSBB lagi. Hal ini disebabkan seharusnya Pemerintah Daerah/Pemerintah Pusat harus terus menyiapkan tempat isolasi mandiri untuk menangani lonjakan kasus. (Contoh Solusi terlampir : ini adalah photo di Port Singapore yang membangun kapasitas kontainer isolasi ber-AC untuk mengantisipasi lonjakan dari kasus yang perlu mendapatkan penanganan medis. Fasilitas seperti ini dapat diadakan dan dibangun dalam jangka waktu singkat (kurang dari 2

minggu — Photo 1 - karena memanfaatkan container yang tinggal dipasang Air-con dan tangga).

Sebagai Informasi kepada Bapak Presiden, Our World In Data (salah satu organisasi terkemuka dalam hal global covid research), menunjukan Indonesia, bersama South Korea, Taiwan, Lithuania adalah negara negara yang disebut berhasil meredam...

Adapun perbaikan yang harus dilakukan untuk mengendalikan laju peningkatan infeksi di Indonesia pada umumnya dan di DKI Jakarta pada khususnya adalah sebagai berikut:

1. Penegakan aturan dan pemberian sanksi atas tidak disiplinnya sebagian kecil masyarakat kita dalam kondisi new normal. Tugas untuk memberikan sanksi atau hukuman tersebut adalah tugas Kepala Daerah dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta. Jadi jangan karena membesarnya jumlah kasus terinfeksi Covid-19 kemudian Gubernur mengambil satu keputusan jalan pintas yang tidak menyelesaikan permasalahan sebenarnya.
2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus bersamasama meningkatkan kapasitas isolasi masyarakat (contoh kontainer ber AC di tanah kosong) sehingga tidak melebihi kapasitas maksimum ICU di Jakarta.
3. Pemerintah harus melaksanakan tugas dalam hal Testing, Isolasi, Tracing dan Treatment. Sejauh ini masih banyak kekurangan dalam hal Isolasi dan Contact Tracing.
4. Perekonomian tetap harus dijaga, sehingga aktivitas masyarakat yang menjadi motor perekonomian yang dapat terus menjaga kesinambungan kehidupan bermasyarakat kita hingga pandemi berakhir. Melaksanakan PSBB yang tidak efektif berpotensi melawan keinginan masyarakat, yang menghendaki kehidupan new normal baru, hidup dengan pembatasan, memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan dan lain lain.

Masyarakat lebih takut kehilangan pekerjaan dan pendapatan serta kelaparan daripada ancaman penularan Covid-19. Beberapa lembaga survei menunjukkan hasil riset seperti itu. Di antaranya adalah lembaga survei Vox Populi, CPCS (Centre for Political Communication Studies) dan Indo Barometer, dimana masyarakat rata rata di atas 80 persen tidak menghendaki adanya PSBB kembali. ●

MENDADAK DEWAN MONETER AWAS MENAMBAH MASALAH

Di tengah dilema antara wabah Covid-19 dan program pemulihan dampak ekonominya, tiba-tiba terdengar rencana pembentukan Dewan Moneter. Sudah pernah ada sejak zaman Orde Lama rupanya.

Di tengah dilema mengatasi wabah Covid-19 yang terus meruyak dan kekhawatiran terhadap dampak ekonomi berupa krisis yang lebih luas, muncul gagasan membentuk Dewan Moneter. Dari namanya, lembaga itu pernah ada di masa lalu.

Boleh jadi ada yang merindukan warisan terbaik Orde Baru (1966-1998) berupa perencanaan ekonomi relatif selaras dengan implementasinya. Namun, perubahan tentu saja memerlukan penyesuaian yang memadai. Bagaimana dengan rencana pembentukan Dewan Moneter?

Jelas gagasan pembentukan dewan moneter adalah bagian dari perencanaan. Mulai dengan pengesahan program legislasi nasional (Prolegnas) 2020 di Dewan Perwakilan Rakyat pada Juli lalu. Pengesahan Juli 2020 merupakan revisi terhadap Prolegnas 2020 versi awal tahun.

Prolegnas yang disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pada Kamis, 20 Juli 2020 itulah, masuk antara lain RUU tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (BI). Satu paket dengan 36 RUU lainnya antara lain yang kontroversial semisal RUU tentang Pembinaan Ha-

luan Ideologi Pancasila (HIP) dan RUU terkait Omnibus Law.

Sementara RUU yang sudah lebih dulu menjadi kontroversi tampak tenggelam, pembahasan RUU Bank Indonesia yang menyebut-nyebut Dewan Moneter itu tampak berlangsung lebih cepat. Hanya sekitar satu bulan sejak pengesahan revisi Prolegnas 2020, pembahasan RUU ini sudah berlangsung. Alhasil, kontroversi lagi yang muncul.

Pada Senin, 31 Agustus 2020, Badan Legislasi Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menggelar rapat yang langsung membahas Dewan Moneter dalam Revisi Undang-Undang Bank Indonesia. Lebih dari

itu, pembahasan menyangkut fungsi Dewan Moneter, antara lain:

Dewan Moneter memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarahkan kebijakan moneter sejalan kebijakan umum Pemerintah di bidang perekonomian.

Dewan Moneter terdiri dari lima anggota, yaitu Menteri Keuangan dan satu orang menteri yang membidangi perekonomian; Gubernur Bank Indonesia dan Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia serta Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Dewan Moneter diketuai oleh Menteri Keuangan dan bersidang sekurang-kurangnya dua kali dalam



Anggota DPR sedang bersidang

sebulan atau sesuai dengan kebutuhan yang mendesak.

Nah, Anggota Badan Legislasi DPR Achmad Baidowi menjelaskan, rapat kali ini bukan membahas draf, melainkan baru membahas poin gagasan tim ahli Baleg yang dipresentasikan. "Rapatnya terbuka. Gagasan tersebut belum menjadi pendapat Baleg, hanya pengantar diskusi," ungkapnya, Senin, 31/8/20.

Diskusi itu jelas menyangkut Pasal 9 dalam UU No. 23 Tahun 1999 yang berlaku saat ini bahwa pihak lain dilarang melakukan segala bentuk campur tangan terhadap pelaksanaan tugas BI. Malah BI pun punya wewenang dan kewajiban menolak dan/atau mengabaikan segala bentuk campur tangan dari pihak mana pun dalam rangka pelaksanaan tugasnya.

Dalam RUU yang sedang dibahas DPR, Pasal 9 tersebut akan dihapuskan dan digantikan dengan pasal 9a yang akan menambahkan badan baru bernama Dewan Moneter. Dewan Moneter ini bertugas untuk "memimpin, mengkoordinasikan, dan mengarah-

kan kebijakan moneter sejalan dengan kebijakan umum pemerintah di bidang perekonomian" dan diketuai oleh Menteri Keuangan. Selain itu, Dewan Moneter juga beranggotakan satu orang menteri yang membidangi perekonomian, Gubernur Bank Indonesia, Deputy Gubernur Senior Bank Indonesia, dan Ketua Dewan Komisiner Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Baleg DPR RI Firman Soebagyo beralasan independensi BI patut dipersoalkan karena telah menjadikannya lembaga "super body" yang tidak bisa diintervensi siapapun, bahkan presiden sekalipun. Fungsi pengawasan terhadap BI ia samakan dengan dibentuknya Dewan Pengawasan KPK yang menurutnya sama-sama wajar.

"Sehingga, dalam kondisi tertentu dan genting, presiden bisa intervensi. Contohnya ada banyak. KPK juga seperti itu kemarin," katanya

Namun, di mata ekonom Anthony Budiawan yang juga Direktur Manajemen Political Economy and Policy Studies (PEPS), pembentukan Dewan Moneter itu terbukti berkali-kali gagal

mencapai tujuannya. Menurut dia, Dewan Moneter bukan sesuatu yang baru di Indonesia.

Pada 1953, lanjutnya, Indonesia sudah memiliki Dewan Moneter yang juga dipimpin oleh Menteri Keuangan dan beranggotakan menteri bidang ekonomi dan Gubernur Bank Indonesia. Alih-alih membawa perekonomian menjadi lebih baik, nyatanya tahun 1966 inflasi malah tidak terkendali. Terjadi hiperinflasi dan sanering.

"Di Undang-Undang Bank Indonesia yang lama (juga) sudah ada Dewan Moneter, sudah ada sejak tahun 1953 lalu terjadi hiperinflasi," kata Anthony Budiawan dalam diskusi virtual Forum Tebet (Forte) bertajuk Pembentukan Dewan Moneter: Skenario Merancang BI menjadi Kasir Pemerintah & Penanganan Bank Bermasalah pada Jumat, 11/9/20.

Di masa Orde Baru, ujarnya, terjadi devaluasi berkali-kali. Pada 1971 devaluasi 10 persen, lanjut 1978 devaluasi 50 persen, lantas 1983 devaluasi 38 persen dan pada 1986 devaluasi 47 persen. Begitu juga dengan inflasi tinggi. Pada 1973 inflasi 31 persen, 1974 inflasi 40 persen, pada 1975-1976 inflasi 20 persen, per 1979 inflasi 16 persen dan pada 1980 inflasi 18 persen.

Puncaknya, kata dia, terjadi krisis pada 1998 yang membuat inflasi 58 persen. Kurs rupiah 2.400 per dolar AS hingga mencapai 16.000 per dolar AS. Lalu terjadi bailout oleh Bank Indonesia sebanyak Rp 147,7 triliun dengan Rp 138 triliun yang bermasalah. Total rekap obligasi senilai Rp 430 triliun. Anthony mengatakan utang negara ini belum pernah dilunasi dengan menggunakan uang sendiri. Pemerintah melunasinya melalui utang baru.

Trauma krisis ini akhirnya membuat Bank Indonesia dibuat independen. Kebijakan Bank Indonesia tak lagi direcoki oleh siapapun termasuk pemerintah. Bank sentral bekerja untuk melakukan stabilisasi makro ekonomi sendirian. Hal itu pun ditegaskan lewat UU Nomor 23 tahun 1999.

Sejak saat itu, struktur Dewan Moneter dihapuskan. Bank Indonesia berdiri sendiri dan bebas dari campur tangan pemerintah dan pihak mana-



pun. "Struktur Dewan Moneter sudah hilang, BI sudah profesional. sejalan dengan bank dunia lainnya. Nah bank sentral harus seperti ini," kata dia.

Anthony menjelaskan kegagalan Dewan Moneter membuktikan masalah moneter sudah sepatutnya diserahkan kepada ahlinya yakni bank sentral, bukan pihak lain. Sehingga jika DPR akan merevisi UU Bank Indonesia dengan membuat Dewan Moneter, sama halnya sistem moneter Indonesia mundur.

"Membentuk Dewan moneter itu kita jadi primitif lagi. Menghancurkan sistem moneter kita, kebijakan moneter dipegang bukan ahli moneter,"

keuangan di tengah pandemi Covid-19.

Menanggapi adanya Dewan Moneter tersebut, Deputy Komisioner Hubungan Masyarakat dan Logistik OJK Anto Prabowo mengatakan, OJK belum bisa memberikan tanggapan. Anto menjelaskan, adanya Dewan Moneter merupakan usulan tenaga ahli dari rapat Baleg. Mereka pun diminta melengkapi dengan Naskah Akademis dan Baleg akan membentuk Panitia Kerja (Panja) yang melibatkan ahli yang kompeten untuk bisa menjawab tantangan bank sentral ke depan.

"Demikian pula halnya dengan isu pengawasan bank, karena OJK diben-

mengelola utang yang membesar dan meningkatkan penerimaan pajak. Menurut dia, fokus OJK saat ini adalah kolaborasi dan sinergi ini untuk mencapai pertumbuhan yang disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian di akhir tahun bisa mencapai kisaran 0 persen sampai 0,25 persen.

Sedangkan Ekonom senior Rizal Ramli mengatakan pemerintahan saat ini seharusnya fokus pada upaya untuk membebaskan masyarakat agar keluar dari krisis, bukan malah terus menumpuk kekuasaan. "KKSK sudah diberi kekuasaan luar biasa via UU No 2 Tahun 2020, Menteri Keuangan 'terba-



Ekonom Senior Rizal Ramli

tandasnya.

Ekonom Institut For Development of Economics and Finance (INDEF) Dradjad H Wibowo menimpali bahwa tanpa kontrol maksimal, RUU ini berpotensi menciptakan diktator moneter. Alasannya, revisi UU BI ini "tidak logis, tidak jelas efektivitasnya, dan membahayakan stabilitas moneter dan keuangan kita."

Terlebih lagi, menurut dia, tidak ada satu negara pun yang merombak struktur dan sistem otoritas moneter dan

tuk oleh DPR yg mengedepankan pengawasan terintegrasi sehingga dapat memitigasi transaksi dan produk hybrid yang menjadi tantangan ke depan," kata dia.

OJK juga meminta pengawas untuk tetap fokus dalam tugasnya mengatasi dampak Covid-19 terhadap sektor keuangan yang saat ini masih terjaga baik karena koordinasi yang kuat antara OJK, BI dan LPS.

Sementara otoritas fiskal sekarang, kata Anto, juga sedang bekerja keras

lik' usulkan lagi kekuasaan tambahan agar BI, OJK, LPS di bawah Menkeu dengan bentuk lembaga baru Dewan Moneter," ujarnya.

Rizal Ramli menyayangkan Presiden Jokowi yang begitu gampang mempersilakan menteri-nya menambah kekuasaan. Padahal mestinya mereka segera sadar dan fokus menyelesaikan krisis. "Kuasa-demi tambah-kuasa, tapi tidak fokus pada keluar krisis. Pak Jokowi kok sebegitu mudahnya diakali?" kata Rizal Ramli. ●

INI KATA MENTERI KEUANGAN TENTANG DEWAN MONETER

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati ikut menanggapi isu pembentukan Dewan Moneter di tengah wabah Covid-19. Ia menegaskan pemerintah sama sekali belum membahas RUU tersebut, dan revisi tersebut merupakan inisiatif DPR.

Menurut Sri Mulyani, ia akan melihat terlebih dahulu proses legislasi secara keseluruhan. Ia juga mengklaim sebagai Menteri Keuangan bersama anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) dan unsur pemerintah lainnya belum pernah membahas hal tersebut. "Kita belum pernah membahasnya, jadi kita lihat saja dulu. Itu proses legislasi kita lihat, kalau itu inisiatif dari DPR nanti kita lihat dalam proses pelaksanaannya," ujarnya di Gedung DPR, Selasa, 1 September 2020.

Bu Menteri malah merasa perlu menjelaskan lebih jauh soal Dewan Moneter ini dalam sebuah video conference pada Jumat, 4 September 2020 karena "beberapa hari terakhir banyak disampaikan revisi UU tentang BI yang merupakan inisiatif DPR. Pemerintah belum membahas RUU inisiatif DPR tersebut."

Menurut dia, sikap pemerintah jelas atau sama seperti yang sering disampaikan oleh Presiden Joko Widodo yaitu BI sebagai otoritas moneter harus tetap independen. "Penjelasan Bapak Presiden dalam hal ini posisi pemerintah sangat jelas, bahwa kebijakan moneter harus tetap kredibel efektif dan independen," sambungnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini pun menjelaskan BI dan pemerintah dalam hal ini Kementerian Keuangan bersama-sama bertanggung jawab menjaga stabilitas dan kepercayaan ekonomi demi memajukan kesejahteraan, kemakmuran, serta keadilan bagi masyarakat. "Pemerintah berpandangan penataan dan penguatan sistem keuangan harus mengedepankan prinsip tata kelola atau *governance* yang baik," tandasnya. •





Menko Perekonomian, Airlangga Hartarto

Kesehatan Pulih, Ekonomi Bangkit

BAGAIMANA CARANYA?

Slogan itu jelas harapan yang sangat tinggi: kesehatan pulih, ekonomi bangkit. Namun, persoalannya kecenderungan global pun menunjukkan fakta yang berlawanan. Dapatkah Indonesia berbeda sendirian di tengah kecenderungan dunia?

wabah Covid-19 menciptakan rekor-rekor baru di dalam negeri maupun lingkup global.

Di lingkup global, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), melaporkan rekor baru lonjakan kasus harian Covid-19 secara global, yakni 307.930 kasus dalam 24 jam pada Minggu, 13 September. Lonjakan terbesar terjadi di India, Amerika Serikat dan Brasil seiring dengan angka kematian akibat Covid-19 yang bertambah 5.537 menjadi 917.417 kematian.

India mencatat 94.372 kasus baru Covid-19, yang disusul oleh AS dengan 45.523 kasus dan Brasil dengan 43.718 kasus. AS dan India masing-masing melaporkan kematian baru Covid-19 di atas angka 1.000. Sementara, Brasil mengonfirmasi 874 kematian dalam 24 jam terakhir.

Rekor kasus baru Covid-19 WHO sebelumnya berjumlah 306.857 pada

6 September. Sedangkan rekor angka kematian terbanyak dalam 24 jam terjadi pada 17 April 2020 yang mencapai 12.430 jiwa di seluruh dunia.

Di Indonesia, September 2020 mencatatkan beberapa rekor tertinggi untuk wabah Covid-19. Pada Kamis, 10 September 2020 kasus positif bertambah 3.861 orang dalam sehari sehingga totalnya menjadi 207.203 orang. Rekor tertinggi kasus positif Covid-19 sebelumnya sempat terjadi pada 3 September 2020 dengan penambahan 3.622 kasus.

Padahal pada bulan sebelumnya, muncul beberapa indikasi melegakan, antara lain rekor jumlah pasien sembuh dalam sehari pada 24 Agustus yakni sebanyak 3.560 kasus. Total jumlah pasien sembuh pada saat itu ada di angka 111.060 kasus.

Sementara itu, rekor angka kematian harian relatif melandai setelah jumlah

Wabah Covid-19 masih merajalela dan ekonomi global juga tanpa tanda-tanda akan pulih segera. Faktanya, memasuki September 2020,

pasien meninggal dalam sehari mencatatkan angka tertinggi pada 22 Juli dengan 139 kasus. Total jumlah kematian pada saat itu adalah 4.459 kasus.

Berlawanan dengan itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia semester pertama (Januari-Juni) 2020 justru menunjukkan penurunan yang signifikan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I (Januari-Maret) 2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh sebesar 2,97 persen. Sedangkan jika dilihat per kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen.

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II (April-Juni) 2020 semakin terpuruk dan mengancam Indonesia masuk ke jurang resesi, yakni jika pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau penyusutan dua triwulan berturut-turut dalam perbandingan tahunan. BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 menyusut hingga minus 5,32 persen dibandingkan dengan triwulan II 2019.

Sebagai tambahan, pada periode yang sama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat 9,8 juta orang kehilangan pekerjaan per Juni 2020. "Dari 9,8 juta itu, kira-kira 30 persen di-PHK dan lebih dari separuh dirumahkan mengingat utilitas manufaktur rendah sekali," ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Senin, 22 Juni 2020.

Nah, menghadapi rekor-rekor Covid-19 yang meningkat tajam, sementara pertumbuhan ekonomi terus terpuruk, Presiden Jokowi menyiasatinya dengan membentuk Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KC-PEN) berlandaskan Perpres No 82 Tahun 2020 pada 20 Juli 2020.

Secara khusus komite ini mengintegrasikan kewenangan Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 yang sebelumnya berperan sebagai lembaga sentral dalam kewenangan penanggulangan dampak Covid-19 dengan kewenangan kementerian/ lembaga lainnya untuk percepatan pemulihan ekonomi akibat pandemi ini.

Dengan demikian, gugus tugas tersebut, beserta delapan belas lembaga negara lainnya, dibubarkan dan beberapa lembaga dialihkan kewenangannya pada komite ini.

Komite ini diketuai oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, diikuti oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir sebagai ketua pelaksana. Di bawah ketua komite dan ketua pelaksana, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Doni Monardo ditetapkan sebagai kepala satuan tugas penanganan Covid-19 dan Wakil Menteri I Badan Usaha Milik Negara Budi Gunadi Sadikin ditetapkan sebagai Kepala Satuan Tugas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional.

Namun, sejak Komite PC-PEN terbentuk, belum ada tanda-tanda PC

dah ditingkat kematian global di angka 3,3 persen.

Namun, lanjut Anies, jumlah kematian absolut harian menunjukkan peningkatan. "Sejak pertengahan Agustus sampai dengan September menunjukkan tren yang meningkat," ujarnya.

Ia menambahkan angka pemakaian yang menggunakan protap Covid-19 juga meningkat. Belum lagi ketersediaan fasilitas kesehatan dan tenaga medisnya.

"Itu artinya kita terpaksa kembali menerapkan pembatasan sosial berskala besar seperti pada masa awal pandemi dulu. Bukan lagi PSBB transisi tapi kita harus melakukan PSBB sebagaimana masa awal dulu dan inilah rem darurat yang harus kita tarik," kata Anies.

Untuk melaksanakan PC-PEN di



Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan

yang meyakinkan keberhasilan pengendalian maupun PEN yang juga melegakan. Ibu Kota sebagai indikator penting penanganan wabah Covid-19 menunjukkan tanda-tanda buruk perkembangan wabah Covid-19 sebagaimana dikemukakan oleh Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan.

Menurut dia, per Rabu, 9 September 2020, tercatat 1.347 kematian akibat Covid-19 atau 2,7 persen dari total 49.837 kasus. Angka itu jelas lebih rendah dari tingkat kematian nasional di angka 4,1 persen, bahkan lebih ren-

tingkat lokal Ibu Kota pun, agaknya Anies lebih siap dari Komite. Termasuk soal penegakan hukum dan pemberian sanksi terhadap para pelanggar kebijakan PSBB maupun kegiatan yang terkait dengan upaya memulihkan kesehatan dan membangkitkan ekonomi Ibu Kota.

"Saya ingin sampaikan, Jakarta ini bukan saja sudah punya aturan, kita lebih sudah menegakkan aturan. Jadi kami levelnya bukan level baru bikin aturan, kami levelnya sudah menegakkan dan bisa diukur," tandas Anies. ●



SAMSUNG GALAXY NOTE 20 DAN NOTE 20 ULTRA RESMI HADIR! INI SPESIFIKASINYA!

Pada 5 Agustus 2020 waktu setempat, Samsung baru saja menggelar ajang Galaxy Unpacked terkini. Dalam ajang tersebut, Samsung akhirnya memperkenalkan secara resmi kehadiran dari Samsung Galaxy Note 20 Series, yang terdiri dari Note 20 dan Note 20 Ultra.



Keduanya dirancang secara khusus untuk bisa menjadi smartphone premium, dengan S-Pen yang menjadi ciri khasnya tertanam pada smartphone seri ini guna mempermudah pengguna melakukan multitasking lebih baik.

Samsung Galaxy Note 20 mengusung besar layar 6,7 dengan panel Super AMOLED beresolusi 2345 x 1084 piksel dan refresh rate 60 Hz. Untuk Note 20 Ultra, memiliki besar layar 6,9 berpanel Dynamic AMOLED beresolusi 3096 x 1444 piksel dengan refresh rate 120 Hz. Keduanya sama-sama memiliki kamera depan berupa punch hole kecil (Infinity-O) yang terletak di sisi atas tengah layar utama, dengan beresolusi 10 MP.

Dapur pacu utama dari Samsung Galaxy Note 20 Series yang akan hadir di Indonesia adalah menggunakan chipset Exynos 990. Samsung Galaxy Note 20 mengusung kapasitas RAM dan storage internal yang besar, dengan Note 20 memiliki satu varian yakni di 8 GB/256GB, sementara Note 20 Ultra lebih besar di 8 GB/256 GB dan varian 8 GB/512 GB.

Sayangnya, untuk Note 20, hadir tanpa slot untuk Micro SD tambahan sehingga pengguna harus puas dengan kapasitas 256 GB saja, sementara Note 20 Ultra memiliki slot Micro SD yang tergabung dalam bentuk tray hybrid dengan slot SIM. Tapi menariknya, Galaxy Note 20 Ultra ini memungkinkan untuk penggunaan e-SIM sehingga satu perangkat tetap bisa menggunakan 2 buah nomor + 1 Micro SD card.

Untuk pilihan warna, terdapat banyak variasi, di mana Note 20 memiliki pilihan warna Mystic Bronze, Mystic Grey, dan Mystic Green. Sementara Note 20 Ultra memiliki pilihan warna Mystic Bronze, Mystic Black, dan Mystic White.

Untuk spesifikasi kamera, Samsung Galaxy Note 20 Series mengusung sensor Ultra Wide 12 MP f/2.2 + Wide 12 MP f/1.8 OIS + Tele 3x Optical 64 MP f/2.0 OIS. Sementara Galaxy Note 20 Ultra mengusung kamera Ultra Wide 12 MP f/2.2 + Wide 108 MP f/1.8 OIS + Tele 5x Optical 12 MP f/3.0 OIS. Sementara untuk kapasitas baterainya, Samsung Galaxy Note 20 men-

gusung baterai 4300mAh sementara Note 20 Ultra sedikit lebih besar di 4500mAh.

Nah seperti apa penampilan dan hands-on pertama kami terhadap dua perangkat flagship terbaru dari Samsung tersebut?

Samsung Galaxy Note 20 Ultra Jadi Perangkat Pertama dengan Gorilla Glass Victus

Tidak lama ini, Corning yang terkenal dengan produk lapisan pelindung layar gadget miliknya, Gorilla Glass, baru mengumumkan kehadiran produk barunya yang diberi nama Gorilla Glass Victus. Produk ini sendiri disebut akan digunakan secara perdana pada perangkat Samsung berikutnya, yang telah ditemukan perangkat yang dimaksudkan oleh Corning adalah perangkat Samsung Galaxy Note 20 Ultra.

Samsung Galaxy Note 20 Ultra menggunakan lapisan Corning Gorilla Glass pada bodi depan maupun belakangnya. Hanya saja, bodi belakang masih menggunakan Gorilla Glass versi 5, sementara layar utamanya yang diproteksi menggunakan Gorilla Glass Victus.

Sementara untuk Galaxy Note 20 biasa, hanya menggunakan Corning Gorilla Glass 5 saja dengan bodi belakang memiliki material polikarbonat. Hal ini seperti dikarenakan agar Samsung bisa menekan bobot keseluruhan dari perangkat Galaxy Note 20 agar tidak terlalu "bulky" maupun kelewat berat.

Corning Gorilla Victus sendiri memiliki kemampuan yang jauh lebih baik dibandingkan produk sebelumnya dalam memberikan proteksi terhadap layar. Disebut, Gorilla Glass Victus ini mampu menahan resistansi hingga 4x lipat dibandingkan dengan lapisan pelindung dari brand kompetitor, di mana Gorilla Glass Victus juga mampu melindungi layar bahkan ketika jatuh dari ketinggian 2 meter. ●

Salah satu fiturnya termasuk stylus S Pen yang menjadi ciri khas seri Galaxy Note. Seperti Galaxy Note 10 reguler, S Pen milik Galaxy Note 10 Lite juga didukung teknologi Bluetooth Low-Energy (BLE).





Anies Baswedan

SOSOK CERDAS YANG BERGERAK DALAM DIAM

Menjelang tiga tahun menjabat sebagai
Gubernur DKI Jakarta, nama Anies
Baswedan kian harum.

Bahkan, dirinya masuk dalam lima besar survei calon presiden 2024 mendatang. Namun, sejauh apa sepak terjang pria kelahiran di Kuningan, Jawa Barat, 7 Mei 1969 ini?

Saat muda, otak cerdas Anies membawa langkahnya jauh hingga ke Jepang dan Amerika Serikat. Bahkan, ketika masih menjadi mahasiswa di Fakultas Ekonomi Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta pada 1993, mendapat beasiswa dari JAL Foundation untuk mengikuti kuliah musim panas di Sophia University, Tokyo dalam bidang kajian Asia.

Beasiswa ini didapatkan setelah memenangkan sebuah lomba menulis mengenai lingkungan.

Lulus dari UGM, otak cerdasnya memberinya kesempatan mendapat beasiswa Fulbright dari AMINEF untuk melanjutkan kuliah master dalam bidang keamanan internasional dan kebijakan ekonomi di School of Public Affairs, University of Maryland, College Park pada 1997.

Bahkan saat lulus, ia dianugerahi William P. Cole III Fellow di universitasnya, pada Desember 1998.

Kecemerlangan pria yang kini berusia 51 tahun ini, tak perlu diragukan lagi. Sesaat setelah lulus dari Maryland, Anies kembali mendapatkan beasiswa untuk melanjutkan kuliahnya dalam bidang ilmu politik di Northern Illinois University pada 1999.

Dia bekerja sebagai asisten peneliti di Office of Research, Evaluation, and Policy Studies di kampusnya, dan meraih beasiswa Gerald S. Maryanov Fellow, penghargaan yang hanya diberikan kepada mahasiswa NIU yang berprestasi dalam bidang ilmu politik pada 2004.

Disertainya yang berjudul Regional Autonomy and Patterns of Democracy in Indonesia menginvestigasi efek dari kebijakan desentralisasi terhadap daya respon dan transparansi pemerintah daerah serta partisipasi publik, menggunakan data survei dari 177 kabupaten/kota di Indonesia.

Namun, karir politik Anies Baswedan mulai naik daun pada 2014 silam. Ketika dirinya ditunjuk sebagai juru bicara pasangan calon Presiden Joko Widodo

dan Wakil Presiden Jusuf Kalla.

Sorotan kamera pun tak lepas dari dirinya. Strategi komunikasi yang dibawakannya dengan tenang, dengan cara sedikit satire pun pada saat Pilpres 2014, berhasil menarik simpati publik.

Anies dengan elegan berhasil memanfaatkan nama Jokowi dan JK, sebagai sosok baru yang dapat membawa pembaruan.

"Buat saya malah menjadi menarik. Selama ini kita menyaksikan jika orang menginginkan menjadi sesuatu, maka lakukanlah kerja untuk masyarakat. Bukan semata-mata menggunakan dana untuk berkampanye dengan nilai yang fantastis tentunya. Jika Anda menginginkan menjadi pemimpin lakukan sesuatu bagi rakyat. Dana yang sama, bisa dilakukan untuk petani, nelayan, pendidikan. Daripada untuk beriklan selama bertahun-tahun. Begitu kemu-

didikan dan Kebudayaan.

Hanya 21 bulan Anies menjabat sebagai menteri. 27 Juli 2016, ia dicopot oleh Jokowi. Isu yang beredar, ayah empat orang anak ini tidak memiliki skala prioritas pekerjaan. Ada juga yang menyebut karena sering mengambil kebijakan melampaui presiden.

Pergi Menyeberang

Tapi Anies tak berkecil hati. Suami Fery Farhati Ganis mulai sadar posisinya dalam kancah politik nasional.

Kiprahnya sebagai juru bicara, dan pengalaman memimpin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, membuat Anies sadar benar bahwa politik adalah hal yang dinamis.

Tidak boleh terbawa perasaan. Bahkan marah atau kecewa karena sosok yang dibelanya justru menjatuhkannya.



Gubernur Anies Baswedan sedang menyalami warganya.

dian, kita membutuhkan orang yang bukan pemburu kekuasaan. Berikan amanat justru pada orang yang tidak memburu," ucap Anies membela Jokowi di hadapan Mahfud MD sebagai Ketua Tim Pemenangan Prabowo-Hatta pada salah satu acara TV swasta, 2014 silam.

Jokowi-JK pun menang. Anies ikut berbahagia. Ketika dilantik dan menyusun Kabinet Kerja, mantan Rektor Universitas Paramadina, Jakarta ini kemudian ditunjuk sebagai Menteri Pen-

Di saat Pilkada DKI Jakarta 2017, ia mempersiapkan diri mengincar jabatan yang dulu pernah diduduki Jokowi. Gubernur DKI Jakarta.

Berbagai manuver pun dilakukannya. Lewat akun YouTube, ia menunggah sebuah video berjudul 'Kenapa Memilih Anies'.

Kemampuannya berkomunikasi tergambar benar pada video berdurasi 59 detik tersebut.

"Ketika saya ikut menawarkan karya. Menawarkan gagasan untuk Jakarta.

• INFO PROFIL

Maka jangan lihat Anies-nya. Jangan lihat Pak Agus saja. Pak Basuki. Jangan lihat orangnya saja. Tetapi bayangkan Jakarta 5 tahun ke depan. Nuansa seperti apa yang akan tumbuh di Kota Jakarta. Suasana seperti apa kota ini, di bawah kepemimpinan di antara tiga pilihan itu. Kondisi seperti apa yang diinginkan 5 tahun ke depan. Jadi kita bukan sekadar memilih Pak Basuki, saya, atau Pak Agus. Tapi kita sedang memilih suasana Jakarta ke depan. Dan ini pelajaran buat semua. Lihat pilihannya, baru tentukan yang mana,” ucap Anies pada video yang diunggah 30 Desember 2016.

Kecerdasan Anies dalam dunia politik pun tak perlu diragukan lagi. Video

calon DKI 1 dan 2.

Terbukti, dia berhasil menggugurkan pasangan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok yang berpasangan dengan Djarot Saiful Hidayat.

Anies menang di putaran kedua, setelah berbagai drama dan juga demonstrasi yang terjadi di Jakarta.

“Pak Zulkifli (Zulkifli Hasan) memberikan petuah dan nasihat serta pesan kepada saya untuk terus memperhatikan dinamika politik,” ujar Anies Baswedan di gedung Nusantara III DPR RI, Kamis 5 Juli 2018 silam.

Tak Bisa Menyenangkan Semua Pihak

Posisi Anies sebagai Gubernur DKI

Tidak ada juga yang benar-benar jahat. Ada yang mendukung. Ada juga yang tidak.

Sebagai contoh peraturan drastis yang ditetapkan Anies adalah ketika Jalan Sudirman hingga Senayan dibuka untuk sepeda motor. Padahal di era Jokowi, di jalan tersebut, pengendara roda dua dipisahkan dengan separator yang membuat kemacetan tiap malamnya.

Namun, genap satu tahun menjabat, Anies malah ditinggalkan pasangannya Sandiaga Uno, yang dipinang Prabowo Subianto untuk maju dalam Pilpres 2019. Namun, ia tidak terbawa perasaan.

Bahkan, dengan elegan dia



Warga berebut menyalami Gubernur Anies Baswedan

itu hanya bagian kecil dari cara berpolitiknya demi meyakinkan warga Jakarta memilihnya.

Lebih hebat lagi, meski pada 2014 berseberangan dengan Prabowo Subianto. Momentum Pilkada 2017, dia justru menjadi kawan. Gerindra dan PKS mengusungnya berpasangan dengan Sandiaga Uno untuk maju sebagai

Jakarta semakin menambah kredibilitasnya. Dia bahkan disebut sebagai tokoh yang mampu memimpin negara ini.

Pasalnya, Jakarta sebagai episentrum nusantara, membuat posisinya pun terus diamati. Berbagai kebijakannya mengalami pro dan kontra.

Tidak ada yang benar-benar baik.

tidak ikut campur dalam kampanye Prabowo-Sandi. Dia fokus mengerjakan tugasnya sebagai gubernur.

Kekosongan kursi wakil gubernur, membuat Anies bekerja sendiri. DPRD DKI Jakarta pun meributkan kondisi tersebut. Tapi dia tak bergeming. Tetap kerja.

Bahkan sampai Pemilu 2019 usai,

dan kursi-kursi di Kebon Sirih- sebutan kantor DPRD DKI Jakarta- berganti kepemilikan Anies masih saja kerja sendirian.

Salah satu sepak terjang Anies yang menjadi sorotan ketika dia meloloskan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) pulau reklamasi di utara Jakarta. Dirinya merasa terpojokkan saat itu.

Bahkan enggan menerima wawancara dari awak media. Dia hanya melayani pertanyaan dari wartawan di Balai Kota. Hingga sampai harus memberikan video klarifikasi di kanal YouTube milik Pemprov DKI Jakarta.

Penjelasan paling langgam yang diucapkan Anies bahkan hanya melalui kanal YouTube Pandji Pragiwakso-

tempat-tempat lain. Bukan dengan cara yang lain-lain. Bukan kuat-kuatan massa di demo. Tapi legal nih. Ini boleh dijadikan rujukan. Ini lho cara menghentikan yang tenang, damai," imbuh Anies.

Dia berdalih IMB diberikan karena legalitasnya sudah lengkap. Tapi dia menghentikan proses reklamasi pulau-pulau yang belum dibangun. Namun, khusus pulau yang sudah jadi, harus dimanfaatkan.

Paling Mencolok di Masa Pandemi

Cobaan Anies tidak berhenti sampai di situ. Ketika seluruh dunia diserang wabah pandemi Covid-19, Jakarta menjadi pusat penyebaran utama di Indonesia.

Kekhawatiran Anies dari bahaya

Sebulan sejak larangan keluar rumah ditetapkan Anies, jumlah pasien positif virus yang berasal dari Wuhan, Tiongkok ini tercatat hingga 990 orang. Hingga sekarang, angka pertumbuhannya pun tak kunjung turun. Bahkan, ketika tulisan ini dibuat, telah mencapai 41.250 pasien positif Covid-19.

Namun, Anies tak kehabisan akal. Secara cepat dia membuat kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) pada 3 Maret 2020. Akibatnya seluruh warga Jakarta, diwajibkan untuk bekerja di rumah.

Sontak, kebijakan ini menjadi contoh untuk gubernur dari daerah lain mencontoh.

Covid-19 membuat Anies mega



Gubernur Anies Baswedan dan Wakil Gubernur Reza Patria

no yang merupakan Juru Bicara pada Pilkada DKI 2017.

"Ketika orang mengurus sesuatu dengan ketentuan. Otomatis dia mendapatkan izinnya. Bukan sesuatu yang bisa, oh ini nggak bisa dapat izin," jelas Anies.

"Ini sebetulnya cara yang kita kerjakan kemarin, bisa dijadikan rujukan di

Covid-19 melampaui Presiden Jokowi dan Wapres Ma'ruf Amin, beserta para menteri.

Bahkan, Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto sempat bercanda mengenai Covid-19. Ia berseloroh bahwa wabah pandemi tidak akan berani masuk ke Indonesia, karena masyarakatnya sering berdoa.

bin-tang. Wajahnya paling sering muncul di layar televisi dan ponsel. Karena setiap sore selalu meng-update data penyebaran Covid-19.

Maka wajar saja, publik melihat sosok Anies saat ini dengan cara berbeda. Dari pendukung Jokowi-JK. Hingga orang yang paling sadar tentang bahayanya virus corona. •ra

DAGING MENTAH

Siapa yang mengenal JBS?
Sebagai pribadi atau perusahaan?

Well, JBS memang pribadi yang menjadi nama perusahaan. Orang Brasil. JBS identik dengan José Batista Sobrinho. Ia mulai memelihara sapi di sebuah peternakan di Brasil pada 1953. Hanya tiga tahun kemudian, JBS sudah menjadi pemasok daging mentah untuk eceran dan restoran di seluruh ibu kota yang baru berkembang, Brasilia.

JBS membeli rumah pemotongan hewan pertamanya pada 1968, dan pada 1970, telah meningkatkan produksi sebesar 400 persen.

Ketiga putra Sobrinho putus sekolah untuk mengelola rumah pemotongan hewan. JBS membeli beberapa perusahaan pengepakan daging di Brasil pada 1990, dan berusaha untuk berkembang di seluruh Amerika Selatan. JBS meminta Jeremiah O'Callaghan memperluas waralaba di tingkat global enam tahun kemudian. Pada 2005, JBS membeli perusahaan pertamanya di luar Brasil: Swift Armor, penghasil dan pengeksport daging terbesar di Argentina. Lantas JBS meluncurkan IPO di Brasil pada 2007.

Eksistensi bisnisnya terus berkembang hingga pasarnya menjangkau Amerika Serikat. Namun, JBS kekurangan dana untuk terlibat di pasar AS. Toh dengan cepat segera berubah sebagian besar karena pemerintah Brasil. Bank Pembangunan Brasil (BNDES) menerapkan kebijakan "Juara Nasional" dari 2007-2013, yang bertujuan mendukung keuangan perusahaan tertentu yang ingin melakukan ekspansi internasional.

Pemerintah Brazil beranggapan bahwa ekspansi perusahaan-perusahaan ini akan menghasilkan peningkatan pendapatan yang besar bagi negara tersebut. BNDES memberikan sejumlah besar uang publik kepada konglomerat seperti JBS. Investasi pertama BNDES di JBS mencapai \$ 390 juta. Pada 2011, BNDES menguasai 20,6 saham perusahaan JBS.

Konsolidasi ini menjadikan JBS sebagai produsen daging terbesar di dunia. JBS juga menjadi pengolah daging sapi, babi, dan domba terkemuka serta produsen unggas terbesar kedua di AS. Menjadi perusahaan internasional melengkapi JBS dengan segudang solusi yang memungkinkan perusahaan manipulasi bisnisnya dengan berbagai cara.

Eksistensi ke negara pengeksport lain telah memungkinkan JBS menghindari ketentuan keamanan pangan atau pem-

batasan sanitasi dan fito-sanitasi yang diberlakukan pada ekspor Brasil. Misalnya, UE membatasi daging Brasil pada 2008, mengkritik peternak di Brasil karena gagal mematuhi langkah-langkah UE dalam penelusuran sumber pasokan yang memenuhi syarat keamanan pangan dan lingkungan. Namun JBS tak kehilangan akal dengan memanfaatkan anak perusahaannya di Australia untuk mengeksport ke Eropa. Demikian pula, JBS memiliki unit perusahaan sendiri di AS untuk mengatasi embargo daging sapi Brasil yang memungkinkan perusahaan untuk menghindari potensi kehilangan pendapatan.

Bahkan di masa wabah Covid-19 yang mula terdeteksi pada akhir 2019 sekalipun, JBS tetap berjaya, dan malah memasuki wilayah sumber virus corona: Tiongkok. Pada 27 Januari 20, JBS menyepakati pengiriman pasokan untuk WH Group, pengolah daging yang berbasis di Hong Kong dengan akses ke gerai ritel menyediakan produk daging sapi, babi, dan unggas senilai sekitar \$ 687 juta dolar per tahun. Langkah tersebut menyusul kesepakatan pada bulan November antara JBS dan Alibaba yang berbasis di China senilai \$ 1,5 miliar.

"Kami telah melihat perubahan dalam profil konsumen China terkait konsumsi protein dan meningkatnya perhatian terhadap kualitas makanan, keterlacakan produk, dan peningkatan keamanan pangan," kata Renato Costa, presiden Friboi, divisi daging sapi JBS yang dikutip berbagai media.

Epidemi demam babi Afrika pada 2019 yang memaksa pemusnahan puluhan juta babi di Tiongkok, memang sangat memengaruhi pasokan domestik di pasar daging babi terbesar di dunia. Ini menjadikan JBS semakin mantap sebagai pemasok daging mentah terbesar di dunia, dan Brasil mengeksport lebih banyak daging sapi daripada negara lain.

Namun, semakin besar peternakan, semakin besar pula dampak lingkungannya. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat bidang lingkungan dan para pegiat lingkungan lokal melihat JBS yang kian meraksasa itu mengorbankan hutan negara. Pembukaan lahan untuk penggembalaan ternak di hutan Amazon menyebabkan sebagian besar deforestasi di sana. Juga, pembukaan lahan ladang kedelai untuk memasok pakan babi dan ayam kini menyelimuti hamparan hutan sabana yang disebut cerrado dalam istilah lokal.

Pada pertengahan 2019, para peneliti dari Pemantauan Proyek Amazon Andes, sebuah inisiatif dari LSM Konservasi Amazon, menunjukkan bahwa banyak kebakaran musim panas di Amazon Brasil kemungkinan besar terjadi di lahan yang sebelumnya telah dibuka untuk membuka padang rumput ternak. Penyelidikan terhadap rantai pasokan JBS telah menemukan bukti bahwa pemasoknya menggembakkan ternak mereka di

lahan hasil pembalakan ilegal.

Ketika Presiden Brasil Jair Bolsonaro mulai menjabat pada Januari 2019, tindakan penegakan lingkungan dinilai menurun drastis dan menyebabkan peningkatan dalam penggundulan hutan di Amazon. Hutan hujan Amazon — salah satu kawasan dengan keanekaragaman hayati paling banyak di dunia — menampung separuh dari semua spesies hewan, tumbuhan, dan serangga yang dikenal manusia. Sekitar

kedelai dan ternak. Keamanan modal dan finansial memungkinkan JBS untuk memelihara dan memperluas operasi. JBS mendapat keuntungan dari investor Amerika yang memiliki lebih dari \$1 Miliar sahamnya. Sejak pemilihan Bolsonaro, harga saham perusahaan naik sekitar tiga kali lipat. JBS dengan sendirinya semakin terkenal di seluruh dunia, terlepas baik dan buruknya

Bagaimana di Indonesia? Belum ada pemasok daging mentah yang



60 persen hutan hujan Amazon terletak di kawasan Brasil. Pada 2019 saja tercatat lebih dari 160 kasus invasi lahan, eksploitasi sumber daya alam secara ilegal, dan perusakan properti di 153 wilayah adat. Penggembalaan ternak memprovokasi 80 persen dari invasi ini.

Investor asing mengontrol banyak hal yang terjadi di Amazon Brasil. Bank-bank besar dan perusahaan investasi besar memainkan peran penting dalam menyediakan miliaran dolar dalam bentuk pinjaman, penjaminan emisi, dan investasi ekuitas kepada perusahaan

mendekati kebesaran JBS. Bahkan Indonesia banyak mengimpor pasokan pangan untuk keperluan dalam negeri.

Namun, Indonesia tercatat sebagai pemasok sawit olahan, terutama minyak mentah sawit atau crude palm oil. Secara agregat industri CPO Indonesia merupakan raksasa di bidangnya. Namun, dunia juga akan mengamatinya. Entah pula tambang nikel yang makin menjadi kebutuhan dunia.

Banyak pelajaran di sini. Bukan sekadar daging mentah belaka tentunya. Silakan mencermati. ●

Bahkan di masa wabah Covid-19 yang mula terdeteksi pada akhir 2019 sekalipun, JBS tetap berjaya, dan malah memasuki wilayah sumber virus corona: Tiongkok. Pada 27 Januari 20, JBS menyetujui pengiriman pasokan untuk WH Group, pengolah daging yang berbasis di Hong Kong dengan akses ke gerai ritel menyediakan produk daging sapi, babi, dan unggas senilai sekitar \$ 687 juta dolar per tahun. Langkah tersebut menyusul kesepakatan pada bulan November antara JBS dan Alibaba yang berbasis di China senilai \$ 1,5 miliar.



Demo nelayan terhadap PT Boskalis Internasional Indonesia.

ADA SUNNY DI ANTARA TAKALAR DAN MAKASSAR

Bisnis reklamasi di berbagai lokasi bermasalah berkali-kali. Kali ini pembentukan daratan baru untuk proyek Makassar New Port, Sulawesi Selatan.

Pembuatan daratan baru memerlukan tanah urukan atau pasir. Nah, pemindahan pasir itu akan berdampak pada lingkungan asalnya. Begitulah maka Jaringan Advokasi Tambang, sebuah lembaga swadaya masyarakat bidang pertambangan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Laut Indonesia (KSLI) menyoroti proyek reklamasi untuk proyek pelabuhan baru di Makassar Sulawesi Selatan.

Sejak Juni 2020 lalu, PT Boskalis Internasional Indonesia menambang pasir laut di wilayah konsesi tambang milik PT Banteng Laut Indonesia. PT Boskalis Wessie sendiri bekerja sama dengan PT Pembangunan Perumahan selaku Kontraktor Pelaksana dari proyek Makassar New Port (MNP).

Sedangkan MNP merupakan proyek strategis nasional kelolaan badan usa-

ha milik negara BUMN PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) atau Pelindo IV. Pasir laut hasil penambangan pasir PT Boskalis Wessie inilah yang kemudian dimanfaatkan sebagai material timbunan untuk proyek reklamasi MNP.

Koordinator Jaringan Tambang Nasional atau Jatamnas, Merah Johansyah, misalnya, menyebut penambangan pasir laut oleh PT Boskalis Internasional Indonesia menghancurkan wilayah tangkap nelayan di perairan Takalar, sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan. Belum lagi tindakan aparat keamanan terhadap nelayan dan aktivis yang menolak tambang di perairan itu.

Namun, lebih dari sekadar menyoroti dampak lingkungan, Jatam juga menyoroti para figur di balik bisnis yang terlibat dalam rangkaian proyek itu. Setelah menelusuri sejumlah doku-



PT Boskalis Internasional Indonesia

men dari Ditjen AHU Kemenkumham RI dan akta perusahaan yang tercantum di dokumen AMDAL, dari total 12 izin usaha pertambangan yang beroperasi di perairan Takalar, dua antaranya adalah PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur. "Dua perusahaan ini tercatat dimiliki oleh orang-orang dekat Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah," kata Merah Johansyah, Rabu, 16 September 2020.

PT Banteng Laut Indonesia yang merupakan pemilik konsesi yang pelaksanaan penambangannya Boskalis Internasional Indonesia, kata Merah, pemilik alias pemegang sahamnya, antara lain Akbar Nugraha sebagai Direktur Utama, Sunny Tanuwijaya sebagai Komisaris, Abil Iksan sebagai Direktur, dan Yoga Gumelar Wietdhianto. Selain Akbar Nugraha dan Abil Iksan, nama Fahmi Islami juga tercatat sebagai pemegang saham di PT Banteng Laut Indonesia.

Sementara di PT Nugraha Indonesia Timur, Abil Iksan juga tercatat sebagai Direktur, Akbar Nugraha sebagai Wakil Direktur, dan Kendrik Wisan sebagai Komisaris. Nama-nama seperti Akbar Nugraha, Abil Iksan, dan Fahmi Islami, menurut penelusuran Jatam, diketahui pernah menjadi bagian dari Tim Lebah

Pemenangan Pasangan Nurdin Abdullah – Andi Sudirman Sulaiman. Pasangan Nurdin – Andi Sudirman diusung PDI Perjuangan, PKS, dan PAN pada Pilgub Sulsel 2018 lalu.

Selain sebagai pemilik/pemegang saham di perusahaan tambang, Akbar Nugraha — yang diketahui teman seangkatan dengan anak Nurdin Abdullah, Fathul Fauzi Nurdin di Binus University — juga ditunjuk sebagai Ketua Badan Promosi Pariwisata Daerah (BPPD) oleh Nurdin Abdullah sejak 2018 sampai sekarang, tak lama usai terpilih menjadi Gubernur Sulsel. Sementara Fahmi Islami, tercatat sebagai Staf Khusus Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah. Selain itu, Fahmi Islami juga juga menjadi bagian dari Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TP2D) Provinsi Sulawesi Selatan.

Sejumlah nama lain juga berada di balik kedua perusahaan tambang di atas. Seperti Sunny Tanuwidjaja dan Kendrik Wisan. Sunny Tanuwidjaja tercatat sebagai Komisaris Utama di PT Banteng Lautan Indonesia. Sunny Tanuwidjaja, yang adalah mantan staf khusus Pemprov DKI Jakarta masa kepemimpinan Basuki Tjahaya Purnama alias Ahok, tercatat sebagai Sekretaris Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia.

Sunny Tanuwidjaja juga pernah dikaitkan dengan kasus suap anggota DPRD Pemprov DKI Jakarta Muh Sanusi, dalam kaitan dengan reklamasi Pulau G di Pantai Utara Jakarta. Sementara Kendrik Wisan merupakan pemegang saham terbesar (50 persn) di PT Nugraha Indonesia Timur. Kendrik Wisan diketahui sebagai pengusaha di PT Comextra Majora, bergerak di bidang eksportir kakao dan kacang mede.

Ijon Politik

Dari figur-figur yang terlibat itu, Merah Johansyah dan kawan-kawan mengaitkan enambungan pasir berikut penangkapan semena-mena yang dibarengi praktik kekerasan dan intimidasi terhadap sejumlah nelayan dan dua di antaranya telah ditetapkan sebagai tersangka, diduga kuat merupakan implikasi transaksi ijon politik antara Nurdin Abdullah dan para pemilik alias pemegang saham kedua perusahaan tadi ketika momentum Pilgub Sulsel 2018 lalu.

Dalam berbagai kesempatan Jatam memang kerap menggunakan istilah ijon politik. Makna ijon politik menurut Jatam adalah kesepakatan antara pengusaha atau korporasi sebagai penyandang dana politik dengan para

politisi yang akan membayarnya dengan jaminan politik berupa pemberian ataupun pengamanan konsesi perizinan.

Indikasi ijon politik itu diperkuat lagi dengan relasi antara anak Gubernur Nurdin Abdullah, Fathul Fauzi Nurdin, yang tak sekadar dekat dengan sejumlah pemilik/pemegang saham tambang di dua perusahaan di atas, tetapi juga menjadi “penghubung” antara

Setelah gagal menjadi anggota legislatif, Fathul Fauzi Nurdin diangkat menjadi Ketua Banteng Muda Indonesia (BMI), salah satu organisasi sayap Partai PDI Perjuangan pada 12 Maret 2020 lalu. Selain itu, Fathul Fauzi Nurdin juga diketahui menjabat sebagai Bendahara Umum KNPI Sulawesi Selatan, Periode 2019 – 2022.

Dengan demikian, kata Merah, keberadaan perusahaan-perusahaan

pebisnis tambang yang nota bene sebagian pemilik atau pemegang saham perusahaan-perusahaan itu dikenal dekat dengan Sang Gubernur.

Alhasil, Jatam bersama KSLI menuntut pembekuan segera 12 izin usaha pertambangan di perairan Takalar. Alasannya, untuk mencegah perusakan lebih luas terhadap wilayah tangkap nelayan, termasuk memastikan keselamatan ribuan nelayan.



Gubernur Sulawesi Selatan, Nurdin Abdullah

Bapaknya selaku Gubernur dan Akbar Nugraha — yang notabene teman seangkatannya di Binus University — sebagai pengusaha tambang.

Dugaan ini semakin diperkuat dengan fakta bahwa putra bungsu Nurdin Abdullah, Fathul Fauzi Nurdin tersebut tercatat sebagai Caleg DPRD Provinsi Sulawesi Selatan dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) pada 2019 lalu, melalui Dapil 4 Sulsel yang meliputi Bantaeng, Jeneponto, dan Kepulauan Selayar. Anak bungsu Gubernur Nurdin Abdullah ini juga tercatat sebagai Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) PSI pada Pemilu 2019.

tambang di perairan Takalar, berikut aktivitas penambangan pasir yang terus terjadi di tengah perlawanan ribuan nelayan yang menguat dan masif, diduga kuat terdapat kepentingan besar Gubernur Nurdin Abdullah dan para pemilik/pemegang saham PT Banteng Laut Indonesia dan PT Nugraha Indonesia Timur. Kekuasaan dan pengaruh yang dimiliki Gubernur Sulsel, Nurdin Abdullah tersebut, tidak sedang dipergunakan untuk menjamin keselamatan ribuan nelayan di wilayah operasi perusahaan tambang, namun diduga justru hanya untuk memastikan kenyamanan dan perluasan usaha dari

Koalisi juga meminta campur tangan sejumlah instansi terkait seperti Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan. “Pengehtian aktivitas tambang, berikut membekukan dan mencabut seluruh izin tambang tersebut, selaras dengan amanat UU No 27 Tahun 2007, jo UU No 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, dimana pemanfaatan wilayah-wilayah itu tidak untuk pertambangan,” kata Merah Johansyah.

la juga meminta Komisi Pengawas

Persaingan Usaha (KPPU) menginvestigasi dugaan praktik monopoli usaha, lantaran Abil Iksan menjabat direktur di dua perusahaan berbeda untuk entitas bisnis yang sama, dan dalam waktu yang sama pula. "Hal ini, diduga melanggar Pasal 26 UU No 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat," kata Merah yang juga meminta Komisi Komisi Pemberantasan Korupsi (melakukan audit investigasi dan penegakan hukum atas dugaan korupsi yang melibatkan Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah dan para pemilik/pemegang saham PT Banteng Laut Indonesia, PT Nugraha Indonesia Timur, dan PT Boskalis Internasional Indonesia.

Tanggapan Nurdin Abdullah

Mengenai keterlibatan kolega Nurdin Abdullah dalam perusahaan pemegang koseksi tambang pasir laut di Sulsel, Juru Bicara Nurdin Abdullah yakni Bunyamin Arsyad menjelaskan bahwa pemberian izin tersebut dilakukan secara objektif. Menurut dia, kedua perusahaan tersebut sama sekali tidak memiliki cacat secara hukum untuk mengelola tambang pasir laut.

"Pemberian izin itu teknis dari dinas, bukan oleh Gubernur. Kalau pun memang ada kolega selama dalam kapasitas memenuhi persyaratan, tidak ada permasalahan," ujar Bunyamin, Rabu, 17 September 2020.

Dia juga menantang KSLI untuk membuktikan pelanggaran pemberian izin dan kerusakan yang terjadi di wilayah tambang pasir laut, khususnya di wilayah Spermonde, Takalar. "Apakah yang dilanggar teman-teman (penambang pasir laut) ini? Kalau melanggar, apa yang melanggar? Coba buktikan apa yang dilanggar dari penambangan pasir laut itu," kata dia.

Selain Jatam, yang tergabung dalam KSLI adalah beberapa LSM lingkungan. Beberapa antaranya adalah Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) dan Koalisi Rakyat untuk Perikanan (Kiara).

Bunyamin malah mempertanyakan, mengapa baru sekarang koalisi mempersoalkan izin penambangan

pasir laut di perairan Sulsel. Padahal, kata dia, pemberian izin itu telah lama diberikan. Dia curiga penggiringan isu dari kerusakan lingkungan ke aspek perizinan. "Intinya adalah adakah yang dilanggar perusahaan ini?" tandas Bunyamin.

Putra Nurdin Abdullah, Fathul Fauzi Nurdin, juga membantah tudingan menjadi penghubung bagi perusahaan penambang pasir laut di balik proyek strategis nasional Makassar New Port itu. Bahkan ia menantang pihak yang menuduhnya agar memperlihatkan bukti.

New Port adalah tidak berdasar dan tidak sesuai fakta. Bahkan tuduhan ini cenderung menjadi fitnah terhadap nama baik gubernur Sulsel dan keluarga. Tidak ada seorang pun keluarga gubernur yang terlibat dalam proyek itu.

2. Perlu kami tegaskan bahwa tidak ada kerabat apalagi keluarga dekat Gubernur Sulsel, Prof Dr HM Nurdin Abdullah yang terlibat dalam proyek reklamasi Makassar New Port. Bahkan proyek pengerjaan MNP itu sudah berjalan sebelum Prof Dr HM Nurdin Abdullah men-



Fathul Fauzi Nurdin

"Hahaa itu tidak benar. Tudingan itu harusnya ada bukti kalau memang saya terlibat," kata Fathul Fauzi melalui pesan Whatsapp yang beredar.

Namun ia mengakui bahwa Akbar Nugraha dan Abil Iksan merupakan teman-teman dekatnya. Toh soal Akbar Nugraha dan Abil Iksan tercatat sebagai pemegang saham di PT Banteng Laut Indonesia, Fathul mengaku tak tahu.

"Wah saya kurang tau kalau itu. Saya tidak mengurus hal-hal beginian. Coba tanyakan ke orangnya," ujarnya.

Dalam penjelasan resminya, kerabat Gubernur Sulawesi Selatan menyampaikan klarifikasi sebagai berikut:

1. Tuduhan adanya keluarga dan kerabat Gubernur Prof Dr HM Nurdin Abdullah terlibat dalam penambangan pasir reklamasi Makassar

jadi gubernur Sulsel.

Sedangkan manajemen PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero) menegaskan bahwa pihaknya sudah melakukan berbagai upaya agar semua keluhan masyarakat terkait penambangan pasir di wilayah itu terakomodasi dengan baik. Senior Manager Fasilitas Pelabuhan PT Pelindo IV, Arwin menuturkan, selama ini pihaknya sudah melakukan berbagai upaya untuk memitigasi dampak terhadap lingkungan sekitarnya, dalam pembangunan MNP.

Misalnya memasang tirai pembatas untuk mengurangi kekeruhan air laut. "Kami selalu berusaha memperkuat ekosistem laut dengan menggunakan material alam, di mana sistem konstruksi menjadi habitat baru bagi ikan-ikan yang ada," ungkapnya. ●



Antrean pelamar di Purwakarta abai protokol kesehatan

RESESI BERSAMA PANDEMI

Wabah Covid-19, selain berdampak buruk terhadap kesehatan manusia, juga membuat banyak negara di dunia, termasuk Indonesia, akan memasuki resesi terburuk dalam puluhan tahun terakhir. Apa sebenarnya arti resesi?

Saat situasi normal, ekonomi sebuah negara tumbuh. Kekayaan warganya akan sedikit naik seiring dengan kenaikan nilai barang dan jasa yang diproduksi negara tersebut, atau yang biasa dikenal dengan Produk Domestik Bruto (PDB). Terkadang, nilai barang dan jasa yang dihasilkan turun. Resesi biasanya dirumuskan sebagai penurunan PDB selama dua kuartal, atau dua kali tiga-bulanan, secara berturut-turut.

Mengapa resesi penting diperhatikan? Bagi sebagian besar orang, pertumbuhan ekonomi adalah hal yang baik. Ini biasanya berarti jumlah lapangan kerja yang tersedia lebih banyak. Pada umumnya perusahaan-perusahaan lebih untung dan bisa memberi bayaran lebih kepada para pegawai dan pemegang sahamnya.

Ekonomi yang berkembang juga berarti pemerintah mendapatkan

pendapatan pajak lebih besar. Jadi negara bisa memangkas pajak, atau memperbesar anggaran untuk tunjangan masyarakat, layanan publik, dan gaji pegawai negeri. Jika ekonomi menyusut, hal sebaliknya yang akan terjadi.

Sebagian besar negara maju telah mencatatkan pertumbuhan ekonomi negatif - PDB mereka jatuh - dalam periode Januari sampai Maret 2020, sehingga dampak ekonomi virus corona mulai terasa. Sedangkan data resmi pertumbuhan dari April sampai Juni 2020 di Indonesia menunjukkan penyusutan hingga lima persen lebih. Ini berarti penyusutan ekonomi memasuki kuartal kedua, mengonfirmasi keyakinan bahwa Indonesia juga mengalami resesi.

Dana Moneter Internasional (IMF) memprediksi kejatuhan PDB yang besar sepanjang tahun 2020 - ekonomi Amerika Serikat diperkirakan jatuh 5,9



masyarakat. Namun, implikasinya, ketimpangan ekonomi dapat meningkat dan dampaknya menjalar ke mana-mana.

Sekarang, kapan resesi berakhir? IMF memprediksi resesi akan berakhir tahun depan dan ekonomi dunia akan bangkit kembali. Namun kita sekarang berada dalam ketidakpastian, dan tidak ada yang tahu bagaimana ekonomi akan pulih dengan wabah Covid-19 yang masih erajalela.

Jika semua usaha yang tutup selama pandemi dan PSBB buka kembali dengan cepat, konsekuensi resesi akan tidak separah sebelumnya. Meski demikian, ada ketakutan soal penyebaran kembali virus corona, dan orang mungkin akan khawatir bepergian atau jalan-jalan meskipun orang lain menganggap situasi sudah aman.

Bisnis pariwisata seperti kapal pesiar, penerbangan, dan konferensi bisnis, khususnya, mungkin baru bangkit dalam beberapa tahun ke depan. Jadi konsekuensi resesi kali ini masih akan terasa sampai bertahun-tahun mendatang.

Bagaimana tips menghadapi resesi? Memang, cara pasti dalam menanggulangi Covid-19, seperti vaksin, akan membantu pemulihan yang kuat. Namun sampai vaksin ditemukan, ada beberapa cara yang bisa dipakai.

Pada resesi 2008, bank sentral memangkas tingkat suku bunga untuk mendukung ekonomi. Ini berarti nasabah dan usaha bisa meminjam dengan lebih mudah, dan memiliki uang untuk dibelanjakan. Namun suku bunga sekarang sudah rendah dan bahkan mendekati nol di banyak negara, sehingga tidak mungkin bagi mereka untuk memangkasnya lagi.

Pemerintah di banyak negara di dunia telah meminjam dalam jumlah besar untuk menopang ekonominya melalui pemangkasan pajak dan anggaran belanja negara yang lebih tinggi, seperti lewat skema tunjangan bagi pegawai yang dirumahkan, atau lewat bantuan langsung tunai. Namun utang itu ada harganya, dan dampaknya akan terasa dalam puluhan tahun ke depan.

Jarang terjadi, pandemi berbarengan dengan resesi. Dilematis memang.

● BBC dan sumber lainnya

persen sementara Inggris 6,5 persen. Bahkan IMF juga memperkirakan seluruh ekonomi dunia jatuh 3% tahun ini, menjadikan tahun ini resesi terburuk di dunia sejak Depresi Berat tahun 1930an.

Dampak resesi karena mencakup negara, tentu akan berdampak kepada masing-masing warganya. Namun, tingkatannya akan berbeda-beda. Yang pasti, banyak orang akan kehilangan pekerjaannya, atau sulit mencari peluang kerja baru dan maupun kenaikan jabatan.

Para sarjana dan lulusan sekolah yang mencari pekerjaan untuk pertama kalinya mungkin akan sulit mendapatkannya. Gaji para pegawai yang masih bekerja mungkin tidak akan naik—atau mereka harus bekerja lebih lama atau gajinya terpaksa dikurangi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia semester pertama (Januari-Juni) 2020 justru menunjukkan penurunan signifikan. Data Badan Pusat Statistik menyebutkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia triwulan I (Januari-Maret) 2020 terhadap triwulan I-2019 tumbuh sebesar 2,97 persen. Sedangkan

jika dilihat per kuartal, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada triwulan I-2020 terhadap triwulan sebelumnya mengalami kontraksi sebesar 2,41 persen (q-to-q).

Pertumbuhan ekonomi pada triwulan II (April-Juni) 2020 semakin terpuruk dan mengancam Indonesia masuk ke jurang resesi, yakni jika pertumbuhan ekonomi mengalami kontraksi atau penyusutan dua triwulan berturut-turut dalam perbandingan tahunan. BPS mencatat, pertumbuhan ekonomi triwulan II 2020 menyusut hingga minus 5,32 persen dibandingkan dengan triwulan II 2019.

Sebagai tambahan, pada periode yang sama, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) mencatat 9,8 juta orang kehilangan pekerjaan per Juni 2020. “Dari 9,8 juta itu, kira-kira 30 persen di-PHK dan lebih dari separuh dirumahkan mengingat utilitas manufaktur rendah sekali,” ujar Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa, Senin, 22 Juni 2020.

Sekali lagi, dampak resesi tidak akan dirasakan setara oleh semua kalangan



PROSES DOKUMENTASI - Komunitas Uluh Tabela Paduli Basa Itah menyambangi rumah salah satu tokoh masyarakat untuk mengumpulkan kosa kata Bahasa Sampit.

MERAWAT KEMBALI BAHASA YANG NYARIS PUNAH

Penggunaan bahasa daerah Dayak Sampit di tengah era modernisasi mulai sulit terdengar. Terlebih di kalangan anak muda. Hanya sedikit yang masih menggunakan bahasa asli Sampit, Kalimantan Tengah ini dalam kehidupan sehari-hari. Sekalipun lahir dan besar di sana, sayangnya bahasa nenek moyang ini sudah mulai jarang digunakan.

Banyak faktor pengaruhnya. Selain memang lebih sering menggunakan bahasa Dayak Banjar, yang sangat familiar di tengah keluarga. Sekalipun, banyak orang tua masih banyak yang bercengkrama menggunakan bahasa Sampit, tapi para generasi muda, lebih

senang dapat berbicara bahasa Inggris atau Korea.

Namun, ada juga para remaja atau generasi milenial yang paham artinya. Tapi tak bisa mengucapkan kata-katanya. Sehingga kalangan muda tidak lagi berminat untuk menggunakan bahasa Sampit dalam keseharian.

Terlebih saat ini pendidikan di tingkat dasar juga sudah tidak sepenuhnya memasukan bahasa dan kebudayaan Sampit dalam pelajaran muatan lokal (mulok).

Sehingga bahasa Sampit tidak begitu dikenal anak-anak dari tingkat pendidikan. Sebab dalam kurikulum



FOTO: FOTOSTIMEWA

pendidikan di Sampit untuk bahasa daerah lebih menggunakan bahasa Dayak Kalimantan Tengah (Kalteng) yang dikenal Daya Ngaju. Serta kebudayaan Kalteng secara menyeluruh, yang dimuat dalam mata pelajaran mulok.

Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kotawaringin Timur (Kotim) Suparmadi. Saat ini, untuk mata pelajaran mulok di pendidikan sekolah dasar (SD), mengacu pada Peraturan Gubernur (Pergub) untuk menggunakan materi Dayak Ngaju dan kebudayaan Kalteng.

"Pada umumnya mata pelajaran mulok lebih pada materi dan bahasa Dayak Ngaju dan kebudayaan Kalteng. Sedangkan untuk basa Sampit dan kebudayaan Sampit, dapat diselipkan di dalam meterinya, untuk dikenalkan kepada anak didik," terang Suparmadi.

Sebab dalam penyusunan buku

pelajaran mulok beberapa waktu lalu, di dalamnya juga ada materi tentang bahasa dan kebudayaan Sampit. Bahkan untuk nar sumbernya juga melibatkan tokoh masyarakat, yang paham akan bahasa dan budaya Sampit.

Karena mengacu pada aturan, maka materi umumnya bukan kebudayaan dan bahasa Sampit. Tetapi para tenaga pengajar dapat menyampaikan dan mengenalkan kebudayaan dan bahasa Sampit di dalamnya.

Sehingga akan tetap ada unsur ke-daerahan Sampit di dalam mata pelajaran mulok, di pendidikan SD di Kotim.

"Saat ini komunitas bahasa Sampit di Kotim, sedang membuat buku tentang bahasa Sampit dan kebudayaannya. Ke depan jika itu sudah selesai maka dapat dikaji bersama dan materinya dimasukkan dalam mata pelajaran mulok," jelasnya.

Anggota Komisi III DPRD Kotim Hademan yang juga merupakan pemerhati bahasa Sampit menyampaikan, saat ini sangat sulit ditemukan kamus bahasa daerah. Sehingga generasi saat ini sulit untuk memahami terkait bahasa Sampit.

Hademan mendorong agar pemerintah dapat membukukan bahasa Sampit, agar bahasa itu tidak punah dan bisa dimanfaatkan para pelajar dan mahasiswa di masa yang akan datang.

"Kosa kata bahasa Sampit, dapat dibukukan. Sehingga dapat lebih mudah dipahami dan memiliki hak paten dalam penggunaan bahasa. Hal itu juga menghindari kepunahan bahasa Sampit, yang semakin waktu digerus oleh zaman," terang polikus PKB ini.

Hademan mengakui pola pelestarian akan kebudayaan daerah memang harus digencarkan. Untuk mempertahankannya tidak hanya menjadi tugas dari salah satu pihak, namun adanya kebersamaan dan kesapahaman yang sama untuk mempertahankannya.

Begitu juga setiap satuan pendidikan hendaknya bisa melakukan pelestarian sesuai dengan kewenangan pihak sekolah.

"Ya paling besar peranannya selain pemerintah adalah pihak sekolah yang bertanggungjawab akan kelestarian

kearifan lokal itu. Karena di situ tempat menanamkan kesadaran untuk peserta didik bersama-sama mempelajarinya," ujarnya.

Untuk menemukan kamus ataupun buku-buku mengenai kebudayaan lokal itu sangat sulit. Para akademisi dan pemerintah harus memproduksi buku-buku lokal.

"Coba saja datang ke toko buku ataupun perpustakaan, literatur untuk kebudayaan daerah ini masih minim. Ini artinya ada sistem pelestarian yang tidak berjalan sebagaimana seharusnya," tandas Hademan.

Menurut Kepala Bidang Pengembangan dan Penelitian Lembaga Adat Budaya Sampit, Asikin Arpan menjelaskan, saat ini mereka sudah merumuskan kamus kurik (kamus kecil), yang disusun pihaknya bersama dengan salah satu universitas di Sampit. Hal tersebut merupakan salah satu upaya pihaknya selama ini.

"Selain itu sebelumnya saya juga pernah menjadi salah satu narasumber untuk membuat buku mata pelajaran muatan lokal di Kotim, yang disusun Dinas Pendidikan Kotim bersama Universitas Palangka Raya," terang Askin, yang merupakan salah satu tokoh masyarakat Sampit.

Dalam penyusunan kamus kurik pihaknya sudah berkoordinasi dengan Balai Bahasa Kalteng, dan saat ini sedang dalam proses penyusunan kamus besar. Nantinya, setiap kosa kata bahasa Sampit dan artinya, ada di kamus tersebut.

Sehingga bisa dapat menjadi bahan pembelajaran di sekolah dasar, terkait bahasa dan budaya Sampit.

"Selain bahasa, terkait budaya saat ini ada dua kebudayaan Sampit yang sudah dijadikan agenda wisata tahunan di Kotim, di antaranya Manduy Safar yang dilakukan setiap minggu ketiga di bulan safar, dan Manuyang Anak, tradisi yang dilakukan menyambut kelahiran anak yang berusia 40 hari," jelasnya.

Namun, bahasa Sampit belum benar-benar punah. Nyaris iya. Sebab, ada beberapa wilayah yang masyarakatnya masih menggunakan bahasa daerah tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Wilayah yang masih fasih berbahasa Sampit, antara lain Kecamatan Baamang, Seranau, Kotabesi, Cempaga, Cempaga Hulu, Mentawa Baru Ketapang, Mentaya Hilir Utara, dan Mentaya Hilir Selatan.

Namun, dari kecamatan tersebut hanya beberapa desanya saja yang menggunakan bahasa Sampit dalam kesehariannya. Bahkan itu juga hanya di kalangan orang tua.

Bupati Kotim Supian Hadi menyatakan jika pembuatan buku mata pelajaran muatan lokal dengan bahasa dan kebudayaan Sampit sudah pernah dibuat. Terlebih saat ini juga sudah digunakan di tingkat pendidikan dasar.

"Kalau untuk kamusnya memang be-

sehingga harus dilestarikan dan dijaga keberadaannya, bukan membiarkan untuk punah digerus zaman," ujarnya.

Dinas Pendidikan terang dia juga dapat dilibatkan dalam penyusunan kamus bahasa Sampit ini. Agar dapat dilakukan penyesuaian dalam materi pembelajaran dasar di sekolah. Sehingga bahasa Sampit lebih dikenal pelajar dan kalangan anak muda.

Urgensi Dokumentasi

Setelah dilakukannya webinar beberapa waktu lalu dengan tema 'Urgensi Kamus untuk Menjaga Eksistensi Bahasa Sampit' yang dilakukan komunitas Uluh Tabela Paduli Basa Itah, saat ini masih melanjutkan tahapan-tahapan agar terciptanya kamus bahasa

Sampit itu sendiri," ungkap Sandy.

Lanjutnya, kosa kata bahasa Sampit yang sudah dikategorikan akan dilakukan validasi oleh para tokoh Bahasa Sampit. Agar kosa kata tersusun sesuai dengan kriteria kamus yang baik dan benar.

"Kemudian kosa kata yang sudah divalidasi akan disusun sesuai dengan draf kamus sesuai abjad. Draft kamus juga akan divalidasi lagi oleh Balai Bahasa Kalimantan Tengah untuk keabsahan," ujarnya.

Setelah itu, tahapan selanjutnya adalah melakukan demisinasi. Untuk menyosialisasikan draft kamus bahasa Sampit yang sudah disusun.

"Sehingga nantinya kamus ini dapat dijadikan rujukan untuk belajar bahasa Sampit dan bisa dipertanggungjawabkan," jelasnya.

Terpisah Dosen Bahasa STKIP Muhammadiyah Sampit, Ajah Saputra mengatakan, dirinya sangat mengapresiasi niatan generasi milenial untuk melestarikan bahasa daerah dengan membuat kamus.

"Bahasa adalah media komunikasi sehari-hari. Bahasa Sampit tidak sekadar alat komunikasi, tapi juga identitas. Sehingga perlu dipelajari khususnya oleh orang Sampit sendiri," ujar dia.

Terlebih saat ini, kesadaran menjadikan bahasa Sampit agar dapat digunakan di dalam percakapan anak muda, mulai digaungkan oleh pemerintah dan generasi milenial.

Dia menilai hal ini merupakan kemajuan zaman, dalam pelestarian budaya yang dilakukan para anak muda. "Lestarkanlah agar bahasa Sampit lebih dikenal. Terlebih lagi jika ada kamusnya nanti. Itu akan mempermudah memperkenalkan bahasa Sampit dan mempelajarinya bagi yang belum bisa," sebutnya.

Selanjutnya pemuda asli Sampit Fauzi juga mengatakan, dirinya sangat tertarik mempelajari bahasa Sampit. Bahkan ia mengaku turut terlibat dalam perencanaan pembuatan kamus bahasa Sampit itu.

"Saya bersama teman-teman Sandy Ramadhan, Fauzi, Nur Aida, Dwi Maulina Permata Sari dan Gita Anggraini tengah mempelajari bahasa Sampit lebih dalam lagi. Hal ini pun menarik perhatian dari generasi milenial Kotim



KESADARAN-Dua orang remaja membaca buku Uluh Tabela Manokep Basa Sampit (Kompilasi Data Seputar Bahasa Sampit dan Kandungan Nilai Karakternya) yang dibuat Komunitas Uluh Tabela Paduli Basa Itah.

lum ada, dan hal itu perlu riset dan perlu tim untuk menggali bahasa Sampit secara menyeluruh," terangnya.

Saat ini ada lembaga yang sedang melakukan hal tersebut. Pemkab Kotim mengharapkan agar lembaga tersebut berkoordinasi dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) dan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Daerah Kotim.

Sehingga hasil riset apa yang dihasilkan dan dirumuskan dapat dimanfaatkan dan diketahui oleh masyarakat, terutama kalangan anak muda.

"Sebab bahasa dan kebudayaan itu adalah kekayaan dan identitas daerah.

tersebut.

Ketua Tim Pelaksana webinar sekaligus anggota Komunitas Uluh Tabela Paduli Basa Itah Sandy Ramadhan mengatakan, rencana tindak lanjut dari kegiatan webinar adalah pelaksanaan bimbingan teknis tentang pembuatan kamus bahasa Sampit menggandeng Balai Bahasa Kalimantan tengah.

"Untuk saat ini tim dari komunitas Uluh Tabela Paduli Basa Itah bersama Lembaga Adat dan Budaya Sampit sedang mengumpulkan kosa kata bahasa Sampit yang akan dimuat dalam bentuk pangkalan data. Agar lebih mudah untuk mengkategorikan kosa kata bahasa

sendiri," ujarnya.

Bahkan Fauzi mengaku dirinya tertarik menggunakan bahasa Sampit di kegiatan sehari-hari. Karena sebagai pemuda asli Sampit sudah seharusnya bisa menggunakan bahasa nenek moyang tersebut.

"Dalam diri saya, ada keinginan untuk bisa menggunakan bahasa Sampit dengan benar. Sementara ini saya belum terlalu fasih mengucapkannya," ungkap Fauzi.

Meski demikian, ia mengaku akan terus belajar menggunakan Bahasa Sampit begitu pula dengan teman-teman yang ada di lingkungannya.

Pembuatan Kamus Bahasa Sampit inipun turut menjadi perhatian Balai Bahasa Kalteng. Analisis Kata dan Istilah Balai Bahasa Provinsi Kalteng Anthony Suryanyahu mengatakan, dirinya menyambut baik niatan Komunitas Uluh Tabela Paduli Basa Itah untuk membuat kamus tersebut.

Menurutnya, inisiatif untuk inisiasi pelestarian budaya di daerah adalah langkah bagus. Terlebih, telah mendapat dukungan dari para stakeholder setempat termasuk lembaga adat.

"Mengajak Balai Bahasa Kalteng untuk kerja sama menurut saya itu sudah langkah maju. Di daerah lain belum bergerak. Di Kalteng yang sudah kerja sama hanya Kabupaten Katingan, itu pun dari pemerintahnya. Nah, di Sampit, yang mengajak kerja sama adalah para generasi muda," ujarnya.

Jika kerja sama ini terjalin, Balai Bahasa Kalteng akan memfasilitasi dari sumber daya manusia seperti tenaga teknis, serta penggarapan materi secara teknis penyusunan kamus itu.

"Kerja sama ini tergantung pola kebutuhan daerahnya. Misal ada penyuluhan nanti dari Balai Bahasa akan mengadakan tim penyuluhnya dari pakarnya yaitu bidang analisis kata dan istilah," sebut Anthony.

Pembuatan kamus bahasa daerah ini dijelaskannya merupakan pekerjaan dari pembidangan analisis kata dan istilah untuk bidang kamus. Saat ini baru tahap awal yaitu menyebarluaskan informasi pembuatan kamus bahasa Sampit itu sendiri.

Bahasa daerah ucap dia sudah mulai tergerus karena penggunaan ba-

hasa slank yang dianggap gaul, serta penetrasi budaya dari negara lain.

Dia menjelaskan, untuk di Kalteng saja misalnya, ada banyak bahasa daerah yang belum terdokumentasi. Setidaknya dari 30 bahasa lokal, setidaknya belum direkam dan diarsipkan.

Namun, untuk mengerjakan proyek kamus dan mengarsipkan kosa kata bahasa Sampit ini membutuhkan dana. Anthony menjelaskan, dibutuhkan inisiatif dari pemerintah daerah untuk mendukung.

Setidaknya DPRD dan Pemkab



NIAT MULIA - Cover buku Uluh Tabela Manokep Basa Sampit.

Menurutnya, saat ini masyarakat terbiasa dengan budaya lisan. Sehingga, untuk mendokumentasikan kamus bahasa Sampit, wajib dilakukan secara tertulis. Dengan kaidah-kaidah yang diatur dalam kajian ilmiah dan sains. Penyebabnya, jika hanya digunakan sebagai bahasa lisan, maka dipastikan akan lenyap jika tidak didokumentasikan dengan baik.

Kotim, harus memasukkan anggaran pengerjaan proyek kamus tersebut, agar bahasa Sampit dapat dilestarikan sebagai warisan kebudayaan.

"Ini perlu dilegalisasikan dalam bentuk formal agar bisa diajarkan di sekolah-sekolah. Tinggal bagaimana pemerintah setempat nantinya yang akan mengembangkan," tutupnya.

•dw/dt/ra



Penambangan batubara di Kalimantan.

BATU BARA BABAK BELUR, NASIB PROVINSI IKN BARU TEROMBANG-AMBIING

Harga Batu Bara Acuan (HBA) sedang tidak menentu.

Pada Agustus 2020, rata-rata harga emas hitam di pasar dunia, berada di bawah USD 50 per ton. Pandemi dan tekanan resesi ekonomi, ikut membuat bisnis pertambangan tersebut goyang.

Dampaknya terlihat pada Kalimantan Timur yang neraca perdagangannya pada triwulan kedua 2020, -5,46 persen. Lalu bagaimana nasib provinsi yang menjadi calon Ibu Kota Negara tersebut?

Badan Pusat Statistik (BPS) Kaltim mencatat secara keseluruhan, ekonomi pada 5 provinsi yang berada di Pulau Kalimantan, minus 4,35 persen, jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Pun jika dibandingkan pada triwulan

pertama 2020. Hasilnya, laju ekonomi di Borneo minus 5,81 persen. Nah, di antara 5 provinsi tersebut, yang paling terpukul adalah Kaltim.

Kepala BPS Kaltim Anggoro Dwi-tjahyono menjelaskan, dari pertumbuhan ekonomi Kaltim yang minus 5,46 persen tadi, sektor pertambangan memberi andil negatif sebesar minus 3,32 persen.

Pertumbuhan ekonomi yang negatif kali ini lebih buruk dari 2016, ketika harga batu bara melorot tajam. Empat tahun silam, pertumbuhan ekonomi



Ibu Kota baru di Kalimantan.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Bumi Etam negatif empat kuartal berturut-turut. Namun, besarnya tidak sampai 1 persen setiap triwulan.

Hubungan antara kelesuan di sektor pertambangan terhadap pertumbuhan ekonomi Kaltim ini dijelaskan BPS.

Pertama, harga komoditas pertambangan nonmigas, yakni HBA pada triwulan II 2020 terus menurun baik secara triwulanan maupun tahunan. Harga yang melorot, menyebabkan nilai ekspor nonmigas periode Januari-Juni 2020 turun 16,11 persen dibandingkan periode yang sama pada 2019. Khusus nilai ekspor hasil tambang, masih menurut BPS, turun 20,48 persen.

"Beberapa perusahaan pertambangan menghentikan kegiatan operasional akibat pandemi Covid-19. Di samping itu, permintaan dari negara tujuan ekspor mengalami perlambatan seperti karena *lockdown* di India dan kebijakan Tiongkok melindungi dan mendukung pertambangan domestik," Jelas Anggoro.

Padaahal, Kaltim adalah rumah dari

empat perusahaan pengekspor batu bara terbesar di Indonesia.

Perusahaan tersebut adalah PT Kaltim Prima Coal, PT Kideco Jaya Agung, PT Berau Coal, dan PT Indomenco Mandiri. Adapun pangsa ekspor batu bara Kaltim ke Tiongkok sebesar 33 persen dan ke India 26,79 sebagaimana Laporan Perekonomian Kaltim 2019 dari Bank Indonesia.

PT Berau Coal bahkan sudah menyiapkan strategi khusus untuk menanggulangi persoalan ini. Dalam surat yang ditandatangani oleh Deputy Director Operation Support and Relations PT Berau Coal, Gatot Budi Kuncahyo, tertulis langkah antisipasi pihak perusahaan dalam menghadapi kelesuan sektor pertambangan di Kaltim. Antisipasi ini sebagai langkah dari menurunnya permintaan batu bara dari dua negara tujuan ekspor.

Ada empat hal yang disampaikan dalam surat tertanggal 23 Juli 2020 lalu. Poin pertama yang disampaikan yakni, perusahaan dan mitra kerja kemungkinan akan mengefisiensi-

"Beberapa perusahaan pertambangan menghentikan kegiatan operasional akibat pandemi Covid-19. Di samping itu, permintaan dari negara tujuan ekspor mengalami perlambatan seperti karena *lockdown* di India dan kebijakan Tiongkok melindungi dan mendukung pertambangan domestik," Jelas Anggoro.

kan biaya operasi agar bisa bertahan dalam kondisi sekarang ini.

Kedua, perusahaan dan mitra kerja bisa mengoptimalkan operasi tambang yang memungkinkan secara biaya.

Ketiga, kemungkinan menghentikan sementara dan menurunkan volume produksi di beberapa pit tambang. Penurunan produksi ini diperkirakan menyebabkan kelebihan alat dan tenaga kerja. Salah satu langkah untuk menghadapi situasi itu, perusahaan atau kontraktor mitra bakal mengambil langkah merumahkan sebagian karyawan.

Langkah antisipasi terakhir ialah perusahaan akan menunda dan men-

kontraktor tambang yang menghentikan operasi, antara lain PT Adaro dan PT Sapta Indra Sejati (SIS). Sisanya, seperti PT Bukit Makmur Mandiri Utama (BUMA) yang juga bekerja di tambang milik PT BC, merumahkan karyawannya sebanyak 50 persen.

Imbas dari penurunan produksi juga membuat karyawan PT BC golongan I dan II pun ikut dirumahkan. Sementara yang berada di golongan IV, gajinya dipotong 20 persen. "Sisa produksi tersebut untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri saja. Terutama untuk pembangkit listrik di Jawa," ujar narasumber tersebut.

Langkah serupa, juga akan dilakukan oleh para pengusaha tambang batu bara lainnya. Asosiasi Pertambangan Batubara Indonesia (APBI) meny-



Seperti diketahui, lokasi ibu kota baru yang telah ditetapkan Presiden Joko Widodo terletak sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara ini telah melakukan kajian matang.

injau ulang program Corporate Social Responsibility (CSR) atau Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM).

"Jika dilihat dari beberapa poin tersebut, bisa dipastikan langkah terberat yakni mengurangi volume (produksi). Dengan berkurangnya volume, tentu menjadi sistem domino, di mana pengurangan produksi, akan berpengaruh kepada pengurangan karyawan," jelas Gatot.

Dari informasi yang didapat, PT BC, bahkan telah memangkas 50 persen produksinya sejak akhir Agustus 2020. Beberapa kontraktor yang bekerja pada lokasi tambang milik Berau Coal pun sudah angkat kaki.

Seorang narasumber menerangkan,

“

perusahaan dan mitra kerja bisa mengoptimalkan operasi tambang yang memungkinkan secara biaya.

butkan, sejumlah anggota asosiasi berencana memangkas produksi pada 2020.

Pemangkasan volume produksi ini diperkirakan antara 15 persen hingga 20 persen. Apabila persentase tersebut diterapkan di Kaltim yang mengeksport 200 juta ton pada 2019, jumlah produksi yang dipangkas mencapai 30 juta sampai 40 juta ton.

"Pemotongan produksi diharapkan mendongkrak harga batu bara global dengan tercapainya keseimbangan penawaran dan permintaan," terang Ketua Umum APBI-ICMA Pandu Sjahrir.

Penurunan produksi batu bara, tidak hanya berdampak secara ekonomi. Sekaligus sumber energi batu Bumi Etam.

Kabupaten Berau misalnya, selama ini sumber listrik bergantung dari Pem-

bangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang sumber batu baranya berasal dari tambang milik BC.

Terlebih, pasokan batu bara sebagai bahan bakar utama diberikan secara cuma-cuma alias gratis. Jika BC berhenti beroperasi maka pada malam hari, seluruh wilayah di kabupaten tersebut akan gelap gulita.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Bupati Berau Agus Tantomo menuturkan, kondisi yang dihadapi saat ini begitu sulit. Perusahaan pertambangan menurunkan produksi karena harga komoditas rendah sehingga tidak sesuai dengan biaya produksi.

Dalam jangka pendek, pemerintah hanya bisa bernegosiasi dengan perusahaan agar kebijakan yang diambil tidak terlalu parah. Kebijakan tersebut juga harus melihat kemampuan perusahaan.

"Kami memahami bahwa perusahaan tidak mau melakukan hal yang merugikan. Ini memang situasi sulit. Kalau saya lihat, sejak awal, ketergantungan Berau terhadap sektor batu bara ini terlalu tinggi. Sekitar 60 persen pendapatan daerah kita dari royalti batu bara, yang digunakan untuk pembiayaan pembangunan dan gaji pegawai negeri sipil," jelasnya.

Menghadapi situasi yang sulit ini, Pemprov Kaltim selaku otoritas yang pemilik wilayah calon Ibu Kota Negara baru tampak tenang-tenang saja. Gubernur Kaltim Isran Noor melihat permasalahan ini tidak hanya menjadi tantangan, tapi juga peluang baru dalam membangkitkan pertumbuhan perekonomian.

"Pandemi Covid-19 telah melahirkan perubahan yang sangat besar, bukan hanya di bidang kesehatan, tetapi juga bidang perekonomian," kata Gubernur Isran Noor usai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Peningkatan Efektivitas Pencegahan dan Pengendalian Covid-19 dan Tahapan Pilkada melalui Video Conference yang digelar di Ruang Heart of Borneo Kantor Gubernur Kaltim, pada Kamis 27 Agustus 2020.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Suharso Monoarfa mengatakan pihaknya masih melanjutkan finalisasi master plan pembangunan

ibu kota baru tersebut.

"Ibu kota negara masih proyek yang sifatnya standby. Tahun ini kami selesaikan master plan dan detailed plan-nya," ujar Suharso dalam video conference, Jumat (14/8/2020).

Pemerintah juga tetap akan melakukan pembangunan infrastruktur dasar. Terutama yang berada di kota-kota penyangga calon IKN.

"Beberapa kegiatan yang sifatnya infrastruktur dasar akan disiapkan khususnya yang terkait dengan kota-kota seperti Samarinda dan Balikpapan," imbuh Suharso.

Seperti diketahui, lokasi ibu kota baru yang telah ditetapkan Presiden

Kepala BPS Kaltim Anggoro Dwitjahyono menjelaskan, dari pertumbuhan ekonomi Kaltim yang minus 5,46 persen tadi, sektor pertambangan memberi andil negatif sebesar minus 3,32 persen.



Joko Widodo terletak sebagian wilayah Kabupaten Kutai Kertanegara dan Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Pemindahan ibu kota negara ini telah melakukan kajian matang.

Diperkirakan total dana yang dibutuhkan untuk memindahkan ibu kota sekitar Rp 486 triliun. Mayoritas dana akan dipenuhi menggunakan skema kerja sama pemerintah dan badan usaha (KPBU) yakni 54 persen atau mencapai Rp 265,2 triliun.

Kemudian dana khusus dari swasta sebesar 26,2 persen dari total kebutuhan dana atau sebesar Rp 127,3 triliun. Pemerintah hanya akan mengalokasikan dana sebesar Rp 93,5 triliun atau 19,2 persen dari jumlah dana yang dibutuhkan. •ra



VISI HERMAN DERU MEMBANGUN SUMSEL SEMAKIN MAJU

► Pandemi Bukan Halangan,
Konektivitas Jadi Senjata Utama

Gubernur Sumatera Selatan H. Herman Deru tak kenal lelah, demi mewujudkan visinya "Sumsel Maju untuk Semua". Meski di tengah pandemi, dia bahkan berkeliling Bumi Sriwijaya demi memastikan pembangunan infrastruktur yang merata. Tentu saja roadshow tersebut dilakukan dengan tetap memerhatikan protokol kesehatan yang ketat.



Sepanjang Agustus hingga September 2020, Herman Deru menginjakkan seluruh kakinya hampir di seluruh kabupaten/kota yang berada di Sumsel. Agendanya, untuk meresmikan program kegiatan pembangunan infrastruktur.

Perjalanan dimulai HD dari Kabupaten Muara Enim pada 20 Agustus 2020. Di sana dia meresmikan pembangunan infrastruktur jalan dan jembatan di Desa Teluk Lubuk Simpang Belimbing. Lalu secara simbolik memberikan dana pembangunan sebesar Rp 100 miliar.

Keesokan harinya, perjalanan kembali dilakukan ke Kabupaten Lahat. Didampingi sang putri, yang juga Anggota DPR RI Percha Leanpuri, dan Bupati Lahat Cik Ujang, Wakil Bupati Lahat Haryanto, HD meninjau langsung kondisi Jembatan Air Lematang pada Jumat (21/8/2020).

Dia ingin memastikan pembangunan infrastruktur di Kabupaten Lahat dapat

segera direalisasikan. Sehingga, dapat memberikan manfaat kepada seluruh masyarakat di kabupaten tersebut. Di sana HD juga menyerahkan bantuan dana dari APBD Provinsi Sumsel sebesar Rp 122 miliar untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur.

Destinasi selanjutnya yang didatangi oleh rombongan gubernur adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) Selatan. Bersama Wakil Gubernur Mawardi Yahya dia juga menyerahkan dana bantuan pembangunan infrastruktur sebesar Rp 100 miliar kepada masyarakat yang diterima secara simbolik oleh Bupati OKU Selatan Popo Ali.

"Hampir setiap kabupaten/kota saya berikan bantuan ratusan miliar agar ada kestabilan," kata gubernur saat pelaksanaan acara pembangunan infrastruktur di Desa Lubar, Kecamatan Simpang, Kabupaten OKU Selatan, Sabtu (22/8/2020).

Setelah perjalanan yang cukup pan-

jang mendatangi 5 kabupaten, gubernur kembali ke Palembang untuk mengurus provinsi yang dicintainya tersebut. Berbagai agenda dan rapat dengan sejumlah stakeholder dilakukan. Termasuk dengan Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) Sumsel.

Berbekal aspirasi dari masyarakat selama perjalanan, dia menegaskan agar seluruh wilayah di Sumsel, termasuk di pedesaan agar segera mendapat jaringan internet.

HD menyebutkan saat ini dari 3.500 desa di Sumsel. Namun, baru beberapa desa yang teraliri internet. Makanya hal ini perlu dideklarasikan lagi sehingga internet wajib direalisasikan.

Meski terus disibukkan menangani kebutuhan masyarakat Bumi Sriwijaya di tengah pandemi Covid-19 ini, di akhir pekan, HD masih menyempatkan diri bekerja. Pada 30 Agustus 2020 dia bahkan menempuh perjalanan puluhan kilometer menggunakan sepeda



HUBUNGKAN DUA PROVINSI - Gubernur Sumsel Herman Deru dan Gubernur Kepulauan Babel Erzaldi Rosman membahas tapak jembatan Bahtera Sriwijaya di Kantor Gubernur Babel, Kota Pangkal Pinang, Kamis (17/9/2020).

motor menuju Kabupaten Musi Rawas.

Tujuan dia berkendara menggunakan sepeda motor, sekaligus mengecek pembangunan ruas jalan mulai dari Sp. Semabang kemudian Sp. 9 Bangun Jaya-Simpang Stasiun Jane hingga sampai perbatasan Kabupaten Penulak Abab Lematang Ilir (PALI).

Karena semuanya demi masyarakat Sumsel, terik matahari dan jalan yang berdebu pun dilibasnya. "Hari minggu orang biasa digunakan untuk holiday atau aktivitas-aktivitas non-pekerjaan tapi kita masih mengurus pekerjaan," kata HD saat Peresmian Jalan CSR dan Peletakan Batu Pertama Pembangunan Tugu CSR Kelurahan Sp.9 Bangun Jaya- Simpang Stasiun Jane Kecamatan BTS Ulu Cecar Kabupaten Musi Rawas, Minggu (30/8/2020).

Saat hari kerja, HD kembali ke Palembang. Sebab, ada banyak hal yang diurusnya. Termasuk melakukan pertemuan dengan PSSI untuk memantau kesiapan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang menjadi tuan rumah Piala Dunia U-21 yang akan digelar tahun depan.

Tidak hanya fokus mempersiapkan pada sektor internal, kesiapan sarana

pendukung juga menjadi perhatian Pemprov Sumsel demi kesuksesan menjadi tuan rumah pesta sepak bola di dunia ini untuk kelompok umur 21 tahun.

"Kita sudah siap. Anggaran sudah siap, hospitality, stadion dan lainnya semua sudah siap," kata HD saat meninjau Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang, Rabu (9/9/2020).

Usai memastikan persiapan Piala Dunia U-21 berjalan sesuai dengan perencanaan yang dibuat, dia bersama Wagub Mawardi Yahya kembali meninjau seluruh kabupaten/kota di Sumsel.

Pada Sabtu 12 September 2020, orang nomor satu dan dua di Sumsel ini mendatangi Kabupaten Murata dan Mura. Tujuannya satu, meluncurkan pembangunan infrastruktur.

Keesokan harinya, HD lalu melanjutkan perjalanan ke Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI), tepatnya Desa Cahya Maju Kecamatan Lempuing. Di sini HD mencurahkan isi hatinya kepada warga desa.

Dia mengaku, pembangunan yang merata hingga ke pelosok desa secara merata, adalah visi yang ingin diwujudkan sebagai gubernur. Sebab, dia

tahu benar bagaimana sulitnya hidup di desa.

"Saya ini lahir dan besar di desa. Maka saya orang desa ingin bangun desa. Kalau bisa semua desa maju sebagaimana kota," ungkap pria yang lahir di Kabupaten OKU Timur, pada 17 November 1967.

Dalam beberapa bulan belakangan, dia mengaku pernah melakukan kunjungan kerja di OKI. Kala itu dia melihat kondisi jalan yang begitu rusak di kawasan itu. Maka tidak salah jika dia segera ambil langkah untuk memperbaikinya.

"Saya pernah datang ke sini lebih kurang delapan bulan yang lalu pada saat panen raya. Saya melihat jalan ini memang rusak. Tapi saya juga tahu keuangan Pemkab OKI minim sehingga tidak mampu mengatasi ini," ungkapnya.

Melihat kondisi tersebut, dia pun tak ragu menggelontorkan dana bantuan Rp 111 miliar dari APBD Provinsi Sumsel untuk meningkatkan infrastruktur di Kabupaten OKI. Serta tambahan Rp 8 miliar untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. "Bearti lebih kurang Rp 120 miliar saya berikan ke OKI," terang HD.



Terus Berinovasi

Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, gubernur juga punya perhatian besar terhadap ekonomi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang mengalami guncangan cukup hebat di masa pandemi Covid-19.

Atas semua inovasi dan kerja kerasnya, orang nomor satu di Sumsel itu dinobatkan dan dianugerahkan penghargaan sebagai Kepala Daerah Inovatif Kategori Ekonomi Tahun 2020 dari salah satu media nasional terbesar di Indonesia.

Bahkan, Herman Deru merupakan satu-satunya Gubernur yang menerima penghargaan Kepala Daerah Inovatif Kategori Ekonomi 2020.

"Inovasi yang kita lakukan itu merupakan bentuk keikhlasan dan tanggung jawab kita kepada masyarakat. Bahwa di situasi pandemi ini kita menginginkan masyarakat tetap produktif sehingga perekonomian tetap tumbuh," kata HD di sela acara tersebut yang dihadiri langsung secara virtual.

Dengan adanya motivasi berupa penghargaan tersebut, HD mengatakan, hal itu tentu semakin memacu ia dan jajarannya untuk lebih berinovasi lagi di berbagai sektor.

"Tentunya kita semakin semangat meskipun kita memang tidak mengejar penghargaan ini. Adanya penghargaan ini mudah-mudahan dapat memberi resonansi baik kepada pemerintah daerah maupun masyarakat untuk terus berinovasi," paparnya.

Penghargaan itu diberikan karena inisiasinya mempublikasikan produk yang dihasilkan UMKM di Sumsel secara gratis melalui akun media sosialnya.

Bahkan upaya tersebut dilakukan Herman Deru secara berkesinambungan guna menjaga pertumbuhan ekonomidi Sumsel, terlebih di saat pandemi Covid-19.

Tidak hanya itu, sektor yang tak kalah penting yang menjadi perhatian Herman Deru adalah pertanian yang memang menjadi andalan Sumsel. Dia terus mengupayakan para petani untuk lebih mudah mendapatkan kurungan kredit tanpa harus dipusing dengan syarat agunan melalui kuota Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang jumlahnya mencapai Rp4,4 triliun.

"Sebagai kepala daerah, ada tiga hal pokok yang harus kita sediakan untuk masyarakat untuk mempertahankan pertumbuhan ekonomi ini. Antara lain

keterampilan, modal, dan market atau pasarnya," jelasnya.

Bahkan setelah dinobatkan sebagai Kepala Daerah Inovatif 2020 dan satu-satunya gubernur yang menerima penghargaan kategori ekonomi 2020 dari Koran Sindo, HD juga terpilih sebagai Top Pembina BUMD Awards 2020 dari majalah Top Business.

Wagub Mawardi Yahya yang mewakili penerimaan penghargaan tersebut mengatakan Top BUMD Awards 2020 merupakan apresiasi bagi pemprov Sumsel di bawah kepemimpinan HDMY.

"Alhamdulillah, ini merupakan hasil kerja keras kita selama 2 tahun. Bagaimana pemprov Sumsel di bawah kepemimpinan HDMY berkomitmen untuk membenahi manajemen BUMD di Sumsel", kata Mawardi.

Menurutnya kinerja HDMY tak sia-sia. Perhatian dan kerja keras HDMY mendapatkan penilaian positif terbukti dengan diraihnya penghargaan tersebut.

"Ke depan kita akan terus membenahi manajemen BUMD di Sumsel dalam tata kelolanya yang baik hingga pada akhirnya jika berkembang lebih besar bisa meningkatkan saham," tegasnya.

Wakil Presiden Ma'aruf Amin juga ikut bangga dengan keberhasilan yang diraih Sumatera Selatan. Dia berharap, penghargaan ini semakin memotivasi provinsi lainnya, untuk terus mendorong BUMD semakin berinovasi menjadi lebih baik.

"Ini (penghargaan) bisa menjadi rangsangan bagi daerah lain sehingga lebih berinovasi dengan melahirkan ide baru dalam melayani masyarakat dan memajukan daerahnya," kata wapres.

Merespons semua apresiasi itu HD mengucapkan terima kasih. Dia menjelaskan bahwa, penghargaan tersebut merupakan kerja keras masyarakat, serta jajarannya yang terus membantu demi meningkatkan kesejahteraan di Sumsel secara adil dan merata.

"Terlebih pada pembangunan infrastruktur, di mana diyakini mampu melahirkan konektivitas lokal, regional, nasional, hingga global. Dari pembangunan infrastruktur yang merata di semua daerah, dapat memperkuat konektivitas dan membuka akses ekonomi," jelas dia.

Kuncinya Konektivitas dan Integrasi

Menghubungkan tiap kabupaten dan kota di Sumsel diyakini HD dapat menumbuhkan perekonomian yang membuat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat.

Konektivitas adalah kunci suatu daerah agar terus tumbuh menjadi wilayah yang maju. Hal itu adalah gambaran besar yang dimilikinya terhadap Sumsel. Tergambar dari banyaknya kegiatan infrastruktur mulai tingkat desa hingga kota.

Salah satu proyek besar untuk meningkatkan konektivitas di Bumi Sriwijaya lainnya yang sedang dalam tahap pengembangan adalah menjadikan terminal terpadu atau multimoda dengan memanfaatkan Terminal Tipe A Karya Jaya Kertapati Palembang.

Hanya, berselang satu hari saat digelar rapat pemanfaatan Terminal Karya Jaya bersama Kementerian Perhubungan melalui virtual, pada Rabu, 16 September 2020. Keinginan tersebut, bahkan langsung mendapat respons oleh Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI, Budi Setyadi.

Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan, langsung melakukan *video conference* bersama HD bertempat di Command Center, Kamis (17/9/2020).

Tim dari Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI bersama Dirjen Perkerataapian Kementerian RI bahkan akan segera ke Kota Palembang untuk melihat langsung lokasi Terminal Karya Jaya Kertapati.

Karena ide langsung direspons dengan cepat oleh pemerintah pusat, HD pun berterima kasih kepada Kemenhub. Dia berharap ide tersebut dapat segera direalisasikan.

HD mengatakan, menjadikan Terminal Tipe A Karya Jaya Kertapati Palembang, sebagai terminal multimoda ini agar terjadi integrasi antara angkutan darat, sungai, dan kereta api.

Apalagi, pertumbuhan sektor logistik di Sumsel kian meningkat. Sehingga diperlukan solusi dalam memenuhi kebutuhan pada sektor transportasi. "Untuk barang sudah tidak mungkin di dalam kota. Ke depan untuk bongkar muat batasnya di Karya Jaya. Apakah itu komoditas pertanian ataupun pertambangan namun tidak di dalam kota," jelas HD.

Sementara itu, Dirjen Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan RI Budi Setyadi menyambut baik ide yang disampaikan gubernur.

"Apa yang disampaikan pak gubernur kami akan mendukung bahkan kita akan menyamakan persepsi ini, apalagi Terminal Karya Jaya itu sangat bagus sekali," ungkapnyanya.

Dia mengatakan, untuk menjadikan Terminal Karya Jaya sebagai terminal multimoda harus dilakukan dengan kerja cepat. Karena dia mengaku konsep, dan presentase terkait terminal itu telah ditunggu oleh Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi.

"Rencana saya mau kerja cepat. Karena minggu depan Pak Menteri mau minta presentasi. Hari sabtu saya akan menurunkan tim saya bersama Dirjen kereta api ke Palembang," terang Budi Setyadi.

Dalam pelaksanaannya, tim akan dilakukan pengkajian secara spesifik, sehingga terminal antarmoda ini dapat dimanfaatkan secara maksimal. "Prin-



sipnya kita siap dan kerja cepat untuk melakukan multimoda ini," pungkasnya.

Hingga Lintas Provinsi

Tak hanya di wilayah Bumi Sriwijaya saja, kemajuan juga bisa didapatkan dengan kerja sama. Visi itu yang terus membuat langkah HD semakin jauh ke depan.

Dalam pandangannya, Sumsel tidak bisa berdiri sendiri dalam meningkatkan kesejahteraan. Perlu bantuan dan kerja sama hingga lintas provinsi bahkan mancanegara. Maka dari itu, untuk mencapai mimpi tersebut, HD pun mengajak Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman Djojan berdiskusi.

Pembahasannya adalah mewujudkan



INTEGRITAS - Gubernur Sumsel Herman Deru melakukan video conference dengan Dirjen Darat Kementerian Perhubungan Budi Setyadi membahas Terminal Karya Jaya Kertapati, Palembang menjadi terminal antarmoda, pada Kamis (17/9/2020).

kan jembatan penghubung antara Sumsel dengan Babel yang bertetangga. Jembatan itu dinamakan "Bahtera Sriwijaya".

Pada diskusi yang dilakukan di Kantor Gubernur Babel, Kota Pangkal Pinang pada Kamis, 17 September 2020, akhirnya ditetapkan tapak jembatan penghubung yang rencananya akan sepanjang 13,5 kilometer.

Untuk di wilayah Sumsel jembatan akan dibangun di Desa Tanjung Tapa, Kecamatan Tulung Selapan, Kabupaten OKI. Sementara ujung jembatan Bahtera Sriwijaya berada di Desa Sebagian, Kabupaten Bangka Selatan.

"Alhamdulillah, kita sudah deal, jembatan Bangka-Sumatera ini nantinya kita beri nama 'Bahtera Sriwijaya',"

ucap HD usai berdiskusi dengan Erzaldi Rosman, yang turut didampingi pejabat terkait dari kedua provinsi itu.

Herman Deru berharap hasil yang telah dicapai segera ditindaklanjuti untuk melengkapi syarat usulan ke pemerintah pusat. Rencananya pada 2024 sudah ada progres pelaksanaan pembangunan.

Keberadaan jembatan diyakini HD akan membuat Kabupaten OKI kian terbuka dan mendorong datangnya banyak investor di kawasan itu. Terlebih dengan telah dioperasionalkannya tol trans Sumatera penghubung Palembang-Kayu Agung- Lampung. Tentunya akan berdampak positif dengan kemajuan sektor ekonomi bagi Provinsi Sumsel dan Provinsi

Kepulauan Babel.

"Dampaknya akan spektakuler bagi kedua pihak. Komoditas dari Sumsel akan lebih banyak lagi yang akan dibawa ke Bangka. Begitu juga sebaliknya. Produk dari Bangka ini dengan gampang dibawa ke luar hingga ke Pulau Jawa. Termasuk bagi sektor pariwisata," terang Herman Deru.

Sementara itu Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Erzaldi Rosman sebelumnya menyebut proyek jalur penghubung Bangka-Sumatera layak untuk dilanjutkan menuju tahap studi kelayakan atau feasibility study.

"Keberadaan jalur penyeberangan ini diharapkan berdampak positif bagi Provinsi Kepulauan Babel dan Sumsel," tandasnya. •ra



SAMBUT PEMBALAP DUNIA - Pemandangan Tugu Mandala di Nusa Dua, KEK Mandalika, NTB yang pembangunannya nyaris rampung untuk menjadi tuan rumah dalam seri MotoGP 2021.

SENGKARUT SIRKUIT MANDALIKA

► ITDC Dikejar Target Pembangunan, Dituntut Selesaikan Persoalan Lahan

MotoGP siap digeber di Sirkuit Mandalika, tahun depan. Aspal hitam mulai menutupi sebagian lintasan. Persoalannya, lahan sirkuit jalanan seluas 52,5 hektare ini masih tumpang tindih. Saling klaim pun terjadi dari berbagai kalangan.

Puluhan masyarakat mencoba masuk ke dalam lokasi sirkuit yang sedang dibangun pada Jumat (11/9/2020). Excavator yang sedang bekerja pun dihentikan. Masyarakat tersebut menuntut ganti rugi, karena lahannya akan dijadikan lintasan balap sepanjang 4,31 kilometer.

Di antara puluhan masyarakat yang melakukan aksi demonstrasi tersebut, ada seorang ibu bernama Suhartini yang menuntut hak atas tanahnya. Didampingi sang suami, perempuan yang datang mengenakan hijab hijau

tersebut tak takut ketika polisi menghampirinya untuk melakukan negosiasi.

Suhartini yang didampingi sang suami, Adi sejatinya, mempersilakan kepada PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC) sebagai BUMN pengembang dan pengelola kawasan pariwisata Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Mandalika, melakukan *land clearing* atas lahan yang menurutnya adalah miliknya. Namun haknya tetap harus diperhatikan.



FOTO: ISTIMEWA

"Silakan saja gusur lahan kami itu, tidak apa-apa, kami tidak akan menghalang-halangi. Tapi tolong selesaikan apa yang menjadi hak-hak kami," ujarnya kepada awak media.

Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Barat yang turun ke lapangan untuk menenangkan situasi akhirnya dapat memberikan pemahaman kepada masyarakat yang melakukan aksi. Kabid Humas Polda NTB Kombes Artanto menjelaskan, bahwa kepolisian hanya menjadi penengah dari kedua belah pihak yang bersengketa. Serta menjaga kondusifitas.

"Upaya negosiasi berbagai pihak yang terlibat dalam proses land clearing lintasan Sirkuit MotoGP Mandalika, yang diklaim warga mulai menunjukkan hasil yang positif. Memasuki hari ketiga proses land clearing, Minggu (13/9/2020), Suhartini yang mengklaim salah satu titik lintasan sirkuit adalah lahan miliknya, memberikan dan atau mengikhlaskan untuk dilaku-

kan land clearing guna pembangunan lintasan Sirkuit MotoGP Mandalika," ungkap Artanto, dalam keterangannya kepada wartawan, Senin (14/9/2020).

Dalam proses negosiasi Suhartini bersama suaminya Adi, bertemu dengan Kombes Artanto dan Kapolres Lombok Tengah AKBP Esty Setyo Nugroho, mengaku ikhlas memberikan lahan yang diklaimnya untuk dilakukan *land clearing* tanpa keinginan menghalang-halangi.

Meski begitu, proses land clearing di lahan yang diklaim Suhartini bukan berarti menutup haknya untuk melakukan gugatan secara perdata melalui pengadilan. Pihaknya pun berjanji akan mengawal setiap proses ketika Suhartini menempuh jalur hukum.

"Kami dari kepolisian yang merupakan pengaman, pelindung, dan pengayom masyarakat, dalam hal ini khususnya Polres Lombok Tengah akan mendukung dan terus mengawal, setiap proses sesuai ke-

tentuan hukum. Jika Suhartini mengajukan gugatan kepada ITDC melalui pengadilan. Itu adalah hak Suhartini sebagai warga negara yang dilindungi undang-undang," terangnya.

Artanto menyebutkan, berdasarkan informasi dari Ketua Tim Verifikasi Dokumen Percepatan Pembangunan KEK Mandalika, dari 42 orang pemilik lahan enklave (dalam kawasan) Sirkuit MotoGP Mandalika, sesuai hasil verifikasi sebanyak sembilan pemilik lahan akan segera mendapatkan pembayaran dari PT ITDC.

"Total ada Rp 16,9 miliar sudah didaftarkan untuk dilakukan transfer ke rekening Pengadilan Negeri Praya, untuk dilakukan pembayaran terhadap sembilan pemilik lahan enklave. Diharapkan warga yang memiliki hak konsinyasi, nantinya mendatangi Pengadilan Praya untuk mengambil haknya," jelas Artanto.

Aksi yang dilakukan Suhartini dan Adi tersebut, hanya sebagian kecil dari puluhan protes yang dilakukan masyarakat kepada ITDC. Sejak diterbitkannya surat permintaan pengosongan lahan yang disebut dari perusahaan pengelola kawasan.

Surat tersebut pun memantik emosi warga yang mengklaim memiliki hak atas lahan di Mandalika. Melalui tim advokasi yang diketuai Hasan Masat, masyarakat menilai permintaan pengosongan lahan adalah rencana penggusuran paksa. ITDC pun dinilai arogan dan mengabaikan hak masyarakat pengklaim pemilik lahan.

"Terbitnya surat ITDC tertanggal 19 Agustus 2020 tentang pemberitahuan pengosongan lahan milik warga di KEK Pariwisata Mandalika sangat disayangkan, padahal proses penyelesaian dengan warga bersama ITDC belum menemukan kesepakatan para pihak," kata Hasan Masat, melalui siaran pers tertulis, Sabtu (22/8/2020) di Mataram.

Menurut Hasan, dalam proses mediasi atau negosiasi, warga masih bertahan agar lahan mereka dibayar secara layak. Namun, tiba-tiba ITDC menyampaikan surat peringatan I meminta warga untuk mengosongkan lahannya.

"Tindakan ITDC menerbitkan surat peringatan I adalah bentuk tindakan arogansi dan sewenang-wenang, se-

baiknya ITDC harus lebih bijak dalam menyelesaikan persoalan tanah di KEK Pariwisata Mandalika," tukasnya.

Hasan memaparkan, bahwa klaim ada HPL di atas lahan milik warga di KEK Mandalika patut dicurigai keabsahannya. Karena pembebasan lahan oleh PT Rajawali/PPL/LTDC diduga penuh rekayasa dan manipulatif.

Ia mengatakan sebaiknya ITDC dan pemerintah terlebih dahulu harus memahami karakteristik permasalahan lahan di KEK Mandalika.

Pertama adanya lahan yang salah bayar bukan kepada pemilik sebenarnya. Kedua, luas lahan yang dibayar berbeda dengan luas yang dimiliki oleh warga. Ketiga, penerbitan HPL dengan alasan tanah negara di atas tanah warga yang tidak memiliki surat-surat tanah padahal warga telah mendiami lahan tersebut lebih dari 50 tahun secara turun temurun dan tidak pernah ada pelepasan hak kepada PT Rajawali/PPL/LTDC.

Keempat, ITDC juga harus menunjukkan dokumen asli atau warkah tanah sebagai syarat terbitnya HPL. Apakah benar orang yang melepaskan hak atas tanah kepada ITDC adalah warga pemilik lahan sebenarnya.

"Pertanyaan mendasar yang harus dijawab ITDC adalah apakah benar mereka memiliki bukti-bukti valid tentang asal muasal tanah sehingga terbit HPL. Dan apakah benar PT Rajawali/PPL/LTDC waktu itu membeli lahan dari warga pemilik lahan atau justru membeli lahan dari broker tanah yang mengklaim tanah tersebut adalah miliknya?" tegas dia.

Sementara itu, Sekretaris Tim Advokasi Lahan Mandalika, M Fihiruddin mengungkapkan, sengketa sejarah persoalan tanah di kawasan Mandalika harus menjadi fokus perhatian ITDC dan pemerintah dalam rangka penyelesaian secara bijak dan berkeadilan.

"Bukan dengan mengirim surat ancaman pengosongan lahan, ini cara-cara intimidatif dan berpotensi melanggar HAM," tegasnya.

Fihir menekankan, praktik-praktik intimidatif ini tidak boleh lagi dilakukan entah oleh negara, apalagi ITDC yang hanya perusahaan pelat merah.

"Kami ingatkan ITDC jangan sekali-



BERSENGKETA - Proses land clearing lahan yang sedang dikerjakan oleh ITDC untuk menyelesaikan Sirkuit MotoGP Mandalika.

kali menggunakan cara kekerasan apalagi menggusur tanah milik warga hanya berbekal kertas HPL. Jangan pernah lagi ada tindakan paksa atau tindakan sepihak yang dilakukan ITDC kepada warga, jika ini dilakukan lagi maka ini jelas tindakan sewenang-wenang," tegasnya.

Menurut Fihir, secara hukum ITDC sebagai badan hukum perdata tidak memiliki hak dan kewenangan mengambil alih lahan warga secara sepihak. Semua proses eksekusi atau pengosongan lahan harus melalui putusan pengadilan. Jika pengosongan lahan ini dilakukan oleh ITDC maka jelas ini tindakan melawan hukum dan melanggar HAM warga pemilik lahan.

Terkait rencana pengosongan lahan sengketa itu, Tim Advokasi Lahan

Mandalika meminta perlindungan hukum kepada seluruh pihak. "Kami juga minta perlindungan hukum kepada Komnas HAM RI untuk melakukan investigasi atas dugaan perampasan hak-hak tanah milik warga," katanya.

Tim juga meminta perlindungan hukum kepada Ombudsman RI untuk melakukan investigasi atas dugaan mal administrasi proses penerbitan HPL di atas tanah milik warga.

"Kami juga mendesak ITDC mencabut surat pemberitahuan pengosongan lahan milik warga di KEK Pariwisata Mandalika tertanggal 19 Agustus 2020. Serta mendesak Pemprov NTB dan Pemkab Lombok Tengah untuk memfasilitasi kembali penyelesaian lahan di KEK Mandalika secara transparan dan berkeadilan," tegasnya.



(FOTO: DANI/INFO INDONESIA)

Komisioner Pendidikan dan Penyaluran Komnas HAM RI Beka Ulung Hapsara menegaskan bahwa proyek pembangunan di Mandalika harus memperhatikan kaidah kemanusiaan. Jangan sampai dengan alasan Sirkuit MotoGP Mandalika adalah proyek nasional, kemudian terjadi pelanggaran HAM.

"Yang namanya proyek nasional itu juga ada rambu-rambunya. Rambu itu bukan hanya sekadar rambu-rambu jadwal yang ditargetkan presiden. Tapi juga rambu-rambu hak asasi manusia," tegasnya.

Hapsara menambahkan, pembangunan tidak hanya bicara soal peralihan hak milik saja. Namun juga berbicara tentang hak asasi manusia yang sangat penting sesuai dengan arahan

presiden.

"Apalagi kemarin ketika pidato kenegaraan (Sidang MPR RI 14 Agustus 2020), presiden sudah sangat jelas pesannya, bahwa pembangunan nasional, Indonesia harus memperhatikan lingkungan dan hak asasi manusia supaya tidak ada lagi kesewenang-wenangan dan ketidakadilan," ulasnya.

Ia menerangkan bahwa dalam standar operasional dan prosedur Komnas HAM, pengusuran menjadi prioritas yang harus segera ditangani. Sebab pengusuran bukan hanya bangunan yang hilang, tapi banyak hak-hak masyarakat yang dilanggar di dalamnya. Seperti hak untuk hidup layak, hak diperlakukan bermartabat dan hak berkehidupan sosial.

"Ketika pengusuran, yang tadinya

bertetangga yang kita kenal, punya relasi yang baik, kemudian ada pengusuran terpaksa berpindah. Artinya membangun sesuatu dari nol kembali. Itulah salah satu alasan yang menjadikan pengusuran sebagai prioritas di Komnas HAM," terangnya.

Gubernur NTB Zulkieflimansyah yang mendengar persoalan ini meminta agar kedua belah pihak yang bersengketa untuk tidak emosi dan menyelesaikannya dengan kepala dingin.

Pemerintah daerah ucap dia, memprioritaskan persoalan lahan yang terjadi di lokasi pembangunan sirkuit selalu mengedepankan upaya kekeluargaan. Harapannya agar persoalan tersebut bisa segera tuntas.

"Pertama (Mandalika) ini etalase nasional. Makanya tentu kita tidak ingin

ini (penyelesaian lahan) berlangsung gaduh. Jadi kita akan coba selesaikan secara persuasif dan kekeluargaan," ujar gubernur, di Mataram, Kamis (10/9/2020).

Soal warga yang masih menolak menurutnya hal yang wajar. Tapi yang pasti pembebasan lahan kawasan The Mandalika harus selesai. "Soal ada yang menolak itu biasalah. Dan, Insya Allah sudah ada solusi yang disiapkan," imbuh gubernur.

Prinsipnya, terang dia persoalan lahan harus segera dituntaskan secepatnya. Tanpa ada kegaduhan. Masyarakat juga yang merasa memiliki lahan tersebut, patut ditunaikan hak-haknya. "Detail penyelesaiannya Pak Kapolda NTB yang handle. Tapi yang jelas solusi sudah disiapkan," terang dia.

ITDC rupanya tidak tinggal diam. Meski dikedjar tenggat untuk segera menyelesaikan pembangunan sirkuit dalam waktu dekat, perusahaan milik negara tersebut, tengah mempersiapkan hunian sementara di lahan seluas lebih dan kurang 2,5 hektare di Desa Mertak, Lombok Tengah.

Penggunaan lahan milik ITDC ini bersifat pinjam pakai atas dasar surat dari Bupati Lombok Tengah. Lahan tersebut dipersiapkan bagi sekitar 121 kepala keluarga (KK) yang selama ini menempati area di sekitar Jalan Khusus Kawasan (JKK) The Mandalika namun terbukti tidak memiliki surat kepemilikan tanah yang sah sesuai hasil verifikasi Tim Tanah Forum Komunikasi Pimpinan Daerah yang dibentuk berdasarkan SK Gubernur NTB.

JKK sendiri merupakan jalan yang menghubungkan antara lokasi di dalam kawasan The Mandalika, namun bisa difungsikan juga untuk berbagai kegiatan antara lain event balap berskala internasional, atau triathlon, marathon, karnaval, dll.

Di lokasi hunian sementara, masing-masing KK akan menempati kavling seluas lebih kurang 100 meter persegi untuk digunakan sebagai tempat tinggal dan untuk menjalankan penghidupannya.

Selain meminjamkan lahan, ITDC juga akan menyiapkan infrastruktur dasar berupa sumur, jalan akses, listrik, PJU, toilet, tempat sampah, drainase, sanitasi, kandang komunal dan kelengkapan fasilitas umum lainnya di lokasi hunian sementara sehingga layak dan siap

digunakan oleh masyarakat yang direlokasi.

Proses penyiapan infrastruktur dasar relokasi sementara ini diperkirakan akan selesai pada pertengahan September 2020. Seluruh kegiatan penyiapan infrastruktur dasar bagi lokasi relokasi sementara ini merupakan bagian dari program MUTIP-AIIB.

"Relokasi warga ini merupakan salah satu bentuk kepedulian ITDC dalam melaksanakan pengembangan The Mandalika. Khususnya penyelesaian permasalahan lahan dengan tetap memperhatikan hak dan kebutuhan masyarakat. Kegiatan relokasi ini dilaksanakan atas persetujuan warga yang akan direlokasi. Mereka akan tinggal di hunian sementara ini, hingga hunian tetap bagi mereka telah tersedia dan layak huni," ujar Direktur Konstruksi dan Operasi ITDC, Ngurah Wirawan dalam keterangan tertulisnya, pada 31 Agustus 2020 lalu.

Berdasarkan SK Bupati Lombok Tengah tentang penerima bantuan stimulan dan relokasi warga terdampak No. 300/2020 tertanggal 3 Juli 2020 dan No. 349/2020 tertanggal 30 Juli 2020 dan telah diverifikasi oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat terdapat 121 KK yang akan direlokasi. Terdiri dari 67 KK dari Dusun Ebunut dan 54 KK dari Dusun Ujung Lauk.

Dari jumlah tersebut, saat ini tercatat sebanyak 85 KK telah pindah dari lokasi semula. Di mana 61 KK telah membuat kavling di HPL 94 dan 24 KK mempunyai rumah tinggal di tempat lain. Sisanya masih menempati lahan di sekitar JKK atau, Dusun Ujung dan Ebunut.

Ke depan, seluruh warga yang direlokasi akan ditempatkan di relokasi permanen atau hunian tetap seluas 2 hektare di Dusun Ngolang, Desa Kuta, Lombok Tengah, setelah lokasi tersebut siap.

Pembangunan hunian permanen ini akan dilaksanakan oleh Pemkab Lombok Tengah dan dibantu oleh Kementerian PUPR melalui Satuan Non Vertikal Permukiman NTB untuk pembangunan hunian pariwisata permanen.

**Presiden Direktur ITDC
Abdulbar M Mansoer**



FOTO: ISTIMEWA

"ITDC berharap dengan adanya relokasi ke tempat yang baru, masyarakat dapat tetap hidup dan melaksanakan aktivitas dengan lebih nyaman sekaligus dapat mempercepat proses pembangunan di The Mandalika. Kegiatan ini juga merupakan bukti komitmen ITDC sebagai BUMN untuk mengembangkan The Mandalika dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat, mendorong peningkatan kesejahteraan warga sekitar dan membawa multiplier effect yang besar bagi perekonomian NTB," kata Ngurah Wirawan.

Presiden Direktur ITDC Abdulbar M Mansoer mengatakan, meski diterpa

persen. Kemudian pemasangan pagar beton precast keliling sepanjang 5.502 meter atau 88,03 persen, galian tanah track sepanjang 239.065 m atau 95,45 persen, timbunan tanah mencapai 225.846 meter kubik atau 64,78 persen, dan ground improvement seluas 5.481 meter persegi atau 33,14 persen.

Saat ini, progres pembangunan Sirkuit Mandalika secara keseluruhan telah mencapai lebih dari 40 persen dan ditargetkan pembangunan selesai pada Juni 2021.

"Saat ini kami fokus melakukan percepatan penyelesaian pembangunan Sirkuit Mandalika sehingga event MotoGP 2021 terlaksana dengan lan-

Penyelenggaraan MotoGP di The Mandalika, dipercaya mampu menghasilkan multiplier effect yang besar antara lain penciptaan lapangan kerja langsung bagi sekitar 7.500 orang.

Memberikan tambahan investasi lokal sebesar USD 150 juta. Lalu, menambah jumlah kunjungan wisatawan asing ke Indonesia hingga mencapai 300 ribu orang per tahun.

Serta diperkirakan meningkatkan belanja wisatawan hingga mencapai USD 40 per tahun dapat dinikmati masyarakat Indonesia khususnya NTB.

"Selain membawa dampak ekonomi, penyelenggaraan MotoGP di Sirkuit Mandalika, jelas akan mening-



Gubernur NTB Zulkieflimansyah

FOTO: ISTIMEWA

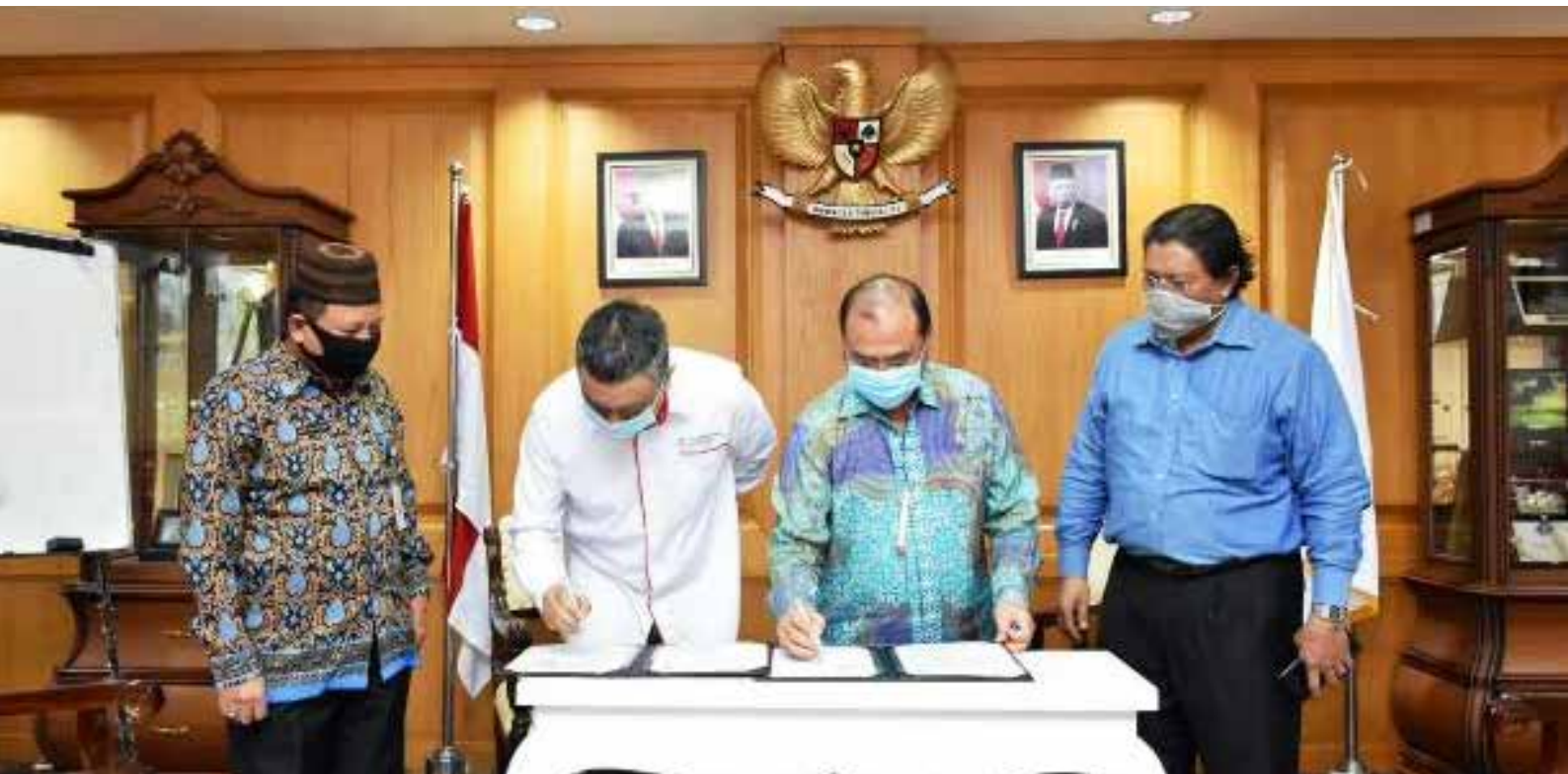
pandemi Covid-19, pembangunan KEK Mandalika tetap terus berjalan, berdasarkan protokol kesehatan yang ketat. Dia pun optimistis, perhelatan MotoGP 2021 siap digas.

Sirkuit dan lintasan balap pun saat ini, sedang dalam tahap proses ground work atau pekerjaan tanah yang telah mencapai 60 persen.

Dengan rincian land clearing seluas 429.175 meter persegi atau 81,77

car. Penyelenggaraan MotoGP Indonesia sendiri akan memberikan tiga manfaat utama bagi Indonesia yaitu country branding, tourism attraction, dan multiplier effect. Kami optimistis ketiga manfaat tersebut dapat membantu pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi dan membangkitkan sektor pariwisata dalam negeri paska pandemi," jelas Abdulbar.

katkan *country branding* Indonesia sebagai negara tujuan sport tourism terkemuka. Hal ini tidak lepas dari besarnya magnitude penyelenggaraan event dan basis penggemar MotoGP di seluruh dunia yang ditonton hampir 430 juta pemirsa televisi di seluruh dunia setiap minggunya. Ini pastinya akan memberikan benefit yang besar bagi Indonesia dan ITDC dalam jangka panjang," tutup Abdulbar. •



REVOLUSI INDUSTRI - Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman menandatangani MoU kerja sama dengan Thorcon International Pte Ltd untuk pengembangan PLTT pada 31 Juli 2020.

REVOLUSI THORIUM BANGKA BELITUNG

► Tinggalkan Tambang, Gapai Industri Modern

Kekayaan Bumi Pertiwi tidak ada habisnya. Emas di Papua. Batu bara di Kalimantan. Nikel dan semen di Sulawesi. Minyak, dan gas di Sumatera. Kini, ditemukan sumber energi baru di Kepulauan Bangka Belitung, yakni thorium yang akan segera dieksplorasi.

Pencarian sumber energi baru, tidak berhenti hanya yang berasal dari fosil. Dunia, semakin masif melakukan eksplorasi terhadap sumber energi yang dapat dimaksimalkan hingga titik paling puncak.

Dalam satu dekade terakhir, thorium makin hangat diperbincangkan oleh para pakar energi di dalam negeri. Salah satu yang paling getol membahasnya adalah mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan.

Eks bos Jawa Pos ini seperti memiliki ketertarikan khusus pada thorium. Sering kali, dia menuliskan catatan tentang sumber daya alam satu ini pada website miliknya, yakni disway.

Bahkan dia berencana membuat Pembangkit Listrik Tenaga Thorium (PLTT) di wilayah ibu kota baru, di Kali-

mantan Timur. Dia berencana membeli sebuah pulau kecil yang berada di Teluk Balikpapan, sebagai lokasi mendirikan pembangkit listrik.

"Saya anggap ideal untuk lokasi pembangkit listrik tenaga nuklir thorium," tulis Dahlan Iskan. Namun, niat itu dibatalkan. Padahal, posisinya persis berada di depan ibu kota baru.

Ide mendirikan PLTT itu keburu disalip oleh Kepulauan Bangka Belitung. Perusahaan pengembangan nuklir asal Amerika Serikat, Thorcon International Pte Ltd telah menyatakan minatnya berinvestasi di Bumi Serumpun Sebalai.

Kerja sama pun dibangun antara Thorcon dengan Pemerintah Provinsi Bangka Belitung pada 30 Juli 2020. Tanda tangan Memorandum of Un-



Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

derstanding (MoU), dilakukan sebagai legalitas, demi meresmikan proyek pembangunan PLTT.

Tidak main-main, Thorcon akan berinvestasi sekitar USD 1,2 miliar atau setara Rp 17 triliun, untuk mewujudkan mimpi, membangun PLTT berkapasitas 500 Megawatt (MW). Pembiayaan dilakukan dalam skema Independent Power Producer (IPP), tanpa menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Adanya rencana Pemprov Bangka Belitung untuk mengembangkan industri berbasis mineral ikutan timah, khususnya logam tanah jarang thorium karena dapat menjadi sumber energi bersih dan murah yang berpotensi dapat menggantikan batu bara," ungkap Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Erzaldi Rosman dalam siaran pers, Kamis (30/7/2020).

Teknologi PLTT yang diberi nama oleh Thorcon dengan nama TMSR500 ini, diklaim memiliki memiliki tingkat keselamatan tinggi sehingga kejadian seperti Fukushima tidak mungkin terjadi karena tidak adanya tekanan pada reaktor.

Selain itu, juga memiliki tingkat ekonomi yang tinggi yang dapat ber-

saing dengan batu bara serta dapat dibangun di Indonesia yang dapat menjadi embrio industri nuklir nasional.

Staf Khusus Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Safari ANS, menambahkan kerja sama dengan Thorcon menjadi awal dimulainya industrialisasi di provinsi tersebut.

Rencana investasi ini akan dilakukan dalam waktu secepat-cepatnya. Sehingga tak butuh waktu lama lagi Babel, menjadi daerah yang menjual energi keluar provinsi lain, karena produksi listriknya diprediksi berlebih.

Selanjutnya, thorium dinilai sangat ramah lingkungan, serta tidak ada pencemaran. "Kami tidak ingin selamanya menjadi daerah tambang, tetapi kita ingin menjadi daerah industri. High tech industri. Industri elektronik zaman modern, kita tinggalkan tambang," kata Safari.

Apalagi, cadangan mineral yang lebih dikenal dengan nama logam tanah jarang oleh masyarakat, sangat banyak sekali di sana. Safari menjelaskan, thorium sering digunakan sebagai penerangan. Tepatnya, yaitu cahaya putih pada lampu petromaks yang biasa digunakan untuk menerangi bagan, rumah tangga, selama bertahun-tahun.

Kepala Perwakilan Thorcon International Bob S Effendi mengatakan, kerja sama dengan Pemprov Babel dilakukan atas pertimbangan bahwa perusahaan yang berbasis di AS tersebut sudah mendapatkan rekomendasi dari pemerintah pusat untuk melakukan persiapan pembangunan PLTT.

Rekomendasi yang dimaksud adalah surat dari Kementerian Koordinator Kemaritiman dan Investasi yang dipimpin oleh Luhut Binsar Pandjaitan.

"Kami sangat berharap dukungan Pemprov Bangka Belitung. Sehingga, wilayah di Kepulauan Bangka Belitung dapat ditetapkan sebagai lokasi pembangunan PLTT pertama di Indonesia yang dapat memberikan listrik murah dan bersih untuk masyarakat dan industri," kata Bob dalam keterangan tertulisnya.

Effendi juga menuturkan bahwa telah terbit regulasi terbaru yang memberikan indikasi arah maju atau lampu hijau untuk pembangunan PLTN yakni Kepmen 39K/20/MEM/2019 dan Perpres Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024.

Dia menjelaskan Thorcon sangat mementingkan aspek keselamatan

dalam proses berbisnis. Bahkan dia mengklaim banyak para ahli nuklir dari seluruh dunia menyimpulkan teknologi TMSR memiliki tingkat keselamatan yang tinggi.

"Ini kami jamin aman, ini berbeda dengan nuklir yang memiliki tekanan, kalau thorium tidak memiliki tekanan," ungkapnya.

Sekaligus juga menurunkan tarif listrik, ini membawa dampak positif bagi industri elektronik berbasis teknologi. "Dengan tarif listrik terjangkau, mendorong pertumbuhan ekonomi dan industri bahkan akan menjadi pusat dunia teknologi nuklir generasi terkini," ungkapnya.

Peran Luhut Menjual Harta Karun

yang diproduksi di Tiongkok, Amerika sendiri begitu di-banned oleh Tiongkok itu kelabakan juga. Nah investor yang paling cepat sekarang itu Tiongkok. Kalau kita semua kasih Tiongkok nanti semua mental," kata Luhut dalam acara investasi di tengah pandemi secara virtual, Sabtu (25/7/2020).

Harta karun nasional yang dimaksud ini adalah mineral tanah jarang. Komoditas satu ini diyakini mudah ditemukan di Indonesia. "Jadi kita ya memelihara ekuilibrium kita cari investor, apakah Amerika mau, kita coba atau yang lain," jelasnya.

Menurut dia, mencari investor pun tidak semudah membalikkan telapak tangan. Luhut bilang banyak banyak

thorium.

Isu ini menjadi nyawa baru bagi perusahaan plat merah ini setelah puluhan tahun hanya bergerak penambangan dan penjualan timah. Padahal mineral ikutan timah ini justru lebih menarik untuk dikembangkan dan menarik perhatian dunia.

Dalam sebuah presentasi PT Timah Tbk dua tahun lalu pada sebuah seminar nasional untuk menanggulangi kekurangan listrik di Indonesia, menyebutkan potensinya.

Berdasarkan hasil penelitian perusahaan dengan nama emiten TINS pada lantai bursa saham Indonesia tersebut, terdapat kadar rata-rata di aluvial thorium 500 ppm, uranium 100 ppm, dan unsur mineral tanah jarang 3 persen.

Tebal aluvial yang diteliti di hulu sungai 12 meter. Lalu sumberdaya di daerah aluvial seluas satu hektar itu terdapat uranium 0,06 ton, thorium 0,3 ton, dan mineral tanah jarang 18 ton.

Dengan keberhasilan tersebut, Rizal menyatakan siap memasok kebutuhan thorium kepada Thorcon selaku operator PLTT. Bahkan, pihaknya telah melakukan komunikasi terkait negosiasi bisnis tersebut.

"Untuk thorium sebenarnya kami sudah beberapa kali berkomunikasi dengan Thorcon sejak beberapa tahun. Saya pikir memang teknologinya sangat tinggi, jadi secara prinsip kami siap menyiapkan bahan baku energi," jelas Riza saat konferensi pers di Hotel Borobudur, Jakarta, Senin (10/2/2020).

Saat ini pun, kata Riza, perusahaan yang dipimpinnya sudah menandatangani perjanjian kerjasama dengan Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batan) untuk menyimpan thorium yang dihasilkan dari pemisahan monasit.

"Dan memang PT Timah Tbk sudah menandatangani MoU dengan Batan bahwa kami akan menjaga dan menyimpan thorium yang dihasilkan dari pemisahan monasit," jelas dia.

Disamping 2027 Beroperasi

Proyek pembangunan pembangkit listrik yang berasal dari thorium ini diprediksi rampung pada 2027 mendatang. Porsi Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) pun akan mencapai 60 persen seiring pengembangan pembangkit nuklir serta rencana



Menteri Koordinator Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan

Nasional

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan kepada awak media, sedang menawarkan 'harta karun' kepada negara-negara yang siap menjadi investor, pada 25 Juli 2020. Salah satunya adalah pengusaha dari Negeri Paman Sam.

Saat itu, Dia mengaku investor yang sudah siap mengembangkan harta karun nasional tersebut adalah Tiongkok. Namun dirinya tidak ingin menyerahkan ke Negeri Tirai Bambu demi menjaga iklim investasi nasional.

"Ini kita juga memang dilematis, karena rare earth kan paling ban-

prosedur yang harus disepakati antara kedua belah pihak baik pemerintah maupun investor.

"Jadi kita harus melihat national interest kita, tidak sekadar hanya terima orang datang investasi, tidak begitu ceritanya. Ada perhitungan strategi kita, pertimbangan geopolitik sebelum memutuskan itu dan seberapa banyak yang akan kita berikan, nggak akan kita berikan semua," ungkapnya.

Direktur Utama PT Timah Tbk, Mochtar Riza Pahlevi Tabrani secara terang-terangan kepada media nasional dan internasional telah mengatakan bahwa BUMN ini telah melakukan penambangan uranium dan

pembuatan seluruh komponen di Indonesia pada 2030 mendatang.

Sementara itu, 40 persen sisanya merupakan komponen turbin yang belum dimungkinkan untuk dibuat di tanah air. Thorcon bahkan berambisi membangun 10 hingga 20 unit pembangkit nuklir jika seluruh proyek dapat rampung sesuai rencana.

Demi meminimalkan resiko dan meningkatkan keyakinan proyek nuklir, Bob memastikan tahapan pengerjaan fisik proyek akan terbagi menjadi dua tahapan. "Tahapan pertama jika melampaui seluruh proses tes baru akan masuk ke tahapan kedua dan ini akan meminimalkan resiko," jelas

kekhawatiran untuk itu saat ini kondisinya surplus dan bisa saja supplainya dari Brasil atau Prancis," terang Lars dalam kesempatan yang sama.

Lebih Ramah Lingkungan

Badan Tenaga Nuklir Nasional (Batn) menghitung jumlah kandungan thorium di Babel sekitar 126.207 ton. Terbanyak di Indonesia.

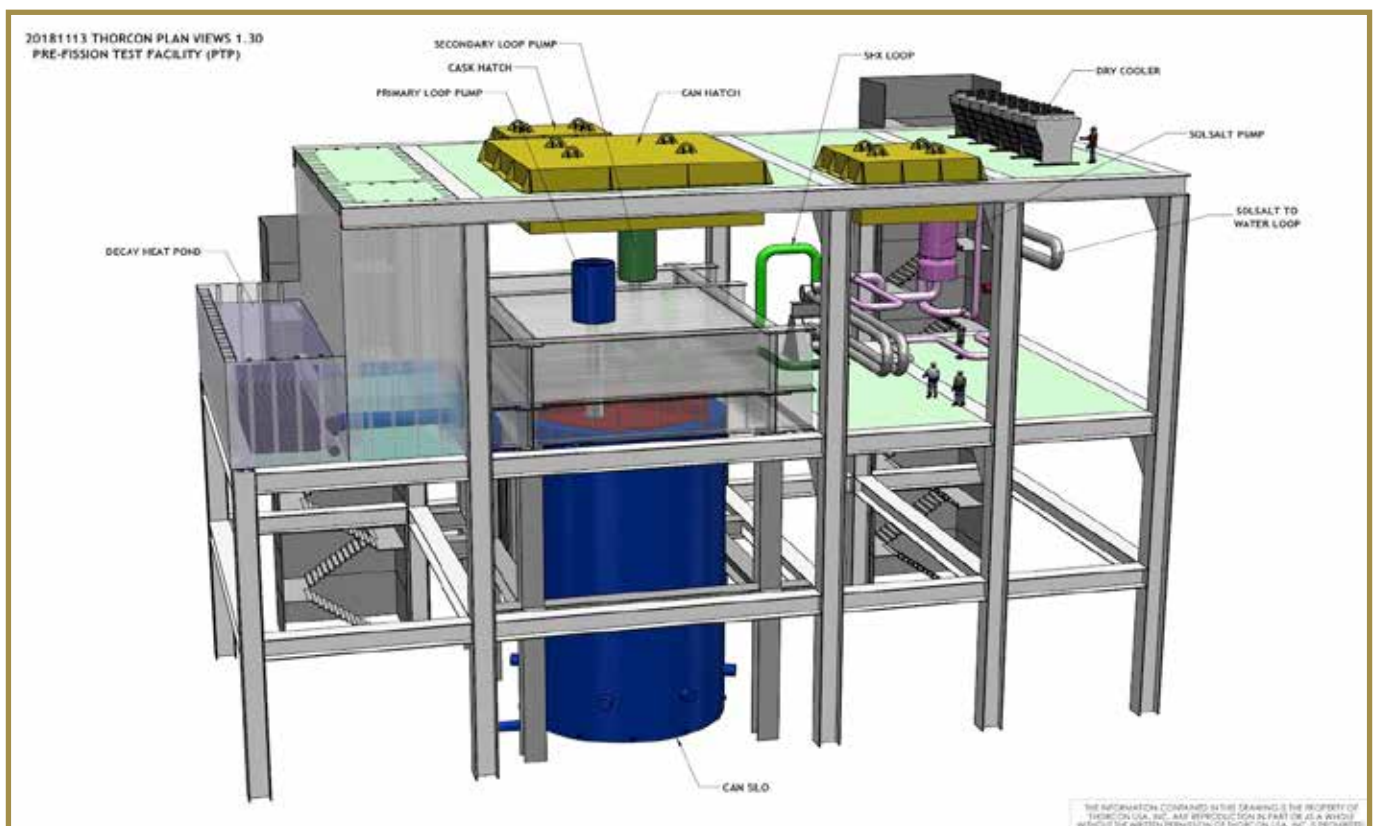
Wilayah lain yang sejauh ini juga memiliki nomor atom 90 pada tabel kimia ini adalah Kepulauan Riau, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Namun, jumlahnya tidak sebanyak di Babel.

Memang masih banyak yang menyangsikan pengembangan thorium untuk diolah menjadi nuklir sebagai

kemudian menjaga ketahanan dan pasokan energi dalam jumlah besar, PLTN bisa digunakan meskipun tetap harus mempertimbangkan faktor keselamatan dan keamanan. Bagaimana pun Indonesia, tetap mempertimbangkan PLTN sebagai salah satu alternatif," kata Anhar seperti dikutip di Antara, Senin (6/7/2020).

Anhar menuturkan PLTN di belahan dunia lain, terbukti tidak memiliki emisi gas karbon (CO₂), dan telah diakui secara legal dalam Kebijakan Energi Nasional (KEN).

"Di dalam KEN pun menyebutkan bahwa kalau kita memperhitungkan kelestarian lingkungan hidup, nuklir diper-



KLAIM AMAN - Desain cetak biru PLTT milik Thorcon yang diberi nama TMSR500.

Bob dalam acara konferensi di Jakarta pada Februari 2020 silam.

CEO ThorCon US dan Lead Designer ThorCon TMSR Lars Jorgensen mengungkapkan, kehadiran proyek PLTN diyakini dapat menyerap hingga 5.000 pekerja.

Lars juga membenarkan pihaknya membuka opsi penjangkauan dengan PT Timah Tbk untuk suplai bahan bakar thorium

"Sementara suplai uranium tidak ada

pembangkit listrik berbahaya. Namun, menurut Kepala Batan Anhar Riza Antariksawan mengatakan, pembangkit listrik tenaga nuklir atau thorium adalah solusi ketahanan energi yang andal, terjangkau, dan ramah lingkungan di masa depan.

Menurutnya, tidak bisa dibandingkan jenis energi tersebut dengan batu bara yang sudah digunakan selama lebih dari satu abad terakhir.

"Untuk menjaga lingkungan hidup,

timbang. Kita sekarang membutuhkan energi yang bersih," tuturnya.

Setidaknya, terdapat 440 PLTN di seluruh dunia yang telah menyumbang sekitar 15 persen pasokan listrik untuk 7 miliar manusia di Bumi.

Di dalam KEN, pemerintah mendorong untuk pemakaian energi baru, dan terbarukan terus ditingkatkan. Bahkan pada 2025, ditarget mencapai 23 persen untuk menyediakan sumber energi masyarakat. •ra



Gubernur Anies Baswedan melepas jenazah almarhum Sekretaris Daerah Provinsi DKI Saefullah.

FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Sekda DKI Saefullah Berpulang KEHILANGAN BESAR GUBERNUR DAN SEGENAP WARGA IBU KOTA

Dengan suara terbata-bata dan linangan air mata, Gubernur DKI Jakarta Anies Rasyid Baswedan memimpin upacara pelepasan jenazah Sekretaris Daerah Provinsi DKI Saefullah. Anies mengatakan kembalinya Sekda Saefullah ke rahmatullah menjadi catatan sejarah bagi Kota Jakarta.

Ketika Jakarta menghadapi wabah Covid-19, kata Gubernur Anies, seorang yang ikhlas bekerja siang malam berjuang memerangi Covid-19 di Ibu Kota, menjadi bagian yang telah berpulang. Mantan Menteri Pendidikan itu juga berpesan agar seluruh tempat ibadah di Ibu Kota menyempatkan salat gaib khusus untuk Sekda Saefullah. Bagi yang beragama lain, doakan dengan keyakinan agamanya masing-masing.

"Selamat jalan putra Jakarta terbaik. Kami percaya tempatnya mulia. Insya Allah kota ini akan mengirimkan doa tanpa henti," ujar Anies di teras pendopo Balai Kota DKI.

Anies juga berpesan agar masyarakat tetap disiplin menjalankan pro-

tolok kesehatan Covid-19 dengan keseriusan. (Baca juga: Sri Haryati Ditugasi Anies Gantikan Sekda Saefullah)

Almarhum Saefullah tutup usia di RSPAD Gatot Subroto pada Rabu, 16 September 2020 siang sekitar pukul 12.55 WIB. Sebelumnya Saefullah menjalani perawatan di Rumah Sakit MMC, kawasan Kuningan Jakarta Selatan, sejak 8 September 2020 hingga akhirnya dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto pada Minggu, 13 September 2020 dini hari.

Gubernur Anies sendiri yang menyampaikan kabar duka itu. "Siang ini keluarga besar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta kehilangan seorang pemimpin terbaiknya. Allahu yarham bapak Saefullah adalah pribadi baik, pekerja keras, orang yang selalu mengutamakan

untuk menyelesaikan semua tugas yang diembankan kepadanya. Siang hari ini, saya bersama Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, bapak Wakil Ketua, bapak Wakil Gubernur, dan seluruh jajaran keluarga besar Pemprov DKI Jakarta merasakan kehilangan yang amat mendalam,” ujar Anies.

Dalam kenangan Anies, Sekda Saefullah merupakan pribadi yang selama enam bulan terakhir bekerja siang malam untuk memerangi wabah Covid-19 di DKI Jakarta. Anies mengajak seluruh masyarakat untuk mendoakan Sekda Saefullah, apalagi beliau dikenal sebagai pribadi yang hangat kepada siapa saja.

“Bagi kita semua, Pak Sekda meninggalkan keteladanan. Pak Sekda meninggalkan kesan yang luar biasa. Bagi sebagian kita dan hampir semua kita, beliau bukan sekadar kolega, bukan sekadar teman kerja. Pak Sekda adalah sahabat dan bagi yang junior sering dipandang sebagai ayah. Tanggung jawab kita sekarang meneruskan yang telah beliau kerjakan. Meneruskan kebaikan-kebaikan yang telah almarhum torehkan di Balai Kota ini, di Pemprov DKI Jakarta. Sambil kita ingat bahwa semua kita suatu saat akan mengalami kematian. Kita jalankan amanat ini dengan sebaik-baiknya. Kita pegang amanat ini dengan setinggi-tingginya. Insya Allah kita terlindungi dan kita doakan seluruh warga Jakarta, *insya Allah* segera terbebas dari wabah COVID-19,” ujarnya.

Anies juga mengingatkan agar kematian tidak dipandang sebagai angka statistik. Karena itu, Anies menegaskan agar masyarakat tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan selama masa PSBB kali ini yaitu memakai masker, menjaga jarak, serta mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir secara rutin.

“Hari ini DKI Jakarta kehilangan salah satu putra terbaiknya. Seorang putra Betawi yang meniti karier dari guru hingga akhirnya menjadi Sekda. Kita doakan insya Allah beliau husnul khatimah. Dan saya berharap kepada seluruh masyarakat Jakarta. Jadikan ini semua sebagai pelajaran. Kondisinya memang mengkhawatirkan dalam artian sesungguhnya. Saya selalu

menggarisbawahi, pesan dari kami tidak pernah ditambahi, tidak pernah dikurangi, kami sampaikan apa adanya. Covid-19 ini nyata dan risikonya besar. Dan ini adalah contoh nyata dari risiko terburuk bila terpapar Covid-19. Dan yang terpapar adalah saudara kita sendiri,” sambungnya.

Saefullah telah menjabat sebagai Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta sejak 17 Juli 2014. Sebelumnya, Saefullah menjabat sebagai Wali Kota Jakarta Pusat pada tahun 2008-2014.

Jadi, dengan pengalaman dan pemahamannya mengenai Ibu Kota, Gubernur Anies layak merasa kehilangan sangat mendalam.

Dalam akun Instagram miliknya, Anies menilai Saefullah sebagai so-

bud itu.

Sepanjang bekerja bersama, Anies belum pernah melihat sosok Saefullah pamit pulang karena sakit. Senin, 7 September 2020 lalu, untuk pertama kalinya Sekda pamit pulang karena tidak enak badan, di tengah-tengah Rapat Paripurna DPRD beberapa waktu lalu.

“Selama isolasi mandiri kita terus komunikasi. Tidak ada kesan kondisinya berat. Ia tidak pernah mengeluh. Dalam komunikasi, ia tidak pernah memberikan kesan kondisi menurun. Tapi dari laporan pantauan tim Dinas Kesehatan, kondisinya menurun dan perlu penanganan intensif. Saya terima pembaruan setiap hari. Bahkan saat akan dipindahkan ke RSPAD Ga-



Gubernur Anies Baswedan dan Sekretaris Daerah Provinsi DKI Saefullah.

sok pribadi saleh, pekerja keras dan pemurah.” Hampir tiap hari kita bertemu. Berkerja selalu sepenuh hati tapi suka becanda. Serius tapi tidak ada suasana tegang. Pribadi yang matang, penuh pengalaman, selalu tenang dalam setiap situasi dan selalu tuntas. Atas semua ide, rencana dan tugas yang dihadapkan, bila saya tanyakan dan diskusikan maka jawabnya selalu: bisa!” tulis Anies.

Anies dan Sekda sering berkegiatan bersama hingga lepas tengah malam, lalu besok paginya sudah ada kegiatan.” Pak Sekda bisa subuh telah ikut serta dalam kegiatan subuhan bersama-sama. Ini bukan soal stamina fisik, ini juga soal semangat yang luar biasa besar,” tambah mantan Mendik-

tot Subroto ia masih selalu bernada positif,” urai Anies.

“Pada Minggu dini hari, tiga malam lalu, Almarhum menulis pesan melalui WA pukul satu dinihari kira-kira bunyinya, ‘Pak Gub malam ini saya pindah ke RSPAD.’ Beliau tetap tidak mau menceritakan bahwa kondisinya menurun. Benar-benar pribadi tangguh!” sambungnya.

Anies juga menjelaskan, Sekda selalu ada dalam perencanaan dan eksekusi semua urusan Covid-19 di Pemprov DKI. Menyiapkan semua jajaran, menggalang sumber daya, dan memastikan terlaksana sesuai rencana. Ia pun mengajak segenap warga DKI untuk mendoakan terbaik bagi putra asli Betawi itu. ●

INVESTASI SDM, MODAL KE PANGGUNG DUNIA

► Visi Pilar Saga Ichsan Memajukan Pendidikan di Tangsel

Pengembangan sumber daya manusia menjadi fokus utama pemerintah belakangan ini. Keuntungan generasi produktif pada 2045, memberikan keuntungan untuk Indonesia dalam persaingan global. Dimulai dari pendidikan, hingga menciptakan peluang usaha, adalah cara Pilar Saga Ichsan berkontribusi bagi bangsa ini.

Sosok satu ini kian ramai diperbincangkan masyarakat, khususnya di Tangerang Selatan (Tangsel), Banten. Muda, cerdas, dan visioner adalah slogan Pilar.

Ya, pemuda berusia 29 tahun ini berani membawa visi pengembangan sumber daya manusia sebagai modal generasi muda di Indonesia untuk bersaing di panggung internasional.

Menurut Pilar yang berpasangan dengan Benyamin Davnie, Tangsel merupakan kota yang diberkahi beragam potensi. Tak heran jika meski baru berusia 11 tahun, kota hasil pemekaran dari Kabupaten Tangerang ini telah mampu meraih beragam pencapaian dan keberhasilan membanggakan.

Namun, lulusan Universitas Parahyangan, Fakultas Teknik Jurusan Arsitek ini melihat, masih ada banyak pekerjaan rumah yang perlu ditingkatkan di Tangsel. Terutama pendidikan.

Pasalnya, meski berstatus sebagai kota penyangga Jakarta, ternyata rata-rata tingkat lama sekolah di sana hanya

11,8 tahun. Hal itu diungkapkannya, dalam sebuah diskusi di kawasan BSD City, Kamis, 17 September 2020.

Selain itu, Pilar menjelaskan, angka harapan lama sekolah di Tangsel pada 2019 telah mencapai 14,43 tahun. Angka ini membuat Tangsel menjadi daerah dengan pencapaian tertinggi di Provinsi Banten. Namun, dia percaya, angka itu bisa terus ditingkatkan lebih signifikan.

Caranya adalah dengan memperbanyak sekolah negeri berstandar internasional dan menguatkan pendidikan karakter.

"Rencana ini demi menjadikan siswa di Tangsel semakin cerdas, berkarakter, unggul, religius, juga memiliki daya saing di era revolusi industri 4.0," jelasnya.

Selain memperbanyak sekolah negeri termasuk yang berstandar internasional, Pilar juga memiliki program bernama 'Sekolah Merata'. Dalam program ini, Pilar berencana semakin meningkatkan sarana, prasarana, juga kualitas pendidikan di Tangsel.

"Selama kepemimpinan Ibu Airlin, beragam pondasi untuk kemajuan Tangsel telah berhasil dibuat. Kini, bersama Pak Benyamin, kami berkomitmen menjadikan Tangsel semakin lebih baik. Membuat Tangsel unggul di seluruh sektor dan bidang," kata Pilar.

Pilar meyakini, anak muda di Tangsel dapat mencapai panggung dunia. Namun, demi mewujudkan itu, pemerintah harus turun tangan, membantu hingga tingkat komunitas, serta memberi fasilitas sehingga produktivitas para pemuda di kota yang jumlah penduduknya berjumlah 4,5 juta jiwa tersebut.

"Untuk membangun anak-anak muda di Tangsel, tentunya pemerintah nantinya harus bisa turun ke seluruh komunitas anak-



anak muda di Tangsel, mendengarkan langsung aspirasi mereka yang memang produktif, setelah itu pemerintah ikut serta memfasilitasi setiap kegiatan produktif," ujarnya.

Nah, jika kelak dipercaya memimpin Tangsel, salah satu impian Pilar adalah membangun balai latihan kerja (BLK) sesuai dengan perkembangan zaman. "Kita akan dorong memiliki BLK sendiri. Dan pelatihannya harus mengikuti tren bisnis yang sedang berkembang. Agar lulusan dari BLK ini menjadi pengusaha baru yang produktif dan sukses," tegas dia.

Keseriusan Pilar mewujudkan mimpinya itu, tidak sekadar isapan jempol. Beberapa kali dia menemui sejumlah tokoh pendidikan di Indonesia. Salah satunya adalah Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta (UMJ) Syaiful Bakhri pada 16 Juli 2020 lalu.

Banyak hal yang dipelajarinya dari Syaiful Bakhri. Terutama mengenai *human resources capital*. Menurutnya, pandangan akademisi sangat diperlukan dalam proses pembangunan Kota Tangsel.

"Banyak sekali pembelajaran yang saya dapat dari Pak Rektor, beliau banyak kasih nasihat yang baik, dan pandangan beliau untuk kemajuan Tangsel sangat diperlukan ke depannya," akunya.

Ia berharap, ke depan akademisi bisa ikut serta terlibat dalam pembangunan Kota Tangsel. Terutama, dalam hal pengembangan SDM. "Karena, pandangan beliau saya yakin dibutuhkan untuk pengembangan SDM," sambung Pilar.

Sementara, Syaiful Bakhri mengatakan, Pilar merupakan tokoh muda yang mempunyai kemampuan. Namun, juga harus memperbanyak silaturahmi dengan masyarakat.

Pilar harus mengikuti hati dan

ahlak masyarakat. Kemudian, setelah itu dapat mendapatkan simpati dari masyarakat. "Kalau sudah dapat simpati, maka di-manage simpati itu," terangnya.

Kota Kelas Dunia

Menjadi pasangan dengan Benyamin Davnie ini, dia juga bertekad menjadikan Kota Tangsel sebagai barometer kota kelas dunia. Dia menjelaskan, kota tersebut, harus lebih nyaman ditinggali dan dikunjungi.

Caranya adalah dengan penataan kota yang terintegritas, tata ruang yang harus mampu menjadi pemacu peningkatan ekonomi masyarakat,

tempat berkerumumnya masyarakat kota, tempat tumbuhnya ekonomi dengan adanya fasilitas publik ini, dan juga menjadi tempat pertunjukan seni dan kebudayaan. Itu yang akan kita gagas," sambungnya.

Pria yang juga berprofesi sebagai arsitektur ini menjelaskan, fasilitas publik yang ada saat ini harus ditata ulang dan ditambah. Kata dia, dengan begitu, warga tidak lagi menjadikan mal sebagai satu-satunya pusat hiburan dan belanja.

Dia mencontohkan ada beberapa danau di Tangsel yang harus diubah menjadi fasilitas publik berkumpul. Dengan demikian, akan langsung

memberikan dampak kepada masyarakat.

"Latar pendidikan saya ialah desain urban untuk kota. Jadi setiap fasilitas publik itu harus tertata dan juga didesain sebaik mungkin. Harus dipikirkan juga aspek ekonomi, sehingga setiap fasilitas publik yang ada nantinya memiliki dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat di sekitarnya," ungkap pengurus Partai Golkar Banten ini.

Bagi Pilar, wajah sebuah kota megapolitan seperti Tangsel harus jauh lebih baik lagi. Sehingga Tangsel memiliki daya tarik tersendiri bagi orang di luar Tangsel untuk berbisnis atau berinvestasi di Kota Tangsel.

"Penataan kota ini juga

harus sejalan dengan membangun suhu bisnis yang sejuk, sehingga investor yang masuk ke Tangsel merasa sangat nyaman dan aman berbisnis di sini. Sehingga memberikan efek kerja yang besar bagi masyarakat," jelas putra dari Gubernur Banten Ratu Tatu Chasanah ini.

Ide gila Pilar itu didukung sejumlah tokoh lainnya. Tidak hanya dari kalangan akademisi, tapi juga tokoh publik. Penyiar radio dan juga presenter TV olahraga Rico Ceper menilai Pilar Saga Ichsan sebagai pemuda yang visioner. •ra



BISA DITINGKATKAN- Grafis program pemerataan sekolah di Tangerang Selatan.

serta sumber daya yang bisa bersaing skala internasional.

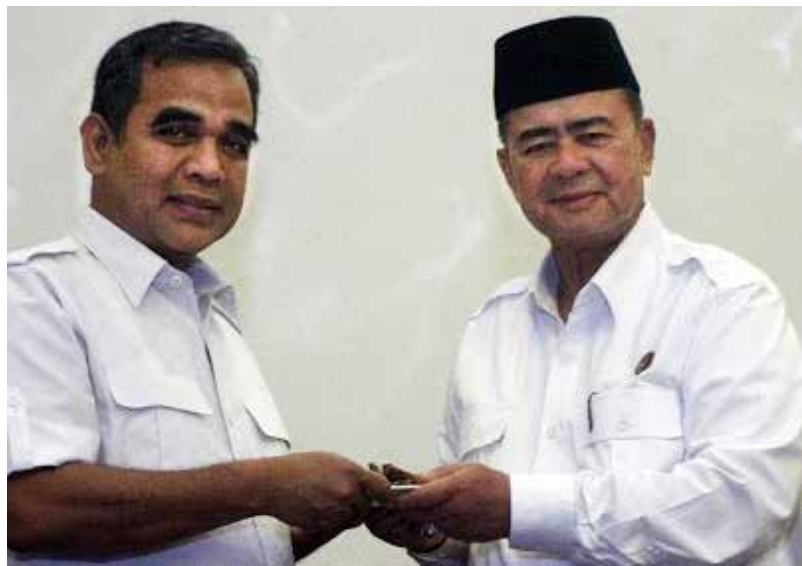
"Selama 10 tahun ini Ibu Airin dan Pak Benyamin memimpin, bisa dikatakan sudah sukses. Dengan memberikan pondasi awal untuk ke depannya. Dan ke depan, kami memiliki ide dan gagasan bagaimana kami melanjutkan penataan wajah kota ini menjadi wajah kota kelas dunia," paparnya.

"Pembangunan infrastruktur untuk pondasi awal sudah ada, dan yang akan kita tata adalah soal pemanfaatan fasilitas publik untuk menjadi

PILGUB YANG MENCUAT KE PENTAS POLITIK NASIONAL



Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy



Nasrul Abit-Indra Catri

Pemilihan umum Gubernur Sumatera Barat 2020 merupakan dinamika politik lokal yang gemanya menyeruak ke pentas nasional dibandingkan dengan pemilihan gubernur provinsi lainnya dalam Pilkada 2020. Sebut saja misalnya provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Bengkulu, Kalimantan Utara, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara yang juga menyelenggarakan pemilihan gubernur pada 2020 ini.

Tentu saja Pilgub Sumbar lebih menonjol bukan saja karena menjadi provinsi yang penduduknya paling banyak di antara lainnya. Heboh Pilgub Sumbar juga mencuat ke permukaan antara lain lantaran Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDI-P Puan Maharani membuat sebagian masyarakat Sumatera Barat tersinggung atas pernyataannya. Puan dalam acara pengumuman calon yang didukung partainya sempat mengatakan semoga Sumatera Barat menjadi provinsi yang memang mendukung negara Pancasila. Pernyataan itu muncul setelah memberikan rekomendasi kepada pasangan calon Mulyadi-Ali Mukhni pada 2 September 2020.

Pernyataan kontroversial dilontarkan oleh Ketua Umum PDI-P Megawati Soekarnoputri yang bertanya-tanya mengapa masyarakat Sumatera Barat belum menyukai partainya. Atas pernyataan kontroversial yang dianggap menyinggung masyarakat Sumatera Barat, akhirnya Mulyadi-Ali Mukhni mengembalikan surat rekomendasi

dari PDI-P, sehingga PDI-P mengundurkan diri dari dukungan dalam pemilihan gubernur di provinsi yang biasa disebut Ranah Minang ini.

Termasuk pasangan Mulyadi-Ali Mukhni, tercatat empat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumatra Barat (Sumbar) telah resmi mendaftar ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) Sumbar pada masa pendaftaran Jumat-Minggu, 4-6 September 2020. Ketua KPU Sumbar Amnasmen bersyukur proses pendaftaran keempat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar tersebut berjalan dengan baik dan lancar.

"Alhamdulillah KPU telah melaksanakan penerimaan empat pasangan cagub dan cawagub dengan lancar. Semuanya dinyatakan lengkap dan sah," ujarnya Minggu, 6 September 2020.

Empat pasangan calon Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tingkat provinsi itu yakni, Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy, Nasrul Abit-Indra Catri, Fakhrizal-Genius Umar, dan Mulyadi-Ali Mukhni. Berikut profil singkat empat pasangan calon tersebut.

1. Mahyeldi Ansharullah-Audy Joinaldy

Pasangan Mahyeldi-Audy mendaftar di KPU Sumbar pada Jumat, 4 September 2020. Pengusung pasangan ini adalah dua partai, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang memiliki 14 kursi di DPRD Sumbar.

sejak 2016 lalu. Sebelumnya, mantan Ketua DPD Gerindra Sumbar ini pernah menjabat sebagai Bupati Pesisir Selatan dua periode. Dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Bupati di kabupaten tersebut pada 2000-2005.

Sementara, Indra Catri merupakan Bupati Agam dan masih menjabat saat

instansi Polri. Pasangannya, Genius Umar, adalah Wali Kota Pariaman dan masih menjabat saat ini.

4. Mulyadi-Ali Mukhni

Pasangan Mulyadi-Ali Mukhni mendaftar di KPU Sumbar juga pada Minggu, 6 September 2020. Pengusungnya



Fakhrizal-Genius Umar



Mulyadi-Ali Mukhni

Mahyeldi saat ini masih menjabat sebagai Wali Kota Padang. Ini merupakan periode keduanya. Kader PKS yang juga dikenal sebagai penceramah ini telah menjabat sebagai Wali Kota Padang sejak 2014. Sebelumnya, dia juga pernah menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Sumatra Barat periode 2004-2009 dan Wakil Wali Kota Padang (2009-2014).

Sedangkan pasangan Mahyedi adalah Audy, seorang pengusaha yang berlatar politisi PPP. Ia memiliki keahlian di bidang pertanian, pertambangan, dan manajemen bisnis, serta menjabat sebagai Chairman of Perkas, Lintas Agro Group, dan mengelola sejumlah perusahaan lainnya.

2. Nasrul Abit-Indra Catri

Pasangan Nasrul Abit-Indra Catri mendaftar di KPU Sumbar pada Sabtu, 5 September 2020. Pengusungnya satu partai saja, yakni Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra) yang memiliki 14 kursi di DPRD Sumbar.

Nasrul saat ini menjabat sebagai Wakil Gubernur Sumbar. Dia menjabat

ini. Ini merupakan periode keduanya untuk jabatan itu. Dia sudah menjabat sejak 2010. Sebelumnya, Indra juga pernah menjabat sebagai Kepala Bappeda Kota Padang.

3. Fakhrizal-Genius Umar

Pasangan Fakhrizal-Genius Umar mendaftar di KPU Sumbar pada Minggu, 6 September 2020. Pengusungnya adalah koalisi Poros Baru yang terdiri atas Partai Golongan Karya (Golkar), Partai Nasional Demokrat (Nasdem), dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Koalisi ini memiliki 14 kursi di DPRD Sumbar.

Sebelum diusung oleh koalisi Poros Baru, pasangan Fakhrizal-Genius Umar pernah mencoba maju lewat jalur independen di Pilkada Sumbar. Namun, pasangan ini gagal maju dari jalur independen karena tak memenuhi syarat verifikasi faktual.

Fakhrizal merupakan mantan Kepala Polda Sumbar 2016-2019 sebelum akhirnya pindah ke Mabes Polri. Setelah mendaftar ke KPU Sumbar lewat koalisi Poros Baru, dia mengaku sudah mengajukan pengunduran diri dari

adalah Partai Demokrat dan Partai Amanat Nasional (PAN) yang memiliki 20 kursi di DPRD Sumbar.

Mulyadi merupakan Ketua DPD Partai Demokrat Sumbar. Saat ini, dia masih menjabat sebagai anggota DPR RI. Dia tercatat pernah menjabat sebagai Direktur Utama PT Adicitra 1996-2009 dan Komisaris Utama PT Adicitra Mulyata 2009-2010. Sedangkan pasangannya, Ali Mukhni, merupakan Bupati Padang Pariaman dua periode dan saat ini masih menjabat. Sebelumnya, dia pernah menjabat sebagai Wakil Bupati Padang Pariaman 2005-2010 dan Ketua DPW PAN Sumbar 2015-2020.

Sambil menunggu penetapan calon, KPU Sumbar meminta keempat pasangan calon memperbaiki dokumen pendaftaran. Perbaikan dokumen ikut menentukan apakah bakal pasangan itu akan ditetapkan atau jadi pasangan calon nantinya.

"Kami akan menetapkan pasangan calon apakah memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat pada 23 September 2020," kata Ketua KPU Sumbar Anasmen. ●



Presiden Joko Widodo pun melantik 20 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI)

DARI 31 CALON, TAMBAH 1, AKHIRNYA PRESIDEN LANTIK 20 DUBES BARU

Di tengah wabah Covid-19 sekalipun, diplomasi tetap harus berjalan. Pos-pos diplomatik Republik Indonesia di luar negeri pantang kosong melompong,

Maka Presiden Joko Widodo pun melantik 20 Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh Republik Indonesia (Dubes LBBP RI). Pelantikan berlangsung di Istana Negara pada Senin, 14 September 2020 pukul 10.00 WIB.

Beberapa nama yang dilantik adalah mantan Menteri Perdagangan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yakni Muhammad Lutfi sebagai Dubes RI untuk Amerika Serikat. Selain itu ada eks Pemimpin Redaksi Metro TV Suryoprato sebagai Dubes RI untuk Singapura.

Dari partai politik, ada nama Wakil Ketua Umum Partai Bulan Bintang (PBB) Sukmo Harsono yang dilantik sebagai Dubes RI untuk untuk Repub-

lik Panama merangkap Republik Honduras, Republik Costa Rica, Republik Nikaragua.

Selain itu ada nama Hildi Hamid yang dilantik sebagai Dubes RI di Azerbaijan. Mantan Bupati Kayong Utara itu sempat menjadi Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Jokowi-Ma'ruf Amin di Kalimantan Barat.

Pelantikan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 91/T Tahun 2020 tanggal 11 September 2020, serta Nomor 92/P dan 93/P tahun 2020 tanggal 14 September 2020 Tentang Pengangkatan Duta Besar Luar Biasa dan Berkuasa Penuh (LBBP) Republik Indonesia.

"Bahwa saya untuk jadi duta besar luar biasa dan berkuasa penuh, akan setia kepada Undang-undang Dasar



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

Republik Indonesia tahun 1945 serta akan menjalankan peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya demi dharmabakti saya kepada bangsa dan negara,” kata Presiden saat melakukan pelantikan yang kemudian diikuti oleh 20 duta besar di Istana Negara, Jakarta, Senin (14/9/2020) yang dapat disaksikan secara *live* melalui *link youtube* Sekretariat presiden.

Proses pengangkatan Dubes RI di luar negeri berlangsung melalui tahapan *fit and proper test* (uji kelayakan dan kepatutan) di Dewan Perwakilan Rakyat. Proses ini berlangsung sejak Mei 2020 lalu saat Presiden mengajukan 31 nama calon Dubes. “Presiden sudah mengirimkan daftar nama calon dubes kepada DPR. Pada rapat paripurna yang lalu, surat presiden sudah dibacakan oleh pimpinan sidang,” kata Anggota Komisi I DPR RI Charles Honoris Senin, 11 Mei 2020.

Selanjutnya, menurut Charles, pimpinan DPR juga sudah menugaskan Komisi I DPR untuk mempersiapkan proses *fit and proper test* untuk calon-

calon duta besar. “Rencana pertengahan bulan Juni Komisi I akan jalankan *fit and proper test* terhadap para calon dubes untuk bisa memberikan pertimbangan kepada presiden,” kata dia.

Dari daftar tersebut, terdapat nama-nama relawan dan politisi dari partai politik pendukung Jokowi dalam Pilpres 2019 silam. Menanggapi hal tersebut, Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai ‘bagi-bagi kue kemenangan’ melalui pembagian pos di duta besar sangatlah tidak etis.

“Menjadikan pos duta besar sebagai pos ‘bagi-bagi kue kemenangan’ pada relawan dan partai pendukung adalah tindakan yang tidak etis,” ujar Mardani Selasa, 12 Mei 2020. Anggota Komisi II DPR RI tersebut menegaskan posisi duta besar lebih berhak diisi oleh pejabat karir daripada diisi dengan niat balas jasa.

Alasannya, kata dia, jabatan tersebut merupakan ujung tombak diplomasi yang tak mementingkan politik semata, tapi juga ekonomi dan budaya. “Sudah saatnya kita lebih memperca-

yakan pada tokoh berpengalaman dan memiliki rekam jejak diplomasi yang baik,” katanya.

“Selain itu semua mesti ikut mengawasi saat *fit and proper test*, terkait kualitas dan kapasitas calon yang diajukan,” tambah Mardani.

Sdangkan Anggota Komisi I DPR Syaifullah Tamliha mengatakan, setelah menerima nama calon duta besar dari Presiden Joko Widodo, Komisi I akan melakukan uji kelayakan dan kepatutan pada Juni 2020 atau setelah perayaan Idul Fitri. Syaifullah mengatakan, uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan Komisi I terhadap calon duta besar Indonesia untuk negara sahabat, sebagai bahan pertimbangan Presiden.

“Kami bisa sampaikan ini tidak layak atau layaknya di negara ini. Tapi, semua keputusan ada di tangan presiden, kami hanya memperberikan pertimbangan,” tutur Syaifullah.

Malah, pimpinan DPR RI mendapat tambahan satu nama usulan calon Dubes LBBP dari Presiden RI Joko

Widodo melalui Surpres bernomor R26/Pres/05/2020/tanggal 22 Mei 2020 tentang Permohonan Pertimbangan bagi Calon Duta Besar LBPP RI untuk Negara Sahabat. Alhasil total ada 32 nama calon Dubes yang diuji kepatutan dan kelayakan.

Komisi I DPR RI telah merampungkan uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) terhadap 32 calon

negara-negara sahabat. "Uji kelayakan calon Dubes hari ini berakhir dan kami optimistis penempatan Dubes usulan Pemerintah kali ini akan meningkatkan hubungan bilateral Indonesia di berbagai sektor," ungkap Bobby, Kamis, 18 Juni 2020.

Selanjutnya, hasil uji kepatutan dan kelayakan calon Dubes oleh Komisi I DPR RI akan disampaikan kepada

berkedudukan di Vatikan;

2. Dr. Ratu Silvy Gayatri, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Finlandia merangkap Republik Estonia, berkedudukan di Helsinki;
3. Kamapradipta Isnomo, B.A., M.A., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Swedia merangkap Republik Latvia, berkedudukan di Stockholm;
4. Adam Mulawarman Tugio, S.H., LL.M., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Islam Pakistan, berkedudukan di Islamabad;
5. Ridwan Hassan, S.E., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Negara Qatar, berkedudukan di Doha;
6. Mayjen TNI (Purn) Dr. Imam Edy Mulyono, M.Sc., M.S.S., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Bolivarian Venezuela merangkap Persemakmuran Dominika, Grenada, Saint Lucia, Saint Vincent dan The Grenadines, serta Republik Trinidad dan Tobago, berkedudukan di Caracas;
7. Sukmo Harsono, S.E., M.M., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Panama merangkap Republik Honduras, Republik Kosta Rika, dan Republik Nikaragua, berkedudukan di Panama City;
8. Muhammad Lutfi, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Amerika Serikat, berkedudukan di Washington D.C.;
9. Dr. Drs. Mohamad Hery Saripudin, M.A., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Kenya merangkap Republik Demokratik Kongo, Republik Federal Somalia, Republik Uganda, United Nations Environmental Programme (UNEP), dan United Nations Human Settlements Programme (UN-HABITAT), berkedudukan di Nairobi;
10. Drs. Ronny Prasetyo Yuliantoro, M.A., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Islam Iran merangkap Republik Turkmenistan, berkedudukan di Tehran;
11. Drs. Hermono, M.A., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Malaysia, berkedudukan di Kuala Lumpur;
12. Ir. Suryopratomo, S.H., LL.M., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk



Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh (Dubes LBPP) RI untuk negara-negara sahabat. Uji kepatutan dan kelayakan ini terbagi delapan sesi dan berlangsung pada 16-18 Juni 2020 secara internal.

Anggota Komisi I DPR RI Bobby Aditya Rizaldi mengatakan bahwa uji kepatutan dan kelayakan tersebut untuk mendalami konsep para calon Dubes dalam meningkatkan hubungan diplomatik antara Indonesia dan

Pimpinan DPR RI. Kemudian, Pimpinan DPR menyampaikan hasil pembahasan di Komisi I DPR RI itu kepada Presiden Joko Widodo. Alhasil, inilah daftar 20 Dubes Baru yang menjadi pilihan Presiden RI dengan berbagai pertimbangan:

Kedua puluh nama Dubes LBBP RI tersebut ialah:

1. Laurentius Amrih Jinangkung, S.H., LL.M., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Tahta Suci Vatikan,

- Republik Singapura, berkedudukan di Singapura;
13. H. Hildi Hamid, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Azerbaijan, berkedudukan di Baku;
 14. Drs. Wisnu Edi Pratignyo, M.A., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Namibia merangkap Republik Angola, berkedudukan di Windhoek;
 15. Drs. Mayerfas, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Belanda merangkap Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW), berkedudukan di Den Haag;
 16. Dr. Andri Hadi, S.H., LL.M., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kerajaan Belgia merangkap Keharyapatihan Luksembourg, European Union (EU), World Customs Organization (WCO), dan organisasi-organisasi internasional lainnya di Brussels, berkedudukan di Brussels;
 17. Herry Sudradjat, S.H., M.B.A., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Mozambique merangkap Republik Malawi, berkedudukan di Maputo;
 18. Denny Abdi, S.E., M.Si., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Sosialis Vietnam, berkedudukan di Hanoi;
 19. Mohamad Irzan Djohan, sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Kesultanan Oman merangkap Republik Yaman, berkedudukan di Muscat; dan
 20. Drs. Agung Kurniadi, M.A., sebagai Duta Besar LBBP RI untuk Republik Ekuador, berkedudukan di Quito.

Acara pelantikan 20 Dubes baru kali ini berlangsung dengan tetap menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Para duta besar yang dilantik tersebut sebelumnya juga telah mengikuti pemeriksaan kesehatan yang diperlukan.

Acara pelantikan kemudian ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang didahului oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin untuk kemudian diikuti oleh tamu undangan terbatas. Selamat bertugas bagi para Dubes yang baru dilantik, dan semoga sukses. ●

DARI BUPATI BERTUGAS DI LUAR NEGERI



Sosok Hildi Hamid, bukanlah asing bagi warga Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Kayong Utara. Setelah selesai menjabat Bupati Kayong Utara, Hildi Hamid diberi mandat menjadi Ketua Pengurus Wilayah Nahdatul Ulama Provinsi Kalimantan Barat kemudian ditunjuk sebagai ketua Tim Kampanye Daerah (TKD) pemenangan Jokowi-Ma'ruf Amin di Pilpres 2019 untuk Provinsi Kalimantan Barat.

Bupati Kayong Utara, Citra Duani, yang juga kolega Hildi Hamid memberikan selamat sekaligus apresiasi kepada Hildi Hamid, mantan Bupati Kayong Utara, menjadi Duta Besar Republik Azerbaijan. "Saya selaku Kepala Daerah Kayong Utara memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya dan mengucapkan selamat kepada Hildi Hamid," kata Citra Duani di Sukadana.

Menurutnya, hal ini menoreh sejarah baru di Kalbar bahkan mungkin di Indonesia, dimana mantan Bupati KKU yang pernah menjabat selama dua periode dipercaya oleh Pemerintah Pusat menjadi duta besar.

Jejak karier dan prestasi Hildi Hamid, dikatakan Citra, sebagai pejuang yang ikut merintis pemelakaran Kabupaten Kayong Utara dari kabupaten Ketapang dan berhasil menghantarkan kabupaten Kayong Utara maju dan berkembang dengan berbagai hasil pembangunan, khususnya dengan Program Pendidikan dan Kesehatan Gratis.

"Perjuangan dan pengabdian Hildi Hamid patut dijadikan panutan sebagai inspirasi bagi dirinya untuk terus melanjutkan program-program yang telah berhasil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat," tutur Citra.

"Semoga beliau diberikan kesehatan dan keselamatan, serta selamat dan sukses menempati tugas yang baru," tambahnya.

Pengakuan Hildi sendiri, ia akan berangkat ke negara tempatnya bertugas paling lambat satu bulan setelah pelantikan.

Hildi Hamid lahir di Ketapang, Kalimantan Barat, 19 Agustus 1954. Dia sempat menjabat sebagai Bupati Kayong Utara selama dua periode yakni 2008-2013 dan 2013-2018.

Suami dari Diah Permata ini merupakan orang pertama asal Kalimantan Barat yang dipercaya oleh pemerintah menjadi duta besar. Dia berhasil menoreh sejarah baru di Kalbar. ●



TRUMP YANG NAIIF, MEMBUAT AS PADA PERIODE TERBURUK

Pandemi telah menyebabkan krisis ekonomi terburuk sepanjang Negeri Paman Sam merdeka pada 4 Juli 1776. Gelombang protes isu rasial, ditambah tekanan resesi ekonomi global, menjadikan Donald Trump dinyatakan oleh masyarakat Amerika Serikat sebagai presiden terburuk.

Sebuah studi dari Pew Research Center mengatakan 69 persen orang Amerika menganggap situasi ekonomi saat ini buruk. Sementara 30 persen menganggapnya baik.

Pasalnya, saat ini tingkat pengangguran di Amerika Serikat mencapai 8,4 persen pada Agustus 2020. CNN Business melaporkan sejak Trump menjadi presiden pada 2017 silam, pada saat pandemi ini perekonomian AS masuk jurang hingga -32,9 persen.

Sebenarnya, kondisi keterpurukan ekonomi Amerika di era milenium bukan yang kali ini saja terjadi. Di saat Barack Obama menjabat sebagai presiden pada 2009 silam, terjadi resesi ekonomi yang membuat rakyat AS, banyak kehilangan mata pencaharian.



FOTO: ISTIMEWA



Lebih dari itu, juga banyak masyarakat yang dinyatakan bangkrut usahanya. Termasuk petinju legendaris Mike Tyson. Namun, Obama berhasil mengantisipasi dengan cepat. Dana talangan (bailout) sebesar USD 700 miliar pun dikucurkan.

Sehingga bank-bank besar seperti Bank of America (BoA), Citi Bank, dan JP Morgan Chase, tak jadi gulung tikar. Sehingga, jumlah orang yang kehilangan pekerjaan pada 2009, tercatat hanya 421 ribu.

Namun, perekonomian Amerika saat ini dibandingkan 2009 lalu sangat berbeda jauh. Covi-19 ikut memengaruhinya. Bahkan Amerika Serikat kini menjadi episentrum dunia terhadap penyebaran virus Corona jenis baru ini.

Hingga kini, dilaporkan 188 ribu orang meninggal dunia karena Covid-19. Jumlah yang terinfeksi bahkan sudah mencapai 6,26 juta dinyatakan positif. Dengan pertambahan hingga seribu orang per harinya.

Akibatnya, tidak hanya ekonomi yang lumpuh. Persoalan kesehatan, dan kemanusiaan menjadikan Amerika Serikat berada di periode terburuknya.

Bank Dunia mencatat, pada kuartal kedua 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) AS menyusut sebesar -9,5 persen. Jumlah tersebut, membuat catatan tahun ke tahun, mengalami penurunan 32,9 persen. Terburuk dalam sejarah.

Tapi, Donald Trump selalu menolak kegagalannya. Ketimbang bekerja, pemilik perusahaan Trump Organization itu lebih sibuk menghabiskan waktunya di media sosial untuk menangkal informasi tentang penurunan ekonomi.

"Saya membangun ekonomi terbesar di dunia. Terbaik yang pernah dimiliki AS. Saya melakukannya lagi!" cuit Trump pada akun Twitter miliknya pada 8 Juni 2020.

Kepercayaan diri presiden yang berasal dari Partai Republik AS ini memang terlampau tinggi. Pada pidatonya di White House kantor Presiden AS- pada 2 Juli 2020, Trump mengatakan, ekonomi AS pada Juni lalu, menambahkan hampir 5 juta pekerjaan. "Ini kabar yang menggembirakan," ujar Trump.

Faktanya, tidak seperti itu. Sejak diserang wabah Covid-19 pada akhir

Maret 2020, sebanyak 22,2 juta orang di AS kehilangan pekerjaan. Banyak usaha, terutama pasar retail, yang merumahkan karyawannya.

Artinya, 5 juta pekerjaan yang bertambah pada Juni 2020, adalah karyawan yang kembali dipekerjaan oleh perusahaannya. Sementara, pada saat Trump berbicara di Washington D.C saat itu, masih ada 17,2 juta orang menganggur di AS.

Para ekonom memperingatkan akan butuh waktu bertahun-tahun bagi AS untuk pulih dari kehancuran.

"Bahkan ketika ekonomi perlahan mengalami pemulihan yang cepat pada Mei dan Juni, guncangan Covid-19 menyebabkan begitu banyak kerusakan pada bulan-bulan sebelumnya. Sehingga hasilnya adalah bencana ekonomi untuk kuartal kedua," tulis Direktur Penelitian di Institut Kebi-

Bank Dunia mencatat, pada kuartal kedua 2020, Produk Domestik Bruto (PDB) AS menyusut sebesar -9,5 persen. Jumlah tersebut, membuat catatan tahun ke tahun, mengalami penurunan 32,9 persen. Terburuk dalam sejarah.



jakan Ekonomi, AS Josh Bivens.

Kongres AS sedang memperdebatkan paket bantuan ekonomi lain. Tetapi tampaknya tidak mungkin mencapai kesepakatan. Sebelum tambahan dana darurat sebesar USD 600 per orang, untuk tunjangan pengangguran dituntaskan. Total anggaran yang dipersiapkan untuk program ini sebesar USD 2,4 triliun.

Tapi ditakutkan, kebijakan ini justru akan membuat AS terjerembab dalam pusaran bencana ekonomi yang tanpa henti.

"Fakta bahwa klaim pengangguran awal telah meningkat, mengkhawatirkan dan menggarisbawahi bahwa memulihkan tingkat konsumsi akan lebih berisiko," kata Wakil Presiden Moody's Investors Service, Madhavi Bokil.

Namun, Trump tampaknya tak ambil pusing. Meski dianggap tidak becus

mengurus negara, dia tetap fokus untuk berkampanye pada Pemilihan Presiden yang dilakukan pada 3 November 2020.

Demi meraih simpati publik, Trump bersama Partai Republik yang mengusungnya menjanjikan USD 100 miliar untuk dana pendidikan, dan USD 1,200 kepada warga AS untuk membayar sekolah.

Proposal itu dibuat tidak hanya sebagai stimulus dalam menghadapi pandemi. Tapi juga meraih simpati publik, dan berharap Trump kembali terpilih sebagai Presiden AS, mengalahkan Joe Biden, kontendernya dari Partai Demokrat.

Senator Mitch McConnell, dari Partai Republik mengatakan, pemerintah saat ini sedang melihat proposal tersebut, dan menyesuaikan targetnya, untuk mengatasi dampak ekonomi dari pandemi Covid-19. •ra

Kongres AS sedang memperdebatkan paket bantuan ekonomi lain. Tetapi tampaknya tidak mungkin mencapai kesepakatan. Sebelum tambahan dana darurat sebesar USD 600 per orang, untuk tunjangan pengangguran dituntaskan. Total anggaran yang dipersiapkan untuk program ini sebesar USD 2,4 triliun.





SIAGA - Presiden Joko Widodo mengecek markas TNI AL di Pulau Natuna, yang berbatasan dengan Laut Cina Selatan.

KIRIM SINYAL PERANG, CHINA MULAI MENYERANG

Ketegangan di Laut Cina Selatan semakin intens dalam beberapa pekan terakhir. Buntutnya negosiasi antara Indonesia dengan Tiongkok mengenai batas Zona Tangkap Eksklusif (ZTE) di Laut Natuna Utara membuat kedua negara saling bersiaga.

Dilaporkan beberapa waktu lalu, sebuah kapal milik Tiongkok, China Coast Guard (CCG) dengan nomor lambung 5204 ketika memasuki Zona Maritim Barat sekitar 1.500 kilometer dari daratan Tiongkok.

"Karena yang ini berhenti (Kapal CCG 5204), lalu berputar-putar, kami menjadi curiga. Kami mendekatinya dan mengetahui bahwa itu adalah kapal penjaga pantai China," kata Kepala Badan Keamanan Laut Indonesia (Bakamla) Laksdya TNI Aan Kurnia.

Indonesia pun tidak tinggal diam. TNI AL, memobilisasi lebih banyak patroli untuk mengusir penyusup yang tidak diinginkan. Analisis internasional menjelaskan, sikap yang diambil kedua negara adalah hanya langkah dalam perjuangan untuk mengamankan stok

makanan yang berkurang cepat.

Seorang juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan, kapal penjaga pantai Kelas Zhaojun seberat 2.700 ton itu sedang melakukan tugas patroli normal di perairan di bawah yurisdiksi Cina. "Hak dan kepentingan Cina di perairan terkait di Laut Cina Selatan sudah jelas," kata juru bicara.

Pulau Natuna berjarak sekitar 1.700 km di selatan provinsi paling selatan China, Pulau Hainan. Dan keseluruhan Laut Cina Selatan yang disengketakan, oleh Malaysia, Filipina, dan Vietnam, berada di antara keduanya.

Pemerintah Indonesia mengatakan klaim teritorial Tiongkok bersifat sepihak dan tanpa dasar hukum. Pengadilan Arbitrase Permanen pada 2016 menemukan bahwa, berdasarkan Hukum Laut PBB (UNCLOS), klaim sembilan garis

putus-putus yang dibuat Tiongkok tidak valid dan tanpa dasar sejarah.

Kantor berita yang dikendalikan Partai Komunis Cina, The Global Times menuduh Indonesia telah melakukan trik-trik kecil di Laut Cina Selatan.

Jakarta dan Beijing pun, dilaporkan media Australia, news.com.au, kedua negara telah bersitegang sejak Natal 2019 lalu.

Kapal penangkap ikan Tiongkok, di bawah arahan kapal penjaga pantai, berulang kali memasuki wilayah Vietnam dan Indonesia di Laut Natuna bagian utara.

Indonesia menanggapi dengan mengirimkan delapan kapal patroli, dan jet tempur F-16 dan mengatur armada penangkap ikannya sendiri untuk membantu pengawasan.

Pada Mei, pemerintah Indonesia dilaporkan, telah mengirimkan catatan resmi pengaduan kepada Sekretaris Jenderal PBB yang menyatakan bahwa Beijing tidak menghormati keputusan UNCLOS.

Namun Tiongkok, bersikeras bahwa hukum laut UNCLOS tidak berlaku, menyatakan keputusan pengadilan itu ilegal.

"The Global Times selanjutnya menuliskan, proposal bahwa sengketa laut harus diselesaikan sesuai dengan UNCLOS sebenarnya tidak masuk akal," tulis news.com.au dikutip Sabtu (19/9/2020).

Kementerian Luar Negeri Tiongkok mengatakan tidak mengklaim Pulau Natuna. Sebaliknya, ia mengklaim tempat penangkapan ikan yang kaya di utara dan timurnya. Tapi pihak Negeri Tirai Bambu menolak menentukan koordinat pasti dari batas sewenang-wenang ini.

Pemerintah berpendapat bahwa perairan tersebut adalah milik Indonesia di bawah ketentuan zona ekonomi eksklusif UNCLOS berdasarkan kepemilikannya di Natuna.

Namun, Beijing Global Times dengan tegas merujuk pada kemampuan terbatas Indonesia untuk mempertahankan wilayahnya. "Pemotongan anggaran pertahanan telah melemahkan kemampuan militer negara di Laut Cina Selatan termasuk Kepulauan Natuna," bunyi artikel itu.

"Ini akan mengurangi jumlah dan

frekuensi kapal pesiar angkatan laut Indonesia, patroli, dan latihan militer. Sistem militer dan polisi Indonesia khawatir bahwa negara akan kehilangan kekuatan sebelumnya untuk melindungi hak-haknya di laut," sambungan artikel tersebut.

Kementerian Luar Negeri Tiongkok memperjelas niatnya pada Januari lalu, untuk meminta Indonesia, menerima klaim mengenai laut di wilayah utara dan timur Pulau Natuna.

Analisis internasional mengatakan armada penangkapan ikan Cina bukan perusahaan sipil. Ini adalah milisi yang dikendalikan negara yang dikoordinasikan oleh komisaris politik dan dilatih untuk beroperasi bersama dengan Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok.

"Di banyak lokasi, Angkatan Laut CGC atau Tentara Pembebasan Rakyat Tiongkok, mencoba menormalkan

Kementerian Luar Negeri Tiongkok memperjelas niatnya pada Januari lalu, untuk meminta Indonesia, menerima klaim mengenai laut di wilayah utara dan timur Pulau Natuna.



FOTO-FOTO: ISTIMEWA

keberadaan kapal mereka dan kemudian menerapkan hak penangkapan ikan dan sembilan garis putus-putus," kata seorang analis angkatan laut kepada Asia Times.

Peneliti Institute of Defense and Strategic Studies yang berbasis di Singapura, Collin Koh menjelaskan, perkembangan terbaru akan menentukan kondisi Laut Cina Selatan. Sebab dalam konflik tersebut, tidak hanya melibatkan antara Tiongkok dan Indonesia. Amerika Serikat turut memiliki kepentingan disana.

"Daripada melihat Cina lebih agresif, mungkin lebih akurat untuk menggambarkan Cina sebagai masih agresif meskipun ada perselisihan terakhir," jelas Collin Koh. •ra

BERSITEGANG - Kapal penjaga pantai milik Tiongkok melakukan patroli di sekitar perairan utara Pulau Natuna.



SUMSEL SIAP SAMBUT PIALA DUNIA U-20

Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan meyakinkan kembali bahwa Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang sangat siap menjadi pelaksanaan Piala Dunia U-20 tahun 2021.





Indonesia 2021

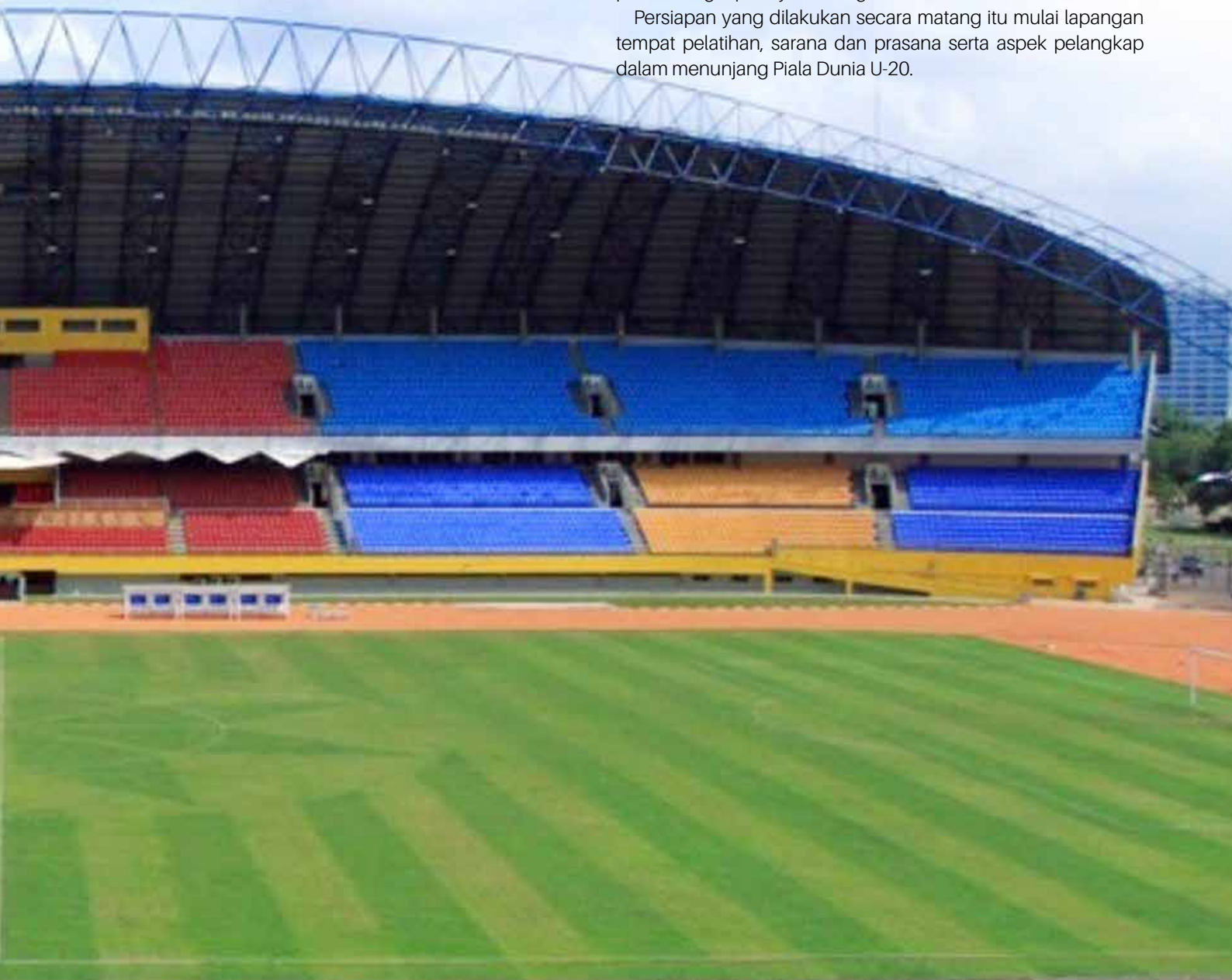
Kesiapan itu disampaikan langsung Gubernur Sumsel, H Herman Deru setelah Menpora Zainudin Amali menyetujui bahwa Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) siap menyelenggarakan Piala Dunia U-20 pada 2021.

Gubernur HD memastikan kembali sejauh mana persiapan di Stadion Gelora Sriwijaya bahkan dia menilai sejak ditetapkan pada tanggal 26 Juni 2020, Sumsel tepatnya Stadion Gelora Sriwijaya siap menjadi tuan rumah.

Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring terpilih bersama lima stadion lainnya yaitu Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta, Si Jalak Harupat Bandung, Manahan Solo, Gelora Bung Tomo Surabaya, dan I Wayan Dipta Gianyar Bali yang diusulkan ke Fifa untuk menjadi Piala Dunia U-20. Namun dari 6 tersebut akan di bagi lagi menjadi 4 wilayah yang siap menjadi pelaksanaannya.

"Harapan kita kebijakan FIFA tetap 6 wilayah ini, jikapun dijadikan 4 Wilayah ya Sumsel tetap masuk karena Sumsel ini mewakili luar Jawa. Dalam kesiapan- kesiapannya kita selalu berbenah selain memelihara kita akan upgrade dan kita siapkan kelengkapan-kelengkapannya," terang HD.

Persiapan yang dilakukan secara matang itu mulai lapangan tempat pelatihan, sarana dan prasana serta aspek pelengkap dalam menunjang Piala Dunia U-20.



"Kita sudah mempersiapkan 4 lapangan cadangan untuk latihan. Jadi jika nanti ada pertandingan opsional kita siapkan juga di Bumi Sriwijaya. Kita tinjau tadi ada lapangan di belakang Baseball, di belakang Aquatic, lapangan Panahan. Jadi kita sudah siap lahan, kita hanya butuh perbaikan rumput yang diawasi langsung PSSI bahkan FIFA," tuturnya.

Dalam persiapan ini tentu tidak ada halangan bagi Pemprov Sumsel hanya saja mengingat masa Pandemi Covid-19 ini masih beberapa hal yang harus dilakukan baik bidang ekonomi, kesehatan dan sosial.

"Untuk kendala saat ini baru saja menghadapi new normal yang baru saja kita persiapan pendanaan itu untuk menunjang aspek

kesehatan, perekonomian dan sosial yang akibat covid-19. Tapi saya yakin Pemerintah Pusat tidak tinggal diam dalam hal ini Kementerian PUPR, bahkan kita sendiri tentu sekuat tenaga untuk perispakan keuangan bersama DPRD Provinsi dan Pemerintah Kota Palembang,"terangnya.

Dia berharap jika Piala Dunia U-20 nantinya di Sumsel maka ini sangat berdampak besar bahkan dengan adanya event dunia itu juga akan menghapus semua stigma yang kurang baik.

"Pasca covid-19 yang telah menerpa

Sumsel diharapkan event ini menjadi stimulan bagi masyarakat di bidang ekonomi, pari-

wisata dan lainnya," tutupnya.

Keseriusan Pemprov Sumsel terus dibuktikan. Bahkan persiapan-persiapannya pun terus dilakukan mulai dari kelayakan Stadion, keamanan, kenyamanan, keindahan dan fasilitas pendukung lainnya.

Sebagai Kepala Daerah di Provinsi Sumsel tentu Gubernur H. Herman Deru ingin penyelenggaraan piala dunia u-20 ini harus berjalan sukses. Bahkan dia sengaja memimpin langsung rapat lanjutan percepatan persiapan pelaksanaan FIFA U-20 World Cup tahun 2021.

Apalagi, kata HD pada Bulan September 2020 ini FIFA akan datang langsung ke sini untuk melihat langsung kelayakan Stadion Jakabaring dalam menjadi tuan rumah World Cup U-20. Bahkan dia ingin Stadion Jakabaring menjadi sebagai Stadion yang prioritas ataupun sebagai tempat pembukaan dan penutupan.

"Kalau saya ingin kita ini tiga-tiganya, iya itu prioritas, pembukaan dan penutupan. Tidak tiga-tiganya paling tidak dua atau satu, ini bukti kita serius menjadi *host* dari piala dunia sehingga menjadi sorotan dunia," ungkapnya. •



STADION SRIWIJAYA JAKABARING PILIHAN JOKOWI

Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Zainudin Amali menyetujui bahwa Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel) siap menyelenggarakan Piala Dunia U-20 pada 2021. Bahkan Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring memiliki keunggulan tersendiri dibanding venue lainnya di Indonesia.

Menurutnya, fasilitas Stadion Jakabaring sudah terintegrasi satu sama lain. Sehingga Presiden Jokowi lah meminta agar Stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring Palembang menjadi salah satu venue penyelenggaraan.

"Lapangan untuk latihan sudah ada di sekitar kompleks stadion. Selain itu, gubernur bersama walikota dan pihak-pihak BUMN, BUMD, serta TNI dan Polri sudah siap. Jadi Palembang siap menyambut Piala Dunia untuk kejayaan bangsa," lanjut Menteri asal Gorontalo ini. Diakui Menpora, dia juga senang dengan kesiapan Pemda Sumsel.

"Presiden memang luar biasa. Meski awalnya tidak ada dalam daftar stadion yang dikirimkan PSSI ke FIFA, tapi presiden sudah memutuskan Jakabaring," tuturnya.

"Mudah-mudahan sih FIFA tidak keberatan atas perubahan itu," lanjut Menpora RI.

Seperti diketahui, selain Jakabaring, PSSI juga mengajukan Stadion Gelora Bung Karno (Jakarta), Stadion Manahan (Solo), Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya), Stadion I Wayan Dipta (Bali), dan Stadion Jalak Harupat (Bandung).

Untuk itu, Menpora meminta Pemda Sumsel dan Pemkot Palembang berbenah. FIFA, lanjut Menpora RI, berbeda dengan IOC. "Protokol mereka sangat ketat. Jadi, jangan ada kekeliruan sekecil apa pun," katanya.

FIFA, menurut Menpora, meminta banyak hal sebagaimana lazimnya disampaikan kepada negara-negara yang menjadi tuan rumah. Hal ini hendaknya juga menjadi perhatian bukan hanya bagi Gubernur Sumsel, tapi juga para pimpinan daerah yang stadion-stadionnya menjadi tempat pertarungan.

Baik Menpora maupun Gubernur Sumsel sama-sama bertekad Piala Dunia U-20 tahun depan bisa mengangkat perekonomian Indonesia. Selama persiapan, geliat ekonomi sudah bisa tumbuh.

"Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru bersama Walikota Palembang Harnojoyo, Senin (27/7) sudah menyerahkan Surat Komitmen Penyelenggaraan Piala Dunia U-20, Mei-Juni 2021," kata Menpora Zainudin.

Sedangkan Pemprov Sumsel sudah membentuk tim untuk mengawal progres persiapan Kota Palembang dan renovasi stadion.

Menpora berharap renovasi Stadion Jakabaring di Palembang bisa selesai satu bulan sebelum pelaksanaan.

Sekretaris Kemenpora Gatot S Dewa Broto berharap agar proses persiapan menjadi salah satu kota tuan rumah dapat diselesaikan satu bulan sebelum hari H. Sebab, Piala Dunia U-20 tidak menyisakan waktu banyak. Even ini digelar pada 20

Mei hingga 12 Juni.

"Sejauh ini kami melihat cukup baik. Apalagi Sumsel (Sumatera Selatan) memiliki pengalaman sukses di even olahraga internasional. Kami rencanakan satu bulan sebelum pelaksanaan semuanya sudah siap," ujar Gatot.

"Satu bulan jelang pertandingan dilakukan sterilisasi. Mudah-mudahan even ini sukses seperti even internasional sebelumnya," paparnya.

Sementara itu, pemerintah Provinsi Sumsel menyediakan dana dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) untuk perbaikan stadion yang mencapai Rp 20 miliar.

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Sumsel Akhmad Najib bersyukur dengan penunjukkan Stadion Jakabaring sebagai salah satu venue pertandingan.

Akhmad mengatakan, penggunaan dana APBD ini sudah menjadi komitmen pemerintah provinsi setelah sebelumnya Gubernur Sumsel Herman Deru mengajukan Stadion Jakabaring



sebagai venue.

Menurutnya, pemprov Sumsel selama ini selalu menjaga sarana dan prasarana stadion yang menjadi markas Sriwijaya FC itu supaya tetap terpelihara selayaknya pengelolaan stadion bertaraf internasional.

"Ini sudah komitmen Sumatera Selatan. Perbaikan ringan tidak akan menggunakan dana kementerian, tapi daerah bersedia mengalokasikan anggaran dari APBD," tegas Akhmad.

Sejauh ini, Pemprov Sumsel telah membentuk tim percepatan persiapan Piala Dunia untuk mengawal progres persiapan Kota Palembang dan renovasi stadion.

Akhmad menambahkan, fasilitas pendukung sudah tersedia di Palembang, mulai dari bandara internasional, rumah sakit bertaraf internasional, hingga fasilitas moda transportasi Light Rail Transit (LRT) yang memiliki rute langsung dari bandara ke Jakabaring. Bahkan Stadion GSJ berada dalam satu kompleks olahraga internasional. Cukup jalan kaki saja menuju stadion dari wisma atlet. •



FOTO-FOTO: PEMROV SUMSEL

TINJAU GSJ, HERMAN DERU OPTIMIS SUMSEL TUAN RUMAH PIALA DUNIA U-21

► Matangkan Kesiapan Stadion dan Sarana Pendukung

Berbagai persiapan terus dilakukan menyusul penunjukan Sumsel sebagai salah satu kandidat tuan rumah Piala Dunia U-21 yang akan digelar tahun 2021 mendatang.

Gubernur Sumsel H Herman Deru mengatakan, kesiapan Sumsel sebagai tuan rumah piala dunia U-21 saat terus dimatangkan. Termasuk juga beberapa poin rekomendasi yang sebelumnya disyaratkan oleh FIFA seperti rumput stadion, tempat duduk penonton, tempat duduk pemain, ruang ganti, atap stadion, warna stadion, dan lapangan latihan saat ini tengah dilakukan pembenahan.

"Kita sudah siap. Anggaran sudah siap, hospitality, stadion dan lainnya semua sudah siap," kata HD saat meninjau Stadion Gelora Sriwijaya Jaka-

baring, Palembang, Rabu (9/9).

Tidak hanya terfokus mematangkan kesiapan pada sektor internal saja, menurutnya, kesiapan sarana pendukung juga jadi perhatian pemprov Sumsel.

"Sektor penunjang juga kesiapannya terus dipantau. Termasuk juga kesiapan masyarakatnya, fasilitas umum seperti angkutan dari bandara ke stadion sudah kita siapkan," terangnya.

Tidak hanya itu, dia menegaskan, sampai saat ini keseriusan Sumsel untuk menjadi tuan rumah bahkan sampai dilakukan di daerah. Dimana sedikitnya 10 stadion di beberapa



kabupaten dan kota juga dilakukan pembenahan dan peningkatan melalui CSR dari berbagai pihak untuk Pemprov Sumsel.

"Agar ini juga semarak, 10 stadion di daerah juga dibangun. Ini bentuk keseriusan dan kesiapan kita," paparnya.

Herman Deru sendiri optimis peluang Sumsel menjadi salah satu daerah penyelenggara pesta sepakbola dunia tersebut. Kendati begitu, kepastiannya masih menunggu terbitnya Keputusan Presiden (Keppres).

"Kita baru berani mengatakan ini 90 persen jika Keppres sudah turun dan kita akan menggenjot rekomendasi yang telah diberikan sebelumnya. Kita juga optimis akan masuk dalam keppres tersebut. Sembari menunggu, tentu kita harus terus mematangkan persiapannya," paparnya.

Rasa optimis Herman Deru tersebut juga didasari oleh kondisi stadion Gelora Sriwijaya Jakabaring. Dimana, stadion Gelora Sriwijaya berada dalam

satu kawasan dengan venue pendukung dan cadangan.

"Kita ini dalam satu kawasan. Semua lapangan pendukung maupun opsional tersedia dalam satu kawasan ini. Itu yang membedakan kita dengan stadion lainnya. Tentu kita optimis, apalagi kita juga didukung oleh semua pihak," pungkasnya. •





CAHAYA DI KOTA SANG GAJAH PUTIH

Thailand yang dikenal dengan Negara Gajah Putih terletak di kawasan Asia Tenggara. Thailand berbatasan dengan Malaysia, Myanmar, Laos, dan Kamboja. Thailand terbagi atas 76 provinsi yang dihuni lebih dari 67 juta penduduk dengan agama Budha sebagai agama resmi dan agama mayoritas yang dipeluk oleh warganya. Namun, bukan berarti tidak ada agama selain Budha di tanah Thailand yang dikenal pula dengan Negara Siam ini, seperti Islam, Kristen, dan Hindu.



Islam di Thailand banyak dijumpai di beberapa provinsi wilayah selatan negeri gajah putih ini, antara lain Provinsi Pattani (80%), Yala (68,9%), Narathiwat, Satun (67,8%) juga Songkhla, seluruh provinsi tersebut dahulunya masuk wilayah kerajaan Pattani Raya pada abad ke-12, sebelum kerajaan Sukhotai berdiri. Meskipun Thailand terkenal sebagai negeri Buddha, akan tetapi sekarang kerajaan cukup mensupport kehidupan Islam untuk penduduknya. Tanggung jawab masalah berkaitan agama Islam di Thailand diemban oleh seseorang mufti yang memperoleh gelar Syaikhul Islam (Chularajmontree). Mufti ini ada dibawah kementerian dalam negeri serta juga kementerian pendidikan serta bertanggung jawab pada raja. Mufti bertugas buat mengatur kebijakan yg bersangkutan dengan kehidupan muslim, seperti penentuan awal serta akhir bulan hijriyah. Jumlah kaum muslimin di Thailand mencapai 4.6% dengan statistik terbaru sekitar 4 juta dari total 65 juta penduduk, namun Islam menjadi agama mayoritas kedua setelah Buddha.

Islam di Thailand mempunyai sejarah tersendiri yang bisa dibilang tragis dan berliku. Mulai dari abad ke-12 dimana Agama Islam menapakkan kakinya di kerajaan Pattani dan kemudian menjadi mayoritas di wilayah tersebut. Proses mas-

uknya Islam di Thailand dimulai sejak kerajaan Siam mengakui sisi kerajaan Pattani Raya (atau lebih dikenal oleh penduduk muslim Thailand sebagai Pattani Darussalam). Menurut Kantor Statistik Nasional Thailand pada tahun 2007, negara ini memiliki 3.494 masjid, dengan jumlah terbesar (636) di provinsi Pattani. Menurut Departemen Agama (RAD), 99% dari masjid yang berhubungan dengan Sunni cabang Islam dengan 1% sisanya Syiah.

Pemeluk agama Islam tersebar di tanah Thailand terutama di kawasan selatan yang pada abad ke-12 merupakan daerah Kerajaan Pattani yang dikenal dengan Pattani Raya (Pattani Darussalam). Kawasan Pattani Raya ini meliputi Pattani, Yala, Narathiwat, Songkhla dan Satun. Di beberapa wilayah ini lah agama Islam beraliran sunni dan syiah berkembang dengan pesat, sebanyak 10% atau 7,4 juta jiwa dari jumlah penduduk Thailand telah memeluk agama Islam dengan menyebut dirinya "Muslim-Melayu".

Beberapa tahun yang lalu terjadi puncak gejolak antara muslim-melayu dengan pihak Kerajaan Thailand tentang wilayah kekuasaan dan agama. Namun, kini Kerajaan Thailand mensupport kehidupan Islam yang dianut sebagian penduduknya dengan melakukan birokrasi melalui seorang mufti





yang memperoleh gelar Syaikhul Islam atau dalam bahasa Thailand disebut Chularajmontree. Jabatan mufti ini, secara konstitusional dibentuk oleh Departemen Dalam Negeri. Mufti ini bertugas mengatur kebijakan yang bersangkutan dengan kehidupan muslim seperti penentuan awal serta akhir bulan hijriyah. Oleh karenanya umat muslim-melayu Thailand Selatan lebih merasa aman dalam melaksanakan ibadah dan syari'at agama Islam di daerahnya, termasuk ketika bulan suci Ramadan. Bulan ini lebih terasa oleh masyarakat Thailand sebagai bulan yang penuh berkah. Pasalnya pada bulan ini hampir seluruh masjid ramai dengan amalan-amalan ibadah sepanjang harinya terutama pada 10 hari terakhir. Masjid penuh dengan orang-orang yang melakukan iktikaf dan tadarus Al Quran dan akan pulang ke rumah masing-masing se usai jamaah Shalat Idul Fitri.

Budaya mengaji kitab sebelum berbuka puasa juga ada Thailand. Setiap masjid memiliki jadwal pengajian sendiri-sendiri dengan kitab-kitab yang berbeda-beda. Selain itu, buka puasa bersama hingga shalat sunnah berjamaah juga mudah dijumpai di setiap masjid dan mushalla sebagaimana di Indonesia. Namun, bedanya di Thailand Selatan tidak ada budaya tadarus pasca Shalat Tarawih dan Witir ataupun setelah Shalat Subuh di setiap masjid atau mushalla, dengan memakai pengeras suara.

Selama Bulan Ramadan, lembaga pendidikan berbasis agama Islam di Thailand tidak mengurangi jumlah mata pelajaran sebagaimana hari biasanya, tapi menghilangkan jam makan siang, kegiatan peminatan (ekstrakurikuler) dan Shalat Ashar berjamaah, sehingga siswa dapat pulang baik ke rumah maupun ke asrama 1,5 jam lebih awal dari biasanya.

Meskipun masa puasa di Thailand Selatan ini lebih lama satu jam dari Indonesia, tidak menyurutkan semangat beribadah orang Indonesia di tanah dengan seribu pagoda ini terutama para pelajar yang menimba ilmu maupun melaksanakan pengabdian, sebab kondisi cuaca tak jauh berbeda dengan Indonesia. Selain itu, muslim-





melayu Thailand juga ramah dan terbuka terhadap warga Indonesia.

Warga Indonesia yang beragama Islam pada bulan puasa selalu mengadakan buka bersama setiap hari Sabtu di kantor konsulat RI tepatnya di Provinsi Songkhla. Menu yang dihidangkan juga menu makanan khas Indonesia dan suasana juga didesain seakan berada di Tanah Air, sehingga dapat mengobati kerinduan warga Indonesia pada suasana Ramadan di kampung halaman. Dalam hal makanan, sangat mudah bagi warga muslim untuk mencari makanan halal

baik yang siap saji maupun bahan mentah di kawasan muslim Thailand ini. Selain mudah dijumpai di kedai muslim pinggir-pinggir jalan setiap sore menjelang buka puasa ataupun di kedai-kedai yang berada di sekitar masjid. Menurut data pada tahun 2007 di Thailand terdapat 3.494 masjid dan 636 terletak di Pattani, Thailand Selatan. Apabila berada di kawasan non-muslim, maka kedai makanan muslim dapat melihat penjualnya, apabila berkerudung atau mengenakan peci maka ia termasuk kedai makanan halal sebab pembeda antara kedai halal dan



Saya sangat terkejut dan bertanya kepada seorang ustadh yang kebetulan beliau bisa berbicara bahasa inggris, "kenapa kendaraan di sini dibiarkan tidak terkunci, tidaklah mereka khawatir akan kehilangan kendaraannya?"

tidak halal terdapat pada penjualnya. Sumber ini diperoleh dari pengarahannya yang diberikan kepada pelajar dan mahasiswa Indonesia yang berada di Thailand. Apabila ragu dengan produk halal, Thailand memiliki badan yang menjamin kehalalan produk Thailand, yaitu The Halal Science Centre, Chulalongkorn University, Thailand dan dapat dicari produk halal pada web tersebut.

Begitulah muslim Indonesia yang menjalani Ramadan di Thailand, negeri mayoritas Budha. Tak seperti dulu, sekarang muslim Thailand dapat

secara bebas menjalankan ibadah sesuai syariat Islam. Pemerintah hanya mengawasi keamanan dan pencegahan terhadap tindakan terorisme saja. Selebihnya, kebebasan dalam menjalankan ibadah sangat dijunjung tinggi, tidak seperti bayangan banyak orang. Selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan.

Dilihat dari sektor ekonomi, pertanian menjadi sumber utama penghasilan masyarakat Thailand dengan hasil utamanya adalah padi. Thailand dijuluki lumbung padi ASEAN, karena menjadi negara penghasil padi terbanyak di Asia

Kegiatan PPL dan KKM Internasional ini akan berlangsung selama 5 bulan terhitung sejak Mei 2017 sampai Oktober 2017. Semua perwakilan dari Indonesia ditempatkan di daerah yang berbeda-beda, ada yang di daerah Pattani, Yala, Narathiwath, Phattalung, Krabi dan saya sendiri ditempatkan di Songkhla dengan seorang mahasiswa asal Tangerang-Banten.



Tenggara. Sedangkan jumlah penduduk dan agama, Thailand dihuni oleh 70 juta jiwa dengan mayoritas umatnya beragama Budha, hal itu bisa dibuktikan dengan banyaknya Pagoda (tempat ibadah umat Budha) di Thailand, sedangkan yang beragama islam hanya 10% dan semuanya tersebar dikawasan Thailand Selatan.

Kali ini saya akan berbagi cerita tentang kuatnya Islam di Thailand Selatan. Saya berhasil menginjakkan kaki di negeri gajah ini melalui program PPL dan KKM Internasional. Program ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia dengan Badan Alumni Internasional Thailand Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan, baik itu wawasan

keislaman maupun sosial budaya yang ada di kawasan Thailand Selatan. Selain itu program ini juga bertujuan untuk meningkatkan sumber daya manusia, memiliki tanggung jawab dan meningkatkan daya saing dikancah Internasional.

Dalam kegiatan ini Indonesia diwakili oleh 12 perguruan tinggi dengan jumlah total 72 mahasiswa. Alhamdulillah Aceh berhasil mengirim 10 wakil dengan masing-masing 5 dari Universitas Almuslim-Bireuen, dan 5 dari Universitas Serambi Mekkah-Banda Aceh. Menjadi salah satu wakil Aceh adalah momen yang sangat besar bagi saya dan sangat saya syukuri.

Kegiatan PPL dan KKM Internasional ini akan berlangsung selama 5



bulan terhitung sejak Mei 2017 sampai Oktober 2017. Semua perwakilan dari Indonesia ditempatkan di daerah yang berbeda-beda, ada yang di daerah Pattani, Yala, Narathiwath, Phattalung, Krabi dan saya sendiri ditempatkan di Songkhla dengan seorang mahasiswa asal Tangerang-Banten.

Yang membuat saya kagum dengan Thailand Selatan adalah ke-Islaman masyarakat di sini sangat kuat walau Islam adalah agama minoritas disini. Ketika pertama sekali melakukan shalat berjamaah di Thailand saya terkejut melihat jamaah shalat subuh seperti jamaah shalat jumat di Aceh, cuman bedanya shalat subuh di saf belakang dipenuhi oleh kaum hawa.

Uniknya lagi, ketika keluar, saya sadar tidak ada satu pun kendaraan roda dua yang terkunci. Saya sangat terkejut dan bertanya kepada seorang ustadh yang kebetulan beliau bisa berbicara bahasa Inggris, "kenapa kendaraan di sini dibiarkan tidak terkunci, tidakkah mereka khawatir akan kehilangan kendaraannya?"

Dengan tersenyum ustadh itu menjawab bahwa, 65 tahun beliau tinggal di Thailand Selatan belum sekalipun kejadian kendaraan jamaah masjid hilang. Saya terkejut dan berpikir, andai di Indonesia kendaraan jamaah shalat tidak terkunci, sudah pasti kita akan pulang jalan kaki karna yang terkunci saja bisa hilang apalagi dibiarkan tidak terkunci. ●

Program ini merupakan hasil kerjasama pemerintah Indonesia dengan Badan Alumni Internasional Thailand Selatan. Kegiatan ini bertujuan untuk mengembangkan wawasan, baik itu wawasan keislaman maupun sosial budaya yang ada di kawasan Thailand Selatan.

YOUTUBER SOHOR TANPA TEKOR



Para pesohor banyak menjadi model atau contoh bagi warga biasa. Termasuk dalam cara mereka memperoleh penghasilan. Banyak juga yang bercita-cita mengikuti jejak menjadi pesohor dengan merintis karir dari bawah. Tak terkecuali di Indonesia.

Salah satu cara memperoleh penghasilan maupun tambahannya yang kerap menjadi contoh, terutama bagi generasi milenial, mereka yang lahir di akhir Abad 20, terutama pada dasawarsa 1980-1990-an, ada-

lah membuat tayangan di saluran media audio visual youtube milik perusahaan Google Incorporation.

Nah, membuat tayangan di youtube juga memerlukan keahlian dan kompetensi. Para pesohor yang memang terbiasa berakting menunjukkan hal itu dengan berhasil mengumpulkan penghasilan tertinggi di channel Youtube. Ingin mengikuti jejaknya?

Sebagai perbandingan, inilah daftar para pesohor yang ternyata menjadi Youtuber (pemilik program tayangan di Youtube) dengan penghasilan tertinggi pada pertengahan 2020 ini versi situs socialblade yang biasa mendatanya. Berikut kutipannya:

Baim Wong dan Paula Verhoeven (Baim Paula)

Jumlah subscribers : 14,4 juta
 Jumlah video yang diupload (akumulatif) : 733
 Jumlah penonton (akumulatif) : 1,88 miliar
 Perkiraan pendapatan per bulan : 59.300 dolar AS - 949.100 dolar AS setara Rp 830,20 juta - Rp 13,29 miliar (kurs Rp 14.000 per dolar AS).



Raffi Ahmad dan Nagita Slavina (Rans Entertainment)

Jumlah subscribers : 16,3 juta
 Jumlah video yang diupload (akumulatif) : 1.403
 Jumlah penonton (akumulatif) : 2,73 miliar
 Perkiraan pendapatan per bulan: 48.500 dolar AS - 776.200 dolar AS setara Rp 679 juta - Rp 10,87 miliar.



Deddy Corbuzier

Jumlah subscribers : 10,1 juta
 Jumlah video yang diupload (akumulatif) : 613
 Jumlah penonton (akumulatif) : 1,34 miliar
 Perkiraan pendapatan per bulan : 34.600 dolar AS - 553.500 dolar AS setara Rp 484,40 juta - Rp 7,75 miliar.

Andre Taulany (Taulany TV)

Jumlah subscribers	: 3,58 juta
Jumlah video yang diupload (akumulatif)	: 271
Jumlah penonton (akumulatif)	: 398,45 juta
Perkiraan pendapatan per bulan	: 30.600 dolar AS-489.500 dolar
AS setara Rp 428,40 juta - Rp 6,85 miliar.	

4



Atta Halilintar

Jumlah subscribers	: 23,8 juta
Jumlah video yang diupload (akumulatif)	: 894
Jumlah penonton (akumulatif)	: 2,50 miliar
Perkiraan pendapatan per bulan	: 27.500 dolar AS-439.800 dolar
AS setara Rp 385 juta - Rp 6,16 miliar.	

5



Ria Ricis (Ricis Official)

Jumlah subscribers	: 21,1 juta
Jumlah video yang diupload (akumulatif)	: 962
Jumlah penonton (akumulatif)	: 2,86 miliar
Perkiraan pendapatan per bulan	: 24.800 dolar AS-396.500 dolar
AS setara Rp 347,20 juta - Rp 5,55 miliar.	

6



Gen Halilintar

Jumlah subscribers	: 16,4 miliar
Jumlah video yang diupload (akumulatif)	: 783
Jumlah penonton (akumulatif)	: 2,85 miliar
Perkiraan pendapatan per bulan	: 22.100 dolar AS-354.000 dolar
AS setara Rp 309,40 juta - Rp 4,96 miliar.	

7



Arif Muhammad

Jumlah subscribers	: 9,95 juta
Jumlah video yang diupload (akumulatif)	: 192
Jumlah penonton (akumulatif)	: 1,66 miliar
Perkiraan pendapatan per bulan	: 21.500 dolar AS- 344.500 dolar
AS setara Rp 301 juta - Rp 4,82 miliar.	

8



Entis Sutisna/Sule (Sule Channel)

Jumlah subscribers	: 4,81 juta
Jumlah video yang diupload (akumulatif)	: 1.497
Jumlah penonton (akumulatif)	: 529,58 juta
Perkiraan pendapatan per bulan	: 16.000 dolar AS-255.600 dolar
AS setara Rp 224 juta - Rp 3,58 miliar.	

9



Anang dan Ashanty (The Hermansyah A6)

Jumlah subscribers	: 3,44 juta
Jumlah video yang diupload (akumulatif)	: 717
Jumlah penonton (akumulatif)	: 466 juta
Perkiraan pendapatan per bulan	: 14.900 dolar AS-238.900 dolar
AS setara Rp 208,60 juta - Rp 3,34 miliar.	

10





PERTAMINA TIDAK MASUK AKAL

► Solar Diobral ke Malaysia, Harga Jual Masyarakat Mencekik

Di tengah ketidakpastian harga minyak dunia yang semakin tertekan, faktanya PT Pertamina (Persero) berhasil mengekspor minyak diesel High Speed Diesel (HSD) sebanyak 200 ribu barel ke Malaysia, seharga USD 9,5 juta.



LEBIH MURAH-Kapal MT Ridgebury Katherine Z yang mengekspor minyak diesel HSD ke Malaysia, berangkat dari Pelabuhan Kilang Minyak Pertamina di Balikpapan, Kaltim.

FOTO: DOK PERTAMINA

Namun, pada Semester I 2020, perusahaan milik negara ini mengaku rugi hingga Rp 11 triliun. Padahal harga BBM untuk masyarakat tak kunjung turun. Apa yang sebenarnya terjadi pada perusahaan yang Komisaris Utamanya saat ini adalah Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok tersebut?

Kapal MT Ridgebury Katherine Z berangkat dari Pelabuhan Kilang Balikpapan Kalimantan Timur, pada awal September 2020. Para karyawan Pertamina Refinery Unit V melambaikan tangan pada kapal yang membawa 200 ribu barel minyak HSD ke Malaysia tersebut.

General Manager Refinery Unit V Balikpapan Eko Sunarno pun dengan bangga menyampaikan kepada publik atas keberhasilan pengiriman perdana minyak HSD yang memiliki standar Euro 4 tersebut ke Negeri Jiran.

"Ini ekspor perdana, nanti di Oktober dan Desember dengan tujuan pasar internasional, juga ada ekspor dengan volume yang sama," kata Eko, Sabtu

(5/9/2020).

Menurut Eko, HSD yang diekspor ini adalah bahan bakar yang ramah lingkungan dan membuat mesin lebih awet. Kandungan sulfur atau belerangnya hanya 50 part per million (ppm).

Dengan nama dagang HSD0,005%S, produk ini diproduksi di Kilang Balikpapan sebanyak 200 ribu barel per bulan. Titik bakarnya di suhu 60 derajat Celsius dengan angka setana atau cetane number-nya adalah 53.

Spesifikasi tersebut sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 20 Tahun 2017 yang menetapkan spesifikasi bahan bakar minyak yang diizinkan untuk diperdagangkan, di mana cetane number minimal 51 dan kandungan belerang 50 ppm.

"Kami bangga Pertamina bisa memproduksi minyak berkualitas tinggi seperti ini," ujar Eko Sunarno.

Jika dihitung secara sederhana, harga jual HSD 50 ppm tersebut tidak ada yang salah. Yakni USD 47,5 per barel.

Sayangnya Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, tidak banyak memberi keterangan ketika ditanya mengenai perbedaan harga jual minyak diesel HSD 500 ppm, lebih murah dibandingkan dengan Pertadex.



Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati

Dia membocorkan bahwa seluruh transaksi HSD 50 PPM yang diekspor ke Malaysia tersebut dilakukan di Jakarta, yakni kantor pusat Pertamina. Sementara, pihaknya hanya melakukan pengapalan dan penyaluran saja. "Kita produksi dan pengapalan mas. Untuk transaksi saya rasa dari Jakarta ya. Setahu saya demikian," tutup Robert.

Transaksi itu sudah bisa dikatakan untung, mengingat harga minyak dunia pada 5 September 2020 lalu, tercatat berada di kisaran USD 39,80 per barel.

Namun, apabila dikalkulasi lebih terperinci dengan kurs tengah BI Rp 14.750, harga minyak HSD 500 ppm yang diekspor ke pembeli di Malaysia itu tidak lebih dari Rp 4.407 per liter.

Sebagai pembanding, harga jual minyak diesel terbaik di Indonesia yakni Pertadex dijual seharga Rp 10.200 per liter.

Sayangnya Vice President Corporate Communication Pertamina Fajriyah Usman, tidak banyak memberi keterangan ketika ditanya mengenai perbedaan harga jual minyak diesel HSD 500 ppm, lebih murah dibandingkan dengan Pertadex.

"Silahkan ke Mas Robert, tim dari Kalimantan ya mas," singkat Fajriyah pada pesan WhatsApp kepada INFO INDONESIA.ID, Senin (7/9/2020).

Roberth Marchelino Verieza berposisi sebagai Region Manager Com, Rel

& CSR Kalimantan. Saat dikonfirmasi mengenai hal ini, dia menjelaskan mekanisme penjualan produk HSD 50 ppm ke Malaysia, berbeda dengan Pertadex.

"Mekanismenya berbeda dengan Pertadex, karena bukan produk yang dijual secara retail. Produk ini (HSD) tidak diedarkan di Indonesia. Dijual dengan harga bulk atau partai besar," terang Robert, ketika dikonfirmasi mengenai hal ini.

Robert menjelaskan tidak bisa membandingkan secara apple to apple, HSD 50 ppm yang diekspor ke Malaysia dengan Pertadex. Menurutnya, minyak diesel HSD tersebut dijual secara partai besar. Sementara Pertadex dijual secara eceran.

Faktanya, berdasarkan penelusuran redaksi, anak perusahaan Pertamina, yakni PT Patra Niaga menjual dan mengedarkan minyak diesel HSD tersebut untuk pasar dalam negeri.

HSD tersebut diberi nama 'Patra Diesel' oleh Patra Niaga. Bahkan, anak



DIMINTA PENJELASAN-Komisaris Utama Pertamina Basuki Tjahaja Purnama berbincang dengan Presiden Joko Widodo, saat mengecek harga BBM pada salah satu SPBU di Jakarta.

perusahaan Pertamina tersebut telah menyalurkan HSD kepada beberapa perusahaan besar di Indonesia. Salah satunya adalah PT Jakarta International Container Terminal (JICT).

Harganya jual 'Patra Diesel' ini beragam. Untuk wilayah 1 dan 2, Rp 9.800 per liter. Wilayah 3, Rp 9.900. Terakhir untuk wilayah Indonesia 4, dijual seharga Rp 10.050 per liter.

Mengenai biaya produksi HSD 50 ppm ini, Robert menjelaskan biaya produksinya ternyata sama dengan Pertadex. "Biaya produksi sama, hanya 50 ppm diambil dari secondary proses. Ini inovasi yang dicoba dilakukan. Sehingga mengacu jawaban sebelumnya di atas, tidak bisa apple to apple. Perbandingannya dari sisi secara partai besar dan eceran dengan Pertadex," jelasnya.

Dia membocorkan bahwa seluruh transaksi HSD 50 PPM yang diekspor ke Malaysia tersebut dilakukan di Jakarta, yakni kantor pusat Pertamina. Sementara, pihaknya hanya melakukan

pengapalan dan penyaluran saja. "Kita produksi dan pengapalan mas. Untuk transaksi saya rasa dari Jakarta ya. Setahu saya demikian," tutup Robert.

Namun, Fajriah Usman ketika dihubungi kembali oleh awak media ini, demi mengetahui informasi lebih lanjut mengenai transaksi atau pun keterangan kedua bahan bakar diesel ini tidak mau menjawab. Pesan WhatsApp terkirim, saat ditelpon pun tidak mau menjawab.

Menanggapi hal ini, Anggota Komisi VII DPR RI Mulyanto pun menilai, penjualan minyak diesel HSD 50 ppm yang kualitasnya setara Euro 4 tidak masuk akal. Karena, harga Pertamina Dex yang setara Euro 2 dijual di dalam negeri dengan harga Rp10.200. "Ini jelas tidak masuk akal," tegas dia.

Dia sangat menyayangkan, apabila Pertamina menjual murah bahan bakar minyak berkualitas ke luar negeri. Sementara di dalam negeri terdapat wacana melakukan penghapusan BBM jenis premium dan pertalite.

Sesuai Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 28 Februari 2020, maka rumusan perhitungan adalah 10/90x(MOPS atau Argus HSD + Rp 2000/liter).

"Kalau benar, miris sekali. BBM berkualitas dijual murah ke luar, sementara kita malah mau menghapus premium dan pertalite," ucap Mulyanto menyayangkan.

Ia mempertanyakan, alasan Pertamina menjual minyak diesel ke luar negeri. Dan terkait hal ini perusahaan milik negara tersebut harus memberikan penjelasan kepada publik.

"Memangnya HSD 50 tidak laku dijual di domestik? Ini menjadi pertanyaan. Dan kami minta kepada pihak Pertamina menjelaskan ini," tegas dia.

Menanggapi hal ini Direktur Center Direktur Eksekutif Center of Energy and Resource Indonesia (CERI) Yusri Usman mengkalkulasi harga keekonomian Pertadex apabila mengacu pada nilai ekspor HSD 50 ppm tersebut, harusnya bisa lebih murah.

Sesuai Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 28 Februari 2020, maka rumusan per-

hitungan adalah $10/90 \times (\text{MOPS atau Argus HSD} + \text{Rp } 2000/\text{liter})$.

"Sehingga kalau dimasukkan angka HSD Rp 4,407 per liter, maka harga jual Pertadex yang wajar di SPBU sekitar Rp 7.000 per liter, karena masih standar Euro 2," ulas Yusri.

Yusri pun kaget dengan sikap perusahaan milik negara tersebut. Menurutnya, sangat lucu perusahaan yang memonopoli bisnis minyak di Indonesia itu menjual BBM kepada masyarakat dengan harga terlampau tinggi. Namun, malah menjual BBM Solar diesel setara Euro 4 jauh lebih murah ke Malaysia.

Terlebih lagi biaya produksi HSD 50 ppm dan Pertadex diterangkan Pertamina sama. Maka, dengan demikian terang Yusri timbul pertanyaan mengapa dengan kualitas hanya Euro 2 untuk Pertamina Dex dijual sangat mahal, meskipun harga dasar itu sudah ditambah nilai konstanta Rp 2000 per liter dan ditambah margin untuk Per-

HARGA BBM DIJUAL PERTAMINA (JULI 2020)

JENIS	HARGA TERBARU (PER LITER)	HARGA SEBELUMNYA (PER LITER)
Pertamax	Rp 9.000	Rp 9.200
Pertamax Turbo	Rp 9.850	Rp 9.900
Pertamina Dex	Rp 10.200	Rp 11.700
Premium	Rp 6.450	Rp 6.550
Pertalite	Rp 7.650	Rp 7.800
Dexlite	Rp 9.500	Rp 10.200
Bio Solar	Rp 9.400	Rp 9.300

HARGA BBM DIJUAL SHELL (JULI 2020)

JENIS	HARGA TERBARU (PER LITER)	HARGA SEBELUMNYA (PER LITER)
Shell Super	Rp 9.125	Rp 10.250
Shell V-Power	Rp 9.650	Rp 11.700
Shell Diesel	Rp 9.850	Rp 10.225
Shell Regular	Rp 9.075	Rp 10.000

HARGA BBM DI MALAYSIA (12-18 SEPTEMBER 2020)

JENIS	HARGA
RON 95 (per liter)	RM 1,66 (Rp 5.935)
RON 97 (per liter)	RM 1,96 (Rp 7.008)
Diesel (per liter)	RM 1,72 (Rp 6.150)

Sumber: diolah dari berbagai sumber

tamina.

"Karena di dalam konstanta itu sudah dimasukan semua biaya. Yaitu biaya pengolahan, penyimpanan, distribusi, susut dan pajak bahan bakar kendaraan bermotor. Maka kejang-galan hal inilah yang harus dijelaskan manajemen Pertamina ke publik," tegas dia.

Terlebih dengan harga minyak dunia yang terus tertekan sejak beberapa bulan terakhir. Pada April hingga Mei, harga crude oil paling rendah dalam 43 tahun terakhir. Yakni USD 11,13 per barel. (lihat grafis harga minyak dunia)

Menurutnya, adalah kebohongan besar Pertamina mengaku rugi karena nilai tukar pada Maret agak tinggi dan penurunan konsumsi BBM domestik mencapai 25 persen.

"Harus ingat PSBB yang dilakukan di tempat kita boleh dikatakan PSBB ecek-ecek. Karena masih banyak kendaraan beroperasi. Beda dengan Malaysia yang melakukan lockdown ketat dan harga BBM di SPBU disesuaikan setiap minggunya. Namun Petronas masih bisa mencetak laba di semester satu," jelas Yusri.

Dengan sikap seperti ini, maka wajar saja publik bingung, dengan laporan Pertamina yang mengaku dapat rugi pada Semester I 2020, mencapai Rp 11,13 triliun.

"Karena di dunia, sejak pandemi Covid-19, hanya Pertamina yang tak menurunkan harga BBM sepeser pun di SPBU. Makanya benar kata Ahok, merem saja Pertamina pasti untung. Berani jujur hebat!" tegas dia.

Oleh karena itu, Yusri mendesak Komisi VI DPR yang mengurus BUMN dan Komisi VII yang menaungi bidang energi dan sumber daya alam, meminta BPK RI melakukan audit investigasi terhadap biaya pokok produksi semua kilang Pertamina untuk dibuka ke publik.

"Jangan sampai ketidakefisienan proses bisnis di Pertamina, tapi rakyat yang menanggungnya lewat harga BBM yang mahal tak wajar," tegas Yusri.

Ini Keinginan Pemerintah

Di saat kondisi harga minyak dunia sedang mengalami kontraksi pada Maret hingga Agustus 2020, BBM yang dijual kepada masyarakat tak kunjung

PERGERAKAN HARGA MINYAK DUNIA SELAMA PANDEMI COVID-19

TANGGAL	HARGA (USD)
14 April	32,97
21 April	14,93
28 April	11,07
5 Mei	22,44
12 Mei	24,38
19 Mei	31,95
26 Mei	34,09
2 Juni	36,27
9 Juni	38,63
16 Juni	37,41
23 Juni	40,80
30 Juni	39,40
7 Juli	40,66
14 Juli	39,21
21 Juli	41,59
28 Juli	41,48
4 Agustus	40,27
11 Agustus	42,34
18 Agustus	42,64
25 Agustus	43,28
1 September	42,83
8 September	39,06
11 September	37,30

Sumber: *investing.com*

turun.

Salah seorang tokoh publik yang ngotot agar BBM diturunkan adalah Mulan Jameela. Penyanyi yang kini juga duduk sebagai Anggota DPR RI di Komisi VII beberapa kali berani menyuarakan pendapatnya, terutama mengenai wacana penghapusan Premium dan Peralite.

Dia mengusulkan, jika hal itu benar akan dilakukan, Pertamina harus menurunkan harga jual Pertamina setara dengan harga Premium. "Pendapat saya jika benar Premium dan Peralite dihapus, memungkinkan harga Pertamina diturunkan menjadi sama dengan Premium," ujarnya.

Istri Ahmad Dhani itu juga mempertanyakan kesiapan Pertamina dalam melakukan pengkajian sebelum memutuskan untuk mengeksekusi rencana penghapusan Premium dan Peralite tersebut.

"Apakah pihak Pertamina sudah memikirkan dampaknya terhadap masyarakat? Karena kita tahu semua kita mengalami ujian pandemi Covid-19. Kalau Premium dan Peralite dihapus tentu berdampak yang tidak baik kepada masyarakat," tambah Mulan yang duduk di Senayan berseragam Partai Gerindra.

Muhammad Said Didu yang pernah menjabat sebagai Staf Khusus Menteri ESDM di era Sudirman Said, menjelaskan secara gamblang bahwa tidak diturunkannya harga BBM bukan keinginan dari Pertamina. Namun, pemerintah.

di Indonesia itu penetapannya adalah Menteri ESDM. Sampai sekarang belum ada "izin" untuk menurunkan harga BBM dalam negeri. Walaupun harga minyak dunia itu turun sejak bulan Maret," ucap dia.

Merujuk pada transaksi ekspor bahan bakar diesel HSD 50 ppm ke Malaysia, dia menjelaskan bahwa produksi solar yang dilakukan Pertamina berlebihan. Sementara permintaan pasar dari dalam negeri kurang.

Sehingga, karena bahan bakar diesel berlebihan, akhirnya dijual ke pembeli yang berada di Negeri Jiran. Pun, Pertamina juga sudah mendapatkan



Dia menerangkan bahwa Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020 yang ditandatangani oleh Menteri ESDM Arifin Tasrif pada 28 Februari 2020, adalah cara yang digunakan untuk mencekik masyarakat.

"Yang menentukan harga ketentuan BBM di Indonesia adalah Menteri ESDM. Melalui Keputusan Menteri ESDM seingat saya bulan Februari 2020. Sehingga harga jual BBM

untung dari transaksi tersebut. Karena harga minyak dunia sedang turun.

"Jadi yang dikorbankan adalah rakyat. Akhirnya yang terjadi adalah rakyat Indonesia diperas. Sementara rakyat negara lain mendapatkan 'subsidi'," kritik pria berusia 58 tahun yang pernah menjabat sebagai Komisaris PT Bukit Asam Tbk (Persero).

Harusnya menurut Said Didu di tengah situasi pandemi dan tekanan

ekonomi seperti saat ini, pemerintah harus lebih peka menanggapi keluhan dan kebutuhan masyarakat. Bukan, malah membuat masyarakat panik dengan berbagai kebijakan, termasuk wacana menghapus Premium dan Peralite, sementara harganya tak kunjung turun.

Sebab jika merujuk pada harga minyak dunia saat ini, Said Didu menghitung harga keekonomian BBM seperti Premium sekitar Rp 6.000 – 6.500 per liter.

"Itu kira-kira harga keekonomiaian. Bukan harga keinginan. Jadi sekarang harga yang ada di Indonesia itu harga



keinginan pemerintah," tegas dia.

Merujuk harga BBM di wilayah Jawa dan Bali, untuk jenis Premium saat ini Rp 6.750 per liter. Sementara Peralite dijual Rp 7.650 per liter. Sedangkan Pertamina Rp 9.000, dan Pertamina Turbo Rp 9.850 per liter.

Sedangkan untuk kendaraan menggunakan mesin diesel, Bio Solar diharagai Rp 9.400 per liter. Lalu, Dexlite Rp 9.500 liter. Sedangkan yang paling ma-

hal Pertamina Dex Rp 10.200 per liter.

Sebagai perbandingan, operator luar seperti Shell menjual BBM setara Pertamina Turbo, yakni Shell V-Power hanya Rp 9.650 per liter. Dan yang setara Pertamina Dex, yaitu Shell Diesel hanya Rp 9.850 per liter.

Padahal di negara tetangga, Malaysia telah menurunkan harga BBM di masa pandemi sangat drastis. Pada periode 12-18 September 2020, Petronas menjual BBM setara Pertamina Turbo hanya RM 1,96 atau Rp 7.008 per liter. (lebih jelas lihat grafis)

Lalu mengapa harga di dalam negeri tak bisa turun? Jawabannya, ucap Said Didu disebabkan karena Menteri ESDM Arifin Tasrif yang tak berani mengambil tindakan di saat genting seperti sekarang.

"Makanya harga BBM yang dijual Pertamina dengan operator asing seperti Shell, sama kan? Karena di peraturan itu (Kepmen ESDM Nomor 62 K/12/MEM/2020), perusahaan asing harus mengikuti Peraturan Menteri ESDM," jelas dia.

Dengan kondisi seperti ini, akibatnya yang menjadi korban adalah masyarakat. Pun Said Didu mengaku sudah sering menyuarakan keluhan ini melalui akun media sosialnya. Namun, kritik atau pun pendapatnya itu malah dipandang sebagai sentimen negatif oleh pemerintah.

"Bukan hanya Pertamina yang mau memeras rakyat. Tapi juga perusahaan asing yang juga memeras rakyat Indonesia, melalui keputusan pemerintah," pungkas Said Didu.

INFO INDONESIA.ID mencoba mengkonfirmasi mengenai kebijakan hal tersebut kepada Kementerian ESDM. Namun, pesan dan permintaan untuk wawancara tidak digubris oleh Kepala Biro Komunikasi Layanan Informasi Publik dan Kerja Sama Kementerian ESDM Agung Pribadi.

Namun, pada rapat kerja virtual dengan Komisi VII DPR RI, pada 4 Mei 2020, Menteri ESDM Arifin Tasrif menerangkan, meski harga minyak dunia turun, banyak pertimbangan untuk menurunkan harga BBM.

Selama 13 tahun terakhir menurutnya setiap harga minyak anjlok karena kondisi krisis, biasa akan kembali

"Bukan hanya Pertamina yang mau memeras rakyat. Tapi juga perusahaan asing yang juga memeras rakyat Indonesia, melalui keputusan pemerintah," pungkas Said Didu.

Namun, pada rapat kerja virtual dengan Komisi VII DPR RI, pada 4 Mei 2020, Menteri ESDM Arifin Tasrif menerangkan, meski harga minyak dunia turun, banyak pertimbangan untuk menurunkan harga BBM.

rebound dalam tiga bulan. Misalnya pada krisis 2008 harga minyak anjlok sampai USD 38 per barel, lalu kembali normal menjadi USD 70 per barel.

Akan tetapi kondisinya saat ini berbeda, di mana ada pandemi Covid-19 yang diikuti oleh perang harga minyak antara Rusia, Arab Saudi, dan Non-Organisasi Negara-Negara Pengekspor Minyak (OPEC).

Arifin mengatakan masih akan terus menunggu realisasi pemotongan produksi minyak global oleh negara-negara OPEC dan Non-OPEC.

"Di sisi lain, Covid-19 terjadi penurunan karena kebijakan lockdown dan melemahnya ekonomi sehingga demand menurun. Penurunan ini harga

papar Arifin memperkuat argumentasinya.

Lebih lanjut ia menerangkan rata-rata konsumsi BBM nasional pada Mei 2020, turun 26,4 persen, dengan rincian rata-rata penjualan bensin turun 29,8 persen dan rata-rata volume penjualan minyak solar 18,7 persen.

Anjloknya konsumsi ini membuat biaya operasi terdampak menjadi lebih tinggi, disamping anjloknya kurs yang juga menjadi pukulan telak.

Arifin menuturkan bahwa baru pertama kali ini sejak 2008 terjadi Mean Of Platts Singapore (MOPS) di bawah minyak mentah Indonesia (ICP). Bagaimana gasoline yang sudah diproses harganya di bawah minyak mentah.

Dalam kondisi sulit ini, Kementerian ESDM juga memperhatikan kemampuan Pertamina dan keuangannya. Arifin meminta agar diberikan pengertian dan dukungan.

Ia sangat mengerti dorongan untuk menurunkan harga BBM namun penyerapan sangat terbatas dan Pertamina sebagai badan usaha milik pemerintah harus menjaga keberlanjutan produksi. "Stok Pertamina tinggi dan Pertamina harus jaga keberlanjutan produksi," tutur Arifin saat itu.

Nada yang sama juga ducapkan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati, yang mengaku tak bisa dengan mudah menurunkan harga BBM.

Dia menjelaskan, bisa saja harga BBM turun. Dengan catatan biaya produksi harus lebih rendah. Yakni meningkatkan impor minyak murah dan memangkas produksi, atau bahkan menutup sektor hulu migas.

"Tapi, kemudian kalau hulu migas ditutup, kilang-kilang ditutup, kita akan kembali lagi ke zaman dulu, tergantung dengan impor," kata Nicke dalam sebuah diskusi virtual, pada 15 Juni 2020.

Dengan ditutupnya kilang, maka mimpi pemerintah untuk menciptakan kemandirian energi pun dipastikan tak akan terwujud.

Nicke mengakui, harga produksi minyak dalam negeri sempat jauh lebih mahal ketimbang impor. Namun, perlu ada perhitungan panjang untuk memutuskan meningkatkan impor demi menciptakan harga BBM yang lebih murah.



Anggota Komisi VII DPR RI, Mulyanto

minyak sampai USD 22 per barel bahkan pernah minus USD 37 per barel karena tidak ada demand kemudian storage penuh," kata Arifin dalam raker virtual tersebut.

Menurutnya penurunan harga BBM sudah dilakukan sebelum adanya pandemi dan perang dingin antara OPEC dan Non OPEC. Ia juga menyebut harga BBM Indonesia dibandingkan dengan negara-negara ASEAN masih murah.

"Kita bisa lihat dibandingkan dengan Filipina, bensin setara Peralite dijual dengan harga Rp 10.000 per liter. Kemudian di Laos Rp 14.000 per liter,"

FOTO: DOK DPR

"Waktu itu ketika harga minyak naik tiga bulan kita menunggu untuk menaikkan harga, tidak serta-merta," ujarnya.

Oleh karena itu, Nicke menekankan, masyarakat tidak dapat membandingkan secara langsung pergerakan harga BBM nasional dengan tetangga.

"Kecuali kalau kita memang ini trader ya trading company. Trading company mudah sih beli jual beli jual. Tapi, apa kabarnya dengan ketahanan dan kemandirian energi," tutur dia.

Tetap Impor Sampai 2024

Pada rapat kerja antara Pertamina dengan Komisi VII DPR RI pada 31 Agustus 2020 lalu, Nicke diminta menjelaskan program kerja perusahaan yang kini dipimpinnya terutama dari sisi impor minyak.

Pertanyaan soal impor tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi VII Ramson Siagian yang memimpin rapat saat itu. Tapi Nicke mencoba mengelak dari pertanyaan itu.

Jawabannya tidak lugas, dan memutar. Seolah ingin menghindari pertanyaan yang diajukan oleh Ramson yang terpilih sebagai anggota dewan, dari dapil Jawa Tengah X.

"Sebentar, ibu yang kita mau tahu hanya berapa impor Pertamina sampai 2024 itu, fokus di situ dulu," ujar Ramson.

Nicke pun melanjutkan dan justru menjelaskan mengenai proyek RDMP (Refinery Development Master Plan). Dia menjelaskan hal itu sebagai latar belakang untuk menjelaskan volume impor.

Namun Ramson kembali memotong penjelasan Nicke. Dia menilai penjelasan Nicke agak melenceng dengan apa yang menjadi pembahasan.

"Pertamina harusnya bisa membuat proyeksi impor selama 5 tahun ke depan. Jadi tidak perlu detil seperti itu, sebut saja volume impornya berapa," kata Ramson.

Akhirnya Nicke menyerahkan penjelasannya kepada bawahannya terkait angka proyeksi volume impor hingga 2024.

Untuk impor BBM diproyeksikan setiap tahunnya akan mencapai sekitar 200-250 ribu barel per hari setiap tahunnya hingga 2024. Sementara untuk impor minyak mentah sekitar 250-300 ribu barel per hari.

"Ya makanya bikin yang mudah, ini kan nggak jelas, bikin bingung, kok malah jadi bahas refinery, padahal singkat saja," tutur Ramson.

Jadi berdasarkan rapat 31 Agustus 2020 itu, jumlah BBM yang diimpor adalah sekitar 73 juta ton barel per tahun. Sementara untuk minyak mentah sekitar 109,5 juta ton barel tiap tahun hingga 2024.

Sebagai catatan, pada 2018 lalu, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) menghitung konsumsi BBM pada tahun itu sebanyak 75 juta kilo liter (KL). Dari jumlah itu Pertamina mengelola sekitar 79 persen. ●



info indonesia

INOVASI UNTUK NEGERI

EDISI # 02 SEPTEMBER 2020

<https://infoindonesia.id>

Rp. 50.000 - Jabotabek
Rp. 75.000 - Luar Pulau



**AHOK
DIAM-DIAM JUAL
SOLAR MURAH
KE MALAYSIA**